

Membangun Kemitraan

Untuk Menopang Pertumbuhan Berkualitas yang Berkesinambungan



DAFTAR ISI

Pendahuluan

- 4 Ikhtisar Data Keuangan
- 8 Laporan Komisaris Utama
- 12 Laporan Direktur Utama
- 18 Laporan Ketua Dewan Pengawas Syariah

Tinjauan Bisnis

Pendukung Bisnis

- 32 Manajemen Risiko
- 36 Pengembangan SDM
- 40 Teknologi Informasi

Tinjauan Tata Kelola Perusahaan

- 44 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 46 *Good Corporate Governance* BCA Syariah

Tinjauan Keuangan

Data Perusahaan

- 150 Struktur Organisasi
- 152 Profil Dewan Komisaris
- 153 Profil Direksi
- 154 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 155 Profil Komite Audit
- 156 Profil Komite Pemantau Risiko
- 157 Profil Remunerasi Dan Nominasi
- 158 Komisaris, Direksi, dan Pejabat BCA Syariah
- 159 Informasi Pemegang Saham
- 160 Informasi Kelompok Usaha
- 161 Produk dan Layanan
- 162 Jaringan Kantor



Pendukung
Bisnis

Tinjauan
Bisnis



Tinjauan
Keuangan

VISI, MISI & TATA NILAI

VISI

- Menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan Masyarakat

MISI

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah perorangan, mikro, kecil dan menengah

TATA NILAI

- *Teamwork*
- *Responsibility*
- *Integrity*
- *Professionalism*

- IKHTISAR DATA KEUANGAN
- LAPORAN KOMISARIS UTAMA
- LAPORAN DIREKTUR UTAMA
- LAPORAN KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1

PENDAHULUAN



IKHTISAR DATA KEUANGAN

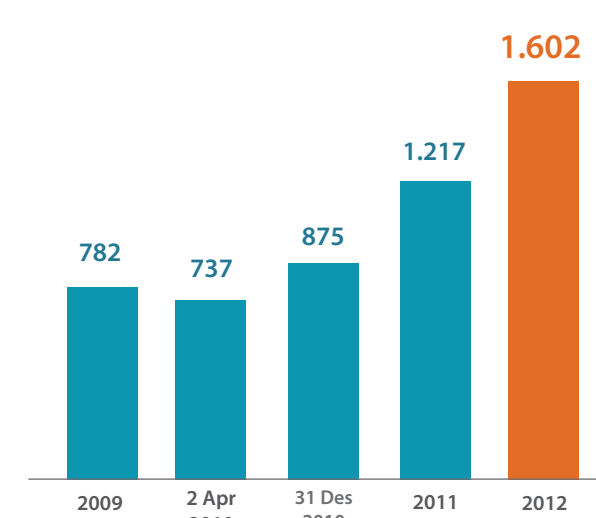
	2012	2011	2010	31 Des 2010 (**)	2 April 2010 (*)
NERACA					
<i>*(dalam miliar rupiah)</i>					
Total Aktiva	1.602,2	1.217,1	874,6	874,6	737,5
Total Aktiva Produktif	1.523,6	1.151,2	826,3	826,3	601,9
Giro Pada Bank Indonesia	58,8	39,9	26,0	26,0	116,7
FASBIS	258,0	237,8	151,6	151,6	-
Kredit Konvensional - Gross	-	-	15,9	15,9	361,3
Pembiayaan Syariah - Gross	1.007,7	680,9	417,1	417,1	-
Surat-surat Berharga	206,9	227,6	241,2	241,2	240,2
Dana Pihak Ketiga	1.261,8	864,1	556,8	556,8	428,5
Giro	143,2	106,1	82,6	82,6	54,5
Tabungan	133,0	80,3	56,3	56,3	50,1
Deposito	985,5	677,7	417,9	417,9	324,0
Pinjaman yang Diterima	0,1	0,5	0,9	0,9	-
Ekuitas	304,4	311,4	302,9	302,9	296,8
LABA/RUGI					
<i>*(dalam miliar rupiah)</i>					
Pendapatan Bagi Hasil Bersih	64,7	57,0	28,5	28,5	-
Pendapatan Bunga Bersih	-	-	19,9	7,2	12,7
Pendapatan Bagi Hasil dan Bunga Bersih	64,7	57,0	48,4	35,7	12,7
Pendapatan Operasional Lainnya	7,5	4,1	1,6	1,2	0,4
Beban Operasional Lainnya	59,6	48,8	39,9	30,3	9,6
Penyisihan Penghapusan Aktiva Lainnya	1,5	3,3	1,3	0,4	0,9
Laba Operasional	11,0	9,0	8,8	6,2	2,7
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11,0	9,0	9,0	6,3	2,7
Laba Bersih	8,4	6,8	5,5	3,7	1,8
RASIO KEUANGAN					
ROA	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	1,4%
ROE	2,8%	2,3%	1,9%	1,7%	2,6%
Net Core Operating Margin (NCOM)	9,6%	11,3%	9,5%	9,5%	7,7%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	31,5%	45,9%	76,4%	76,4%	69,9%
Rasio Kredit/ Pembiayaan terhadap DPK (LDR/FDR)	79,9%	78,8%	77,9%	77,9%	84,2%
Rasio NPL/NPF terhadap Total Kredit/ Pembiayaan - Gross	0,1%	0,2%	1,2%	1,2%	2,2%

*) Untuk periode konvensional, 3 bulan 2 hari yang berakhir pada 2 April 2010

**) Untuk periode Syariah, 8 bulan 28 hari yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

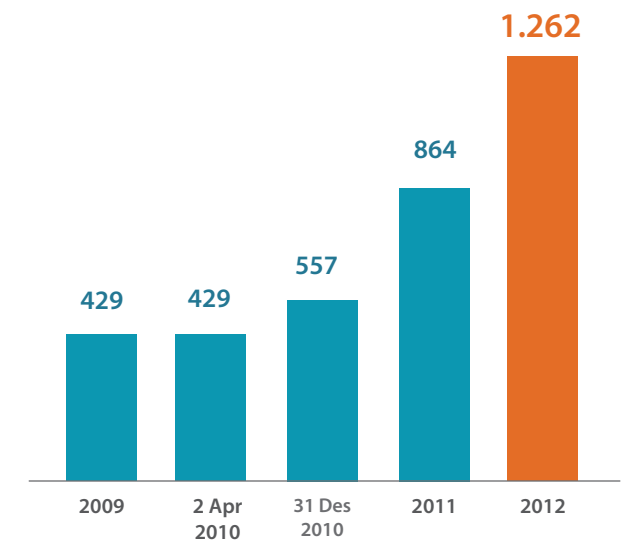
TOTAL AKTIVA

(dalam miliar Rupiah)



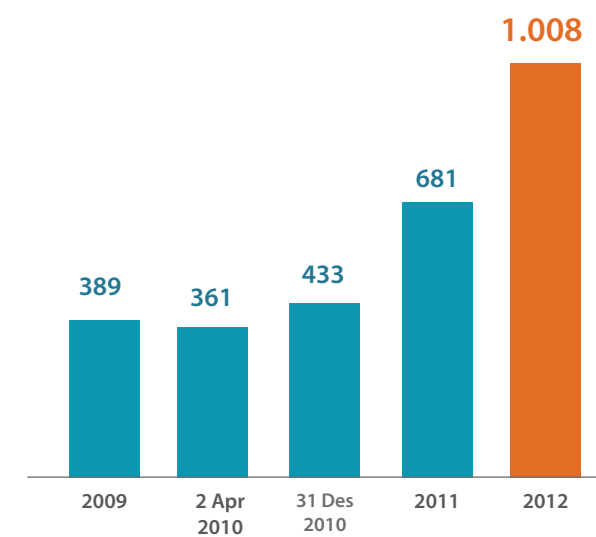
DANA PIHAK KETIGA

(dalam miliar Rupiah)



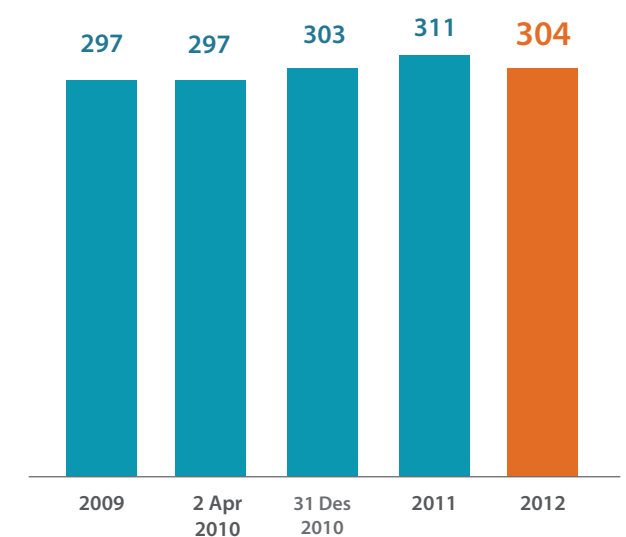
PEMBIAYAAN & KREDIT - GROSS

(dalam miliar Rupiah)



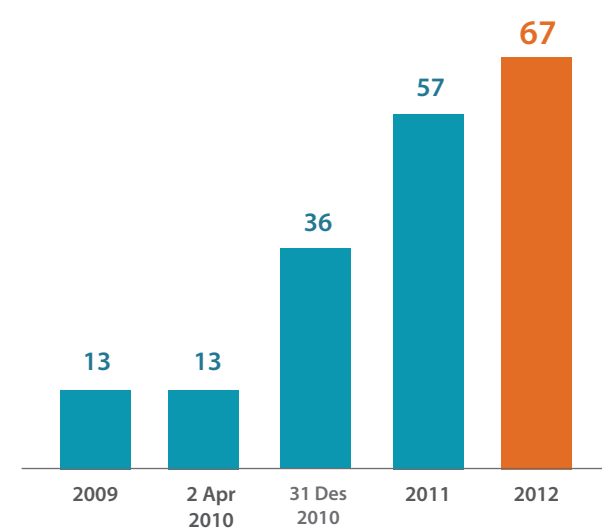
EKUITAS

(dalam miliar Rupiah)



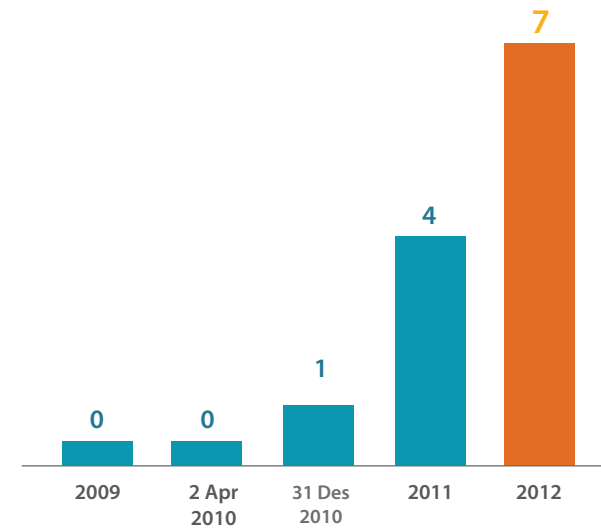
PENDAPATAN BAGI HASIL DAN BUNGA BERSIH

(dalam miliar rupiah)



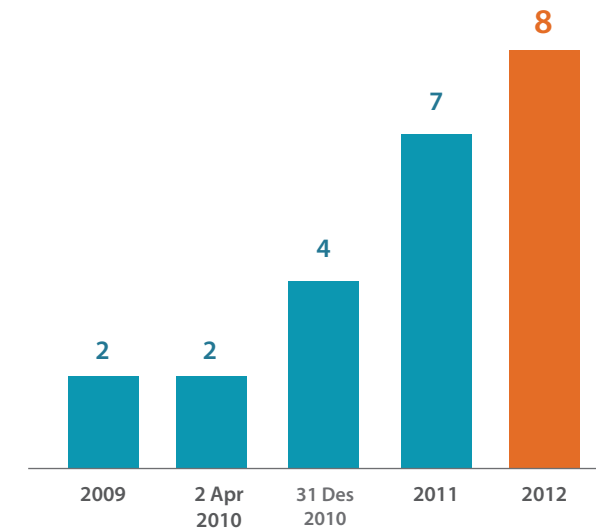
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

(dalam miliar rupiah)



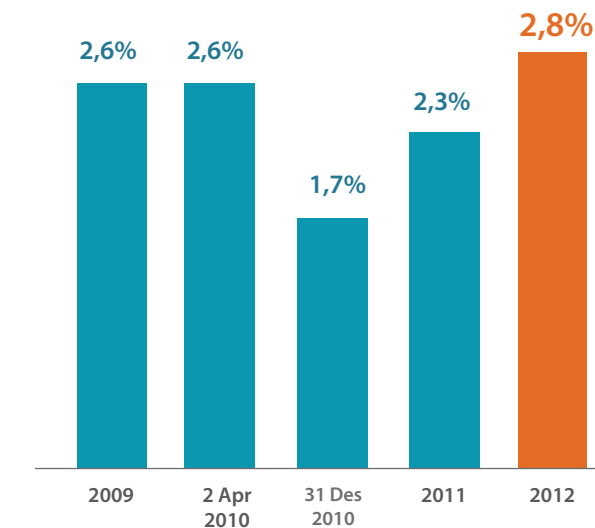
LABA BERSIH

(dalam miliar rupiah)



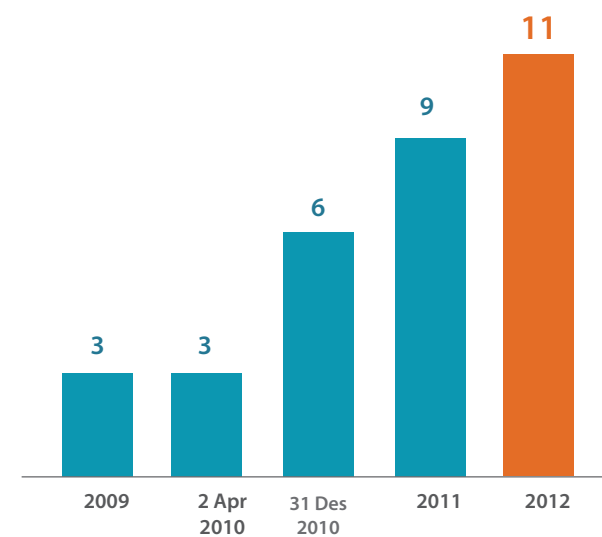
ROE

(%)



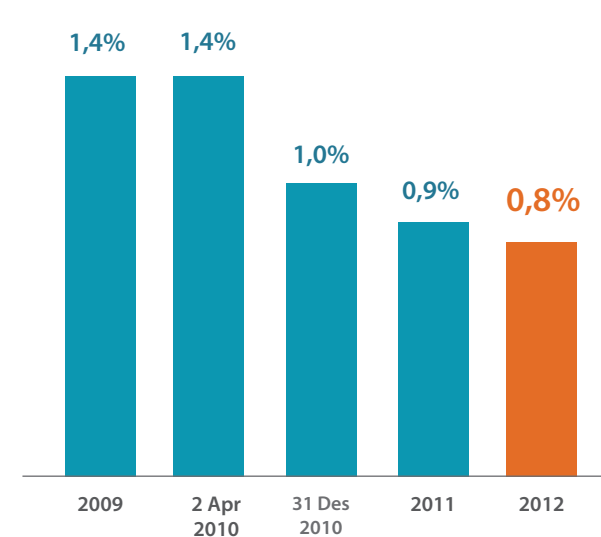
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(dalam miliar Rupiah)



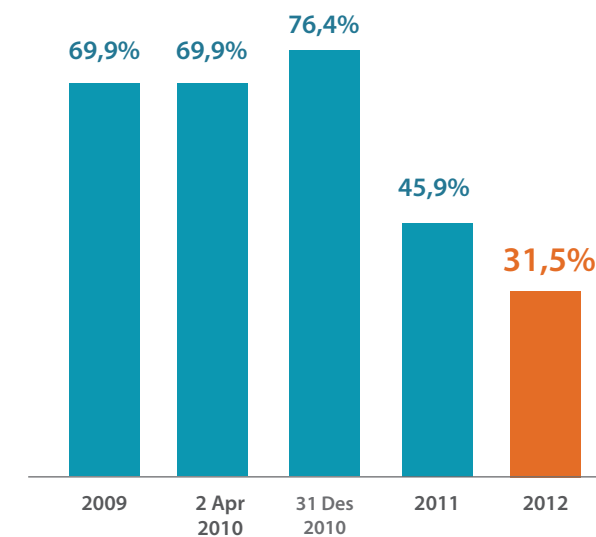
ROA

(%)



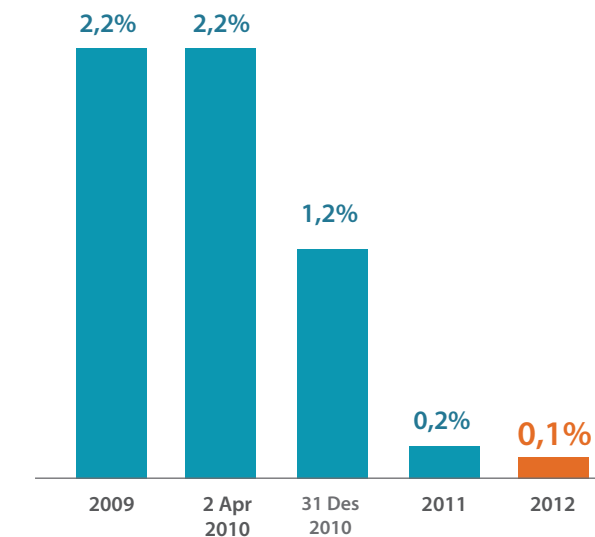
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

(%)



RASIO NPL/NPF TERHADAP TOTAL KREDIT/ PEMBIAYAAN - GROSS

(%)



LAPORAN KOMISARIS UTAMA



IWAN KUSUMOBAGIO

Komisaris Utama

Bismillahirrahmanirrohlim
Assalamu'alaikum Warrohmatullahi
Wabarokatuh

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan segala aktivitas dalam rangka mencari ridho-Nya.

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat, Di tahun 2012, di usianya yang ketiga, ditengah ketidakpastian ekonomi dunia, BCA Syariah tetap mampu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan berhasil melampaui Rencana Bisnis Bank. Kami percaya bahwa dengan bermodalkan kerja keras, kerja sama dan kompetensi yang dimiliki segenap karyawan BCA Syariah, serta dengan ijin Allah SWT segala rintangan dan kesulitan yang ada dapat kita lalui dengan baik.

Dalam menjalankan strategi bisnis, Bank telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan melaksanakan tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengawasan Dewan Komisaris
Landasan dasar pengawasan yang digunakan oleh Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sudah disampaikan oleh Direksi ke Bank Indonesia.

Pengawasan Dewan Komisaris memfokuskan pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan atas kegiatan operasional yang bersifat finansial maupun non finansial, dapat kami sampaikan bahwa Direksi BCA Syariah

telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan
Secara umum kinerja BCA Syariah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan rencana bisnisnya.

1. Total Asset yang dicapai BCA Syariah pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 1,6 triliun, tumbuh 31,6% dari posisi akhir tahun 2011
2. Realisasi pembiayaan yang disalurkan sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp 1,0 triliun, tumbuh 48,0% dari posisi akhir tahun 2011
3. Pertumbuhan Dana Pihak III (DPK) tahun 2012 sebesar 46,0% menjadi Rp 1,3 triliun
4. Perolehan laba sebelum pajak berhasil dibukukan pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 11,0 miliar atau tumbuh 22,5% dibandingkan posisi akhir tahun 2011.

Good Corporate Governance dan *Risk Management*

Kunci utama keberhasilan dan kelangsungan pengembangan usaha terletak pada praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG). Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran perusahaan terus berupaya dalam membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem, dan perangkat yang ada. Secara berkala BCA Syariah melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang menyangkut 11 aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Dan sesuai hasil *self assessment* BCA Syariah terhadap pelaksanaan GCG di BCA Syariah selama periode tahun 2012 tercatat berpredikat "Baik".

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui pertemuan rutin antara Komisaris, pertemuan dengan komite sesuai bidang yang menjadi pokok bahasan, pertemuan gabungan dengan Direksi, dan juga pertemuan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2012 Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan potensi risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Sedangkan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan prinsip Syariah di dalam operasional BCA Syariah, sesuai hasil koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan konsultasi, diskusi, dan uji petik sehingga semua produk dan layanan yang dikeluarkan oleh BCA Syariah telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah melalui penerbitan opini.

Rencana di Masa yang Akan Datang
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, dan demikian juga halnya dengan kinerja perbankan syariah. Tingginya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* perbankan syariah kepada perbankan syariah membawa konsekuensi perlunya terus dilakukan peningkatan kualitas kinerja, layanan, dan pengawasan perbankan syariah agar semakin baik.

Dalam usaha menyelaraskan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris akan terus berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Konsisten untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah dan memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan prinsip-prinsip perbankan Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lainnya.

Selain itu, Dewan Komisaris juga akan terus memberikan perhatian lebih pada perumusan strategi pertumbuhan yang berkualitas dan langkah optimalisasi operasional Bank, utamanya untuk :

1. Mempertahankan dan meningkatkan bisnis yang sudah dijalankan.
2. Menambah jumlah jaringan melalui Kantor Cabang, KCP BUR dan Unit Layanan Syariah
3. Pembangunan sarana dan prasarana serta konsolidasi manajemen risiko dan infrastruktur pendukung lainnya.
4. Persiapan untuk pertumbuhan yang dinamis.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, dan semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, agar BCA Syariah semakin maju dan jaya di tahun yang akan datang, Amin.

Wabillahirraufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh



IWAN KUSUMOBAGIO
Komisaris Utama



Surja Widjaja
Komisaris Independen

Iwan Kusumobagio
Komisaris Utama

H. Suhartono
Komisaris Independen

LAPORAN DIREKTUR UTAMA



YANA ROSIANA
Direktur Utama

BCA Syariah selama tahun 2012 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan mencatat pertumbuhan di atas rata-rata industri perbankan syariah.

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain kata Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melewati tahun 2012 dengan hasil yang diharapkan. Berkat kerja keras yang dilandasi keikhlasan dalam mewujudkan harapan bersama, Alhamdulillah, target bisnis BCA Syariah tahun 2012 dapat dicapai. Hasil yang telah diperoleh selama tahun 2012 tak luput dari kondusifnya kondisi perekonomian nasional serta industri perbankan nasional meskipun kondisi makro ekonomi dunia masih belum stabil. BCA Syariah terus memperkokoh pondasi bisnis, memperluas jaringan kantor antara lain pendirian kantor Cabang Utama di Semarang dan melakukan proyek bisnis UMKM "Bina Usaha Rakyat". Hal ini sebagai bagian dari kelanjutan transformasi untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang sehingga visi dan misi perusahaan dapat dicapai.

Kondisi Makro Ekonomi dan Pertumbuhan Industri Perbankan

Masih belum pulihnya krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat sampai dengan

akhir tahun 2012 mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebesar 6,2%, turun jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 yang tercatat sebesar 6,5%. Walau demikian pertumbuhan Indonesia tercatat sebagai peringkat kedua tertinggi di dunia, dibawah China yang mencatat pertumbuhan 7,1%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi global juga berimbas kepada pertumbuhan industri perbankan di Indonesia pada tahun 2012 sehingga pertumbuhan yang terjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Total asset perbankan pada 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 17,0% atau tumbuh dari Rp 3.653 triliun menjadi Rp 4.263 triliun, lebih rendah sekitar 4,4% jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Perbankan syariah pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan total asset sebesar 34,0% atau tumbuh dari Rp 145,5 triliun menjadi Rp 195,0 triliun.

Dari sisi pendanaan, perbankan Indonesia secara keseluruhan tumbuh sebesar 16,0% pada tahun 2012 sementara itu perbankan syariah tumbuh sebesar 27,8% dari

Rp 115,4 triliun menjadi Rp 147,5 triliun. Penyaluran pembiayaan oleh Perbankan Syariah selama tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 43,6% dari Rp 102,7 triliun menjadi Rp 147,5 triliun.

Kinerja BCA Syariah

Alhamdulillah, BCA Syariah selama tahun 2012 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan mencatat pertumbuhan di atas rata-rata industri perbankan syariah. Total aset Bank tercatat sebesar Rp1,6 triliun, meningkat 31,6 % atau Rp 385 miliar dibandingkan tahun 2011, penghimpunan DPK sebesar Rp 1,3 miliar, tumbuh 46,0% atau Rp 397,7 miliar dibanding tahun 2011. Pembiayaan pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp 1,0 triliun, meningkat sebesar 48,0% atau Rp 327 miliar dibanding tahun 2011.

Dari sisi kualitas pembiayaan, NPF gross BCA Syariah pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar 0,1%, lebih baik dari tahun 2011 sebesar 0,2%. Sedangkan NPF nett stabil pada angka 0,0%.

Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor kunci dalam mendukung perkembangan usaha BCA Syariah. Pengembangan SDM difokuskan pada pemenuhan SDM pada kegiatan bisnis dan *supporting bank*, dan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dengan penetapan sasaran tersebut yang disertai dengan budaya kerja dan pelaksanaan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern maka akan mendukung BCA Syariah dalam mencapai Visi dan Misi perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable values*. Aktualisasi Tata Kelola Perusahaan sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal berupa pelaksanaan *Self-Assessment* secara berkala. *Self-Assessment* ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan pada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif lainnya. Hasil penilaian *Self-Assessment* internal BCA Syariah tahun 2012 memperoleh hasil nilai komposit sebesar 1,8 lebih baik dari tahun 2011 sebesar 1,9 dengan predikat “baik”.

Kami percaya bahwa praktek Tata Kelola Perusahaan adalah pendukung utama terciptanya pertumbuhan yang berkesinambungan di BCA Syariah, tidak hanya dengan mematuhi peraturan yang ada, namun juga didukung oleh komitmen, struktur, dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan dengan mengedepankan mekanisme *check and balances* sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ dapat dijalankan secara efektif. BCA Syariah mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan perbankan syariah sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Penyaluran Dana Zakat Nasabah

BCA Syariah senantiasa menjaga kesinambungan komitmen untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana bank berada. Selama tahun 2012, BCA Syariah telah menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain :

1. Memberikan santunan/bingkisan sembako kepada :

- a. Anak Yatim Piatu dari Yayasan An-Nurriyah (Otista, Kebon Nanas Selatan).
 - b. Anak Yatim Piatu dari Yayasan Assalafy (Otista, Kebon Nanas Utara).
 - c. Kaum dhuafa dari RW 03 Kelurahan Bali Mester.
 - d. Petugas PHL Kelurahan Bali Mester.
2. Menyerahkan hewan kurban (dalam rangka Idul Adha 2012) kepada :
 - a. Pengurus Kelurahan Bali Mester.
 - b. Panitia Kurban Mesjid Jami' Al Ihsaniyah, Jatinegara.
 3. Berpartisipasi dalam kegiatan Bakti Sosial yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk Sunatan Massal.
 4. Memberikan seperangkat komputer kepada :
 - a. Madrasah Yayasan Manarul Islam, Jl. Enggang 2, Perumnas 1, Kayuringin, Bekasi Selatan.
 - b. Pesantren Al Hidayah, Jl. Jasuari Dalam RT. 003/018, Jaka Sampurna, Bekasi Barat.
 5. Penyaluran dana zakat nasabah untuk tahun 2012 kepada :
 - a. TPA At Taqwa (Mesjid At Taqwa), Jl. Selot No. 13 RT. 04/01 Kel. Paledang, Bogor.
 - b. Panti Asuhan Yayasan Islam Media Kasih, Jl. TK Mutiara RT 01/04 Kel. Cipadu, Kec. Larangan.

Penghargaan 2012

Alhamdulillah, selama tahun 2012 BCA Syariah telah memperoleh beberapa penghargaan, adapun penghargaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Excellence Service Performance*, yang diselenggarakan oleh *Call Center Award* 2012.
2. Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2011, yang diselenggarakan oleh *Infobank Sharia Finance Awards* 2012.
3. Peringkat ke-1 *The Best Bank in Good Corporate Governance*, yang diselenggarakan oleh Anugrah Perbankan Indonesia 2012.

4. Peringkat ke-1 *The Best Bank in Risk Management*, yang diselenggarakan oleh Anugrah Perbankan Indonesia 2012.
5. Peringkat ke-1 *The Best Bank in Corporate Social Responsibility*, yang diselenggarakan oleh Anugrah Perbankan Indonesia 2012.
6. Peringkat ke-2 *The Best Bank in Corporate Communication*, yang diselenggarakan oleh Anugrah Perbankan Indonesia 2012.
7. Peringkat ke-2 *The Best Bank in Human Capital*, yang diselenggarakan oleh Anugrah Perbankan Indonesia 2012.
8. *2nd Best Brand Equity Champion of Islamic Banking*, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Brand Champion Award* 2012.
9. *3rd Best ATM*, yang diselenggarakan oleh *Banking Service Excellence Awards* 2012.
10. *3rd Best Customer Service*, diselenggarakan oleh *Banking Service Excellence Awards* 2012.
11. *3rd Best Overall Performance*, diselenggarakan oleh *Banking Service Excellence Awards* 2012.
12. *4th Place for Category Saving Account Islamic Banking*, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Banking Loyalty Award* 2012.

Strategi 2013

Menghadapi tantangan bisnis yang ada di tahun 2013 dengan adanya ketidakpastian perekonomian global serta semakin ketatnya persaingan perbankan Indonesia, BCA Syariah telah menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2013 yang selaras dengan Visi dan Misi BCA Syariah, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan *delivery channels*
 - Menambah kantor cabang utama di Jawa Barat guna memperluas jangkauan bisnis Bank.
 - Melakukan penambahan Unit Layanan Syariah sebagai strategi Bank dalam meningkatkan dana pihak ketiga.
 - Melakukan relokasi cabang dengan

mempertimbangkan sisi bisnis yang ada, seperti : relokasi cabang Dharmawangsa Surabaya.

- Melakukan pengembangan di bidang Informasi dan Teknologi dengan melakukan *review* terhadap *core banking system*, membuat aplikasi-aplikasi penunjang *core banking system* guna mendukung proses bisnis dan penambahan fitur transaksi bagi nasabah Bank dengan membangun *electronic channel*.
- 2. Strategi pengembangan bisnis baru
 - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses, kebijakan, fitur produk serta strategi terhadap *pilot project* bisnis pembiayaan UMKM.
 - Mengimplementasikan produk murabahah emas melalui berbagai *alternative channel*.
- 3. Meningkatkan sinergi dengan PT Bank BCA, Tbk dalam beberapa hal, antara lain :
 - Meningkatkan kerjasama dalam bidang penggunaan fasilitas BCA *Contact Centre* (Halo BCA) diantaranya dengan informasi produk baru dan inisiatif baru bisnis lainnya.
 - Meningkatkan sinergi dalam *Compliance & Risk Management*, Audit dan pengembangan SDM.
- 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia, infrastruktur serta sarana penunjang lainnya.
- 5. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan menerapkan manajemen risiko yang *prudent* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pertumbuhan BCA Syariah yang berkesinambungan dengan prinsip kehati-hatian maka di dalam implementasinya BCA Syariah menitikberatkan pada hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Memastikan berjalannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi azas : Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran;

2. Memastikan berjalannya Manajemen Risiko;
3. Memastikan berjalannya prinsip Mengenal Nasabah (APU & PPT) sesuai dengan ketentuan Perbankan, Peraturan Pemerintah, dan Prinsip Syariah;
4. Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras dengan kebutuhan dunia jasa Perbankan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan yang terjamin.

Apresiasi

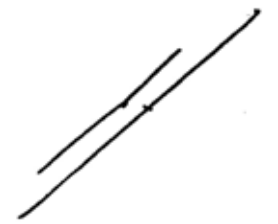
Akhirnya perkenankan saya atas nama Direksi BCA Syariah menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada segenap nasabah, karyawan, pemegang saham, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberadaan BCA Syariah.

Dengan semangat, komitmen dan kerja sama manajemen, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka Insya Allah BCA Syariah dapat terus berkiprah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita bersama untuk membangun BCA Syariah yang berkualitas dan menjadikan BCA Syariah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

Wabillahirraufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



YANA ROSIANA
Direktur Utama



Tantri Indrawati
Direktur Kepatuhan

John Kosasih
Direktur

Yana Rosiana
Direktur Utama

LAPORAN KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmanirrohlim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan nikmat-Nya sehingga BCA Syariah memasuki tahun ke 3 dalam operasinya. Banyak kemajuan dan perkembangan yang positif yang berhasil dicapai. Berdasarkan Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2012, dapat dilihat beberapa indikator yang menunjukkan adanya pertumbuhan diantaranya jumlah Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) yang meningkat, terjadinya pertumbuhan *asset* yang signifikan, dan berkembangnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerjasama dari seluruh pihak di BCA Syariah dan kemudian ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja BCA Syariah. Amanah yang diberikan oleh masyarakat dan nasabah, sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Untuk memperkuat dan mempertahankan agar amanah dapat dijalankan dengan baik, terutama kaitannya dengan pelaksanaan

dan penerapan Prinsip Syariah di dalam setiap kegiatan operasional BCA Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengawasi dan memastikan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di dalam kegiatannya.

Di dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan, dalam rangka tetap menjaga, memenuhi, dan mematuhi pelaksanaan Prinsip Syariah di dalam kegiatan operasional perbankan BCA Syariah, DPS menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Lebih lanjut diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, secara konsisten tetap terjaga.

Pada akhirnya kami berharap dan berdoa, semoga usaha untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas, akan selalu mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT.

Wabillahir-taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, M. A.
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengawasi dan memastikan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di dalam kegiatan operasional BCA Syariah.

2

TINJAUAN BISNIS



TINJAUAN BISNIS



Pendirian BUR BCA Syariah menandai langkah awal ekspansi bisnis BCA Syariah di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terbukti tangguh terhadap goncangan perekonomian global sehingga banyak pelaku perbankan mulai melirik sektor ini. BCA Syariah turut berpartisipasi pada sektor bisnis ini dengan memberikan kemudahan akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan UMKM.

Pada semester pertama tahun 2012 BCA Syariah meresmikan 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang dinamai Bina Usaha Rakyat (BUR). Hal ini sesuai dengan salah satu misi BCA Syariah yaitu “membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi

nasabah perorangan, mikro, kecil dan menengah.” Pendirian BUR BCA Syariah ini menandai langkah awal ekspansi bisnis BCA Syariah di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya di wilayah Jabodetabek.

BUR merupakan upaya membantu pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan UMKM. Melalui kantor cabang BUR tersebut, BCA Syariah berkomitmen untuk melayani segmen mikro, kecil dan menengah dengan menawarkan akses pembiayaan yang dikemas dalam pola kemitraan secara terpadu antara bank dengan nasabah. Kehadiran BUR diharapkan akan turut membantu mengurai permasalahan dan tantangan yang

dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam menjalankan usahanya melalui wujud produk dan layanan keuangan. Di antaranya adalah akses pendanaan untuk mengembangkan roda bisnisnya serta akses pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaannya.

Produk-produk BUR BCA Syariah menawarkan beragam keunggulan untuk calon nasabah yang menjadi target pemasarannya. Di antaranya, pengenaan marjin pembiayaan yang wajar dan lebih terjangkau, membebaskan biaya provisi, biaya administrasi yang rendah dan *flat* untuk berapapun nominal pembiayaan dan membebaskan penalti atas pelunasan dipercepat. Hadirnya produk pembiayaan mikro menunjukkan komitmen BCA Syariah untuk menjadi mitra yang setia mendampingi nasabah untuk bersama-sama mencapai pertumbuhan yang berkualitas.

Selain BUR, penguatan jaringan cabang BCA Syariah dilakukan dengan pembukaan Kantor Cabang Semarang pada semester kedua tahun 2012. Setelah 2 tahun mengembangkan jaringan di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, kini BCA Syariah mulai merambah pasar Jawa Tengah. Pemilihan kota Semarang untuk mewujudkan rencana strategis BCA Syariah didasari dengan beberapa pertimbangan, antara lain potensi pasar syariah di kota Semarang dan sekitarnya, serta kebutuhan nasabah BCA atas layanan dan produk syariah agar dapat terlayani dengan baik.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

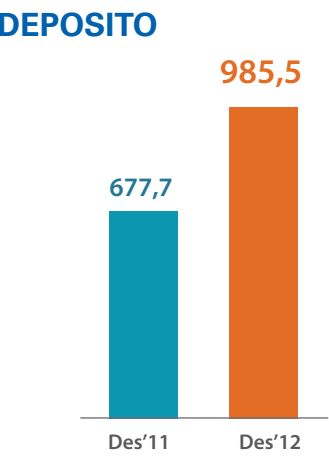
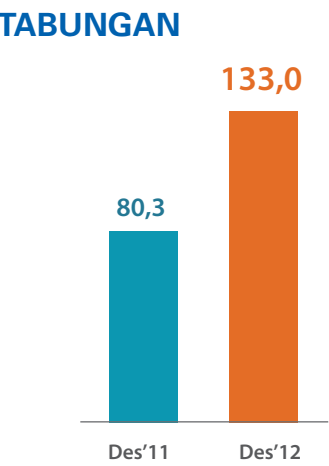
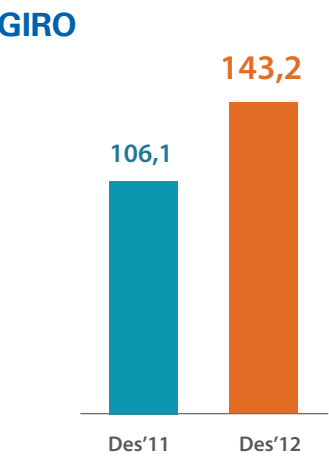
Ekspansi bisnis BCA Syariah tentunya perlu didukung dengan pendanaan yang optimal. Pertumbuhan DPK selama tahun 2012 tercatat pada angka 46,0% dari Rp 864 miliar menjadi Rp 1,3 triliun pada akhir Desember 2012. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK rata-rata industri perbankan syariah yaitu 32,0%.

Peningkatan terbesar terjadi pada produk tabungan yang tumbuh 65,6% dari Rp 80,3 miliar menjadi Rp 133 miliar pada akhir tahun 2012. Peningkatan *outstanding* dana juga terjadi pada produk deposito dari Rp 677,7 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 985,5 miliar pada tahun 2012 atau tumbuh sebesar 45,4%. Pertumbuhan yang cukup signifikan pada produk tabungan turut didukung dengan diluncurkannya produk baru yaitu Tahapan Rencana iB pada semester kedua tahun 2012.

Pada semester kedua tahun 2012, BCA Syariah meluncurkan produk baru yaitu Tahapan Rencana iB. Tahapan Rencana iB merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah untuk membantu perencanaan keuangan nasabah. Produk ini menawarkan bagi hasil yang menarik serta fleksibilitas dimana nasabah bebas menentukan jangka waktu tabungan dan jumlah setoran bulanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah antara lain kebutuhan pendidikan, perjalanan ibadah maupun liburan.

Jumlah Jaringan Cabang (Unit)	Des 2011	Des 2012
Kantor Cabang (KC)	5	6
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	3	3
Kantor Cabang Pembantu Bina Usaha Rakyat (KCP BUR)	-	3
Kantor Kas / Unit Layanan Syariah (ULS)		
TOTAL	17	18

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Produk (dalam miliar Rupiah)



Peluncuran produk tabungan baru serta adanya program promosi turut berperan dalam peningkatan komposisi dana giro dan tabungan (CASA) terhadap keseluruhan total DPK. Dana CASA, baik dari *outstanding* maupun *number of account* menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan deposito. *Outstanding* CASA tumbuh pada tingkat 48% sementara produk deposito tumbuh pada tingkat 45%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh BCA Syariah untuk memperbaiki komposisi CASA terhadap Dana Pihak Ketiga.

Pertumbuhan *Outstanding* Dana Pihak Ketiga (dalam miliar Rupiah)

	Des 2011	Des 2011	2011- 2012▲
CASA	186,4	276,2	48,0%
Deposito	677,7	985,5	45,0%
TOTAL	864,1	1.261,7	

Pertumbuhan Jumlah *Account* Dana Pihak Ketiga (dalam *account*)

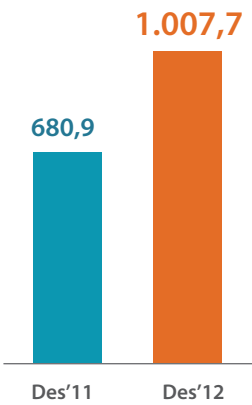
	Des 2011	Des 2011	2011- 2012▲
CASA	17.646	27.188	54,0%
Deposito	1.376	1.852	35,0%
TOTAL	19.022	29.040	

Dilihat dari sisi *number of accounts* (NOA), produk CASA juga tumbuh lebih cepat dibandingkan deposito. Jika pada tahun 2011 jumlah *account* CASA adalah sebanyak 17.646 *account* maka pada tahun 2012 meningkat menjadi 27.188 *account* atau tumbuh sebesar 54,0%. Angka ini lebih *tinggi* dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah *account* deposito yang meningkat sebesar 35,0% dari 1.376 *account* menjadi 1.852 *account* pada tahun 2012.

Penyaluran Pembiayaan

Portofolio pembiayaan BCA Syariah kian membaik setiap tahunnya. Jika pada tahun 2011 pembiayaan BCA Syariah berada pada angka Rp 680,9 miliar maka pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1,0 triliun atau tumbuh sebesar 47,9%. Pertumbuhan pembiayaan yang berhasil dibukukan BCA Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah yang tumbuh sebesar 40,0%.

Pertumbuhan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)



Pertumbuhan yang berkualitas terus dijaga dengan mengedepankan konsep kemitraan antara Bank dengan nasabah. BCA Syariah menyalurkan pembiayaan kepada beberapa segmen yaitu mikro & kecil, menengah, konsumen dan komersil. Peningkatan paling signifikan terjadi pada segmen pembiayaan UMKM yaitu dari Rp 32,6 miliar pada tahun 2011 tumbuh 147,2% menjadi Rp 80,6 miliar pada tahun 2012. Hal ini merupakan langkah awal dari komitmen BCA Syariah untuk turut memajukan sektor UMKM.

Pembiayaan BCA Syariah disalurkan kepada beberapa sektor ekonomi di antaranya pertanian, jasa transportasi, manufaktur dan *trading*. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan menerapkan prinsip *prudential banking* sehingga kualitas pembiayaan dapat terus dijaga. Hal ini terbukti dari rasio NPF *gross* yang sangat rendah yaitu 0,1 % per Desember 2012 serta diperolehnya penghargaan dari Karim *Business Consulting* atas kinerja selama tahun 2012 sebagai *The Most Prudent Full Fledge Bank* pada ajang *Islamic Finance Award and Cup 2013*.

Portofolio Pembiayaan Berdasarkan Segmen (dalam miliar Rupiah)

Segmen Pembiayaan	Des 2011	Des 2012
Mikro & Kecil	32,6	80,6
Menengah	25,9	12,5
Konsumer	123,7	61,1
Komersil	498,7	853,5
TOTAL	680,9	1.007,7

Pencapaian portofolio pembiayaan yang berkualitas tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia di cabang-cabang BCA Syariah sebagai ujung tombak perusahaan yang mampu menjalin kemitraan dengan nasabah yang berkualitas dan memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Di samping itu penerapan manajemen risiko yang dikelola dengan baik juga memegang peranan penting atas tercapainya kualitas aktiva BCA Syariah terjaga baik dari tahun ke tahun.

Prestasi BCA Syariah

Kerja keras BCA Syariah dalam memberikan produk dan layanan prima telah membuahkan beberapa prestasi yang diakui oleh berbagai pihak. Hal ini juga merupakan hasil dari kemitraan yang dibina dengan baik antara Bank dengan nasabah maupun antara manajemen dengan karyawan BCA Syariah. Selama tahun 2012, tidak sedikit prestasi maupun penghargaan yang telah diperoleh yaitu :



Excellence Service Performance - Call Center Award 2012



Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2011 - Infobank Sharia Finance Awards 2012



Peringkat Ke-1
The Best Bank in Good Corporate Governance - Anugerah Perbankan Indonesia 2012



Peringkat Ke-1
The Best Bank in Risk Management - Anugerah Perbankan Indonesia 2012



Peringkat Ke-1
The Best Bank in Corporate Social Responsibility - Anugerah Perbankan Indonesia 2012



Peringkat Ke-2
The Best Bank in Corporate Communication - Anugerah Perbankan Indonesia 2012



Peringkat Ke-2
The Best Bank in Human Capital - Anugerah Perbankan Indonesia 2012



2nd Best Brand Equity Champion of Islamic Banking - Indonesia Brand Champion Award 2012



3rd Best ATM - Banking Service Excellence Awards 2012



3rd Best Customer Service - Banking Service Excellence Award 2012



3rd Best Overall Performance - Banking Service Excellence Awards 2012



4th Place For Category Saving Account Islamic Banking - Indonesian Banking Loyalty Award 2012

Penghargaan-penghargaan yang telah diraih merupakan apresiasi namun sekaligus merupakan tantangan bagi BCA Syariah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas *performance* yang telah ditunjukkan agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan para *stakeholders*.

Melangkah ke Depan

Untuk dapat melayani kebutuhan Nasabah yang semakin kompleks dan luas, BCA Syariah akan terus memperluas jaringan dengan melakukan pembukaan cabang khususnya Unit Layanan Syariah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Dalam berpartisipasi untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), BCA Syariah membangun jaringan KCP BUR agar akses masyarakat terhadap pembiayaan UMKM semakin terbuka dan kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, selain fokus pada segmen UMKM, BCA Syariah juga akan masuk ke segmen konsumen. Hal ini sesuai dengan rencana strategis BCA Syariah untuk memberikan produk-produk unggulan kepada nasabah individu. Beberapa

produk yang akan dihadirkan pada tahun mendatang adalah pembiayaan emas serta pembiayaan KPR yang dipadu dengan strategi pemasaran melalui kerjasama dengan *channel* seperti perusahaan pengembang perumahan maupun *property agent*.

Pembiayaan kepada segmen komersil yang saat ini memegang portofolio terbesar dari pembiayaan BCA Syariah juga akan tetap menjadi fokus di masa mendatang. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah inti akan semakin dioptimalkan diantaranya dengan mendorong nasabah untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Bank dan memberikan tambahan fasilitas untuk mendukung pengembangan usaha debitur dengan tetap memperhatikan prinsip *prudent banking*. Strategi lainnya yaitu memanfaatkan *value chain* nasabah dengan memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan *supplier* dari nasabah inti. Hal ini selain dapat meningkatkan loyalitas nasabah inti kepada Bank juga turut membantu pemasaran produk pembiayaan dan mewujudkan budaya kemitraan yang kuat antara Bank dengan nasabah.

Dari sisi pendanaan, penyediaan fasilitas transaksi dan pembayaran menjadi hal yang mutlak diperlukan agar nasabah BCA Syariah semakin nyaman bertransaksi bersama BCA Syariah. Fasilitas *electronic banking* akan hadir untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Strategi pemasaran yang jitu akan menjadi kunci sukses dalam memasarkan produk BCA Syariah. Dengan menjalin kemitraan dan kerjasama pemasaran bersama perusahaan-perusahaan Group BCA, diharapkan produk-produk unggulan BCA Syariah akan lebih mudah diterima bagi nasabah yang telah menantikan produk syariah yang dapat diandalkan.

- MANAJEMEN RISIKO
- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- TEKNOLOGI INFORMASI

3

PENDUKUNG BISNIS



MANAJEMEN RISIKO



Penerapan Manajemen Risiko Secara Komprehensif dan Terintegrasi untuk Mengelola Potensi-potensi Risiko dalam Bisnis Bank

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, penerapan manajemen risiko di BCA Syariah perlu dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian.

BCA Syariah dalam melakukan pengembangan manajemen risiko berupaya untuk selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko bank didasarkan atas prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) yang jelas, yaitu pemisahan antara unit kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit kerja manajemen risiko (*risk management unit*). Seluruh unit kerja tersebut masing-masing mempunyai andil dalam penerapan manajemen risiko di bank, namun demikian terdapat komite/unit kerja/fungsi yang dibentuk khusus dalam rangka penerapan manajemen risiko, yaitu :

1. **Komite Manajemen Risiko (KMR)**, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank. Keanggotaan KMR terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek manajemen risiko.
2. **Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)**, dibentuk untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan sesuai prinsip syariah. Keanggotaan KKP terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek kebijakan pembiayaan.
3. **Asset Liability Committee (ALCO)**, dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA), terutama dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk serta menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. Keanggotaan ALCO terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.

4. **Komite Pemantau Risiko**, dibentuk untuk memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KMR dan Departemen Manajemen Risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen, pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

5. **Departemen Manajemen Risiko** dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat dikenali, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai. Tanggung jawab utama untuk mengelola risiko yang timbul dari suatu kegiatan bisnis dalam bank terletak pada unit kerja yang melaksanakan kegiatan bisnis tersebut.

Jenis-Jenis Risiko

BCA Syariah saat ini mengelola 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan untuk 2 (dua) risiko tambahan yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi belum wajib untuk diperhitungkan dalam penilaian risiko Bank di tahun 2012.

Risiko Kredit dikelola oleh bank dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risikoyangdapatditerima(*risktolerance/riskappetite*) dan telah dilakukan pengukuran dan pemantauan sejak tahap awal yaitu penerimaan permohonan dari nasabah, proses analisa pembiayaan sampai dengan proses *monitoring* pembiayaan setelah

dilakukan pencairan. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi kemungkinan timbulnya kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan bank, sehingga memerlukan komitmen semua pihak dari level manajemen tertinggi hingga *officer* pembiayaan sampai dengan *staff* operasional yang berada pada jajaran terdepan dalam mengelola risiko.

Risiko Likuiditas dikelola antara lain melalui analisa arus kas, memantau *maturity gap* antara posisi aktiva dan pasiva, dan analisa depositan inti serta melakukan *stress testing* dalam rangka menjaga kemampuan likuiditas bank. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan utama dari penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yaitu untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Risiko Pasar di BCA Syariah belum memiliki eksposur risiko yang signifikan, karena BCA Syariah belum menjadi bank devisa, sehingga belum terkait dengan aktivitas mata uang asing. Perilaku nasabah Bank BCA Syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat imbal hasil yang diperoleh, meskipun Bank tidak menggunakan suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, namun dalam penentuan tingkat imbal hasil Bank juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- *Direct Competitor Market Rate* (DCMR) yaitu tingkat imbalan (return) yang diberikan oleh bank-bank syariah lainnya;
- *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat bunga dari bank-bank konvensional
- *Expected Competitive return for Investor* (ECRI) yaitu tingkat hasil yang diharapkan oleh *investor*.

Hal tersebut dilakukan karena target nasabah Bank BCA Syariah tidak hanya terbatas pada nasabah-nasabah yang loyal terhadap syariah namun juga nasabah-nasabah rasional yang masih membutuhkan bagi hasil yang kompetitif.

Risiko Operasional bank juga dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jaringan kantor yang disamping mengakibatkan meningkatnya volume transaksi yang ada, juga berdampak pada peningkatan kompleksitas operasional Bank karena yang timbul dari pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Namun untuk mengantisipasi potensi tersebut bank melakukan pengelolaan terhadap risiko operasional yang mungkin terjadi, salah satunya melalui implementasi metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) di seluruh unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Dengan metode RCSA, unit kerja Cabang dan Kantor Pusat melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada unit kerjanya. Berdasarkan proses tersebut, unit kerja akan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya risiko. Di samping itu juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di unit kerja operasional mengenai *risk awareness* dan pengenalan manajemen risiko operasional. BCA Syariah juga telah melakukan penyempurnaan terhadap *Standar Operating Procedure* (SOP) yang digunakan oleh unit kerja operasional dan melakukan proses *review* terhadap temuan-temuan dari audit internal dan audit eksternal untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap mekanisme kerja. Dalam hal peluncuran produk baru, unit kerja Manajemen Risiko melakukan risk assessment dengan menyesuaikan *risk appetite* dan *risk tolerance* bank.

Risiko Kepatuhan dapat terjadi akibat bank tidak mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ketidapatuhan bank pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Fatwa MUI-DSN dapat berdampak pada reputasi bank. Untuk itu BCA Syariah berkomitmen penuh untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meminimalkan potensi risiko kepatuhan, BCA Syariah telah menunjuk salahsatu anggota direksi sebagai Direktur

Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Departemen Kepatuhan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penadanaan Terorisme (APU dan PPT) di BCA Syariah. Terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Direktur Kepatuhan telah melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan telah dilaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Unit Kerja Kepatuhan melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan aktivitas baru, usulan kebijakan dan prosedur internal, kajian terhadap permohonan pembiayaan dan secara berkala melakukan sosialisasi mengenai ketentuan perundang-undangan yang baru kepada seluruh karyawan BCA Syariah. BCA Syariah juga berkomitmen untuk mematuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan penerapan kebijakan *Customer Due Deligent* (CDD) untuk memitigasi risiko penyalahgunaan rekening nasabah di BCA Syariah.

Risiko Reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif mengenai BCA Syariah. Untuk melindungi dari pemberitaan dan persepsi negatif, BCA Syariah secara rutin memantau berita yang berhubungan dengan BCA Syariah diberbagai media massa. Selain itu, BCA Syariah juga melakukan kerjasama dengan BCA sebagai induk perusahaan, dalam menangani keluhan yang masuk atas produk dan layanan bank melalui sarana layanan *Call Center* Halo BCA. Penggunaan sarana layanan ini terbukti secara efektif dapat meningkatkan kemampuan BCA Syariah dalam memonitor keluhan dari nasabah secara profesional sehingga meminimalkan potensi risiko reputasi. Bank juga menyusun *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam menangani keluhan nasabah di unit kerja operasional agar

service level penanganan keluhan sebagaimana yang telah ditetapkan senantiasa dapat terjaga dengan baik.

Risiko Strategik mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategik mewajibkan BCA Syariah untuk melakukan identifikasi, mengukur dan memitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang kurang efektif serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. BCA Syariah melakukan pemantauan terhadap pencapaian anggaran dibandingkan dengan target atau rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, baik untuk target jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan melakukan *monitoring* terhadap *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Bisnis dan Unit Support lainnya agar fokus terhadap pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan. Bank juga senantiasa melakukan kaji ulang terhadap target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal.

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan. Risiko hukum dikelola dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan BCA Syariah dari segi hukum. Pengelolaan risiko hukum di BCA Syariah dilakukan oleh Unit kerja Hukum di bawah Satuan Kerja Hukum dan SDM, yang juga berperan dalam pengembangan dan pemantauan mengenai standarisasi dokumen-dokumen hukum di semua aktivitas bisnis Bank sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdedikasi Tinggi Merupakan Faktor Kunci dalam Mendukung Pertumbuhan Bisnis, Layanan dan Operasional BCA Syariah

Dalam rangka membangun institusi yang berorientasi kepada pemberian solusi dan pengembangan kemitraan dengan nasabah, BCA Syariah senantiasa berupaya mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan.

Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia berbagai upaya telah diawali dari proses perekrutan, pengembangan dan program retensi karyawan.

Perekrutan

BCA Syariah memahami perlunya perhatian yang lebih besar dalam proses rekrutmen untuk memperkuat dan mendukung kinerja lini-lini bisnis.

BCA Syariah terus menjalin kerjasama strategik dengan BCA untuk memenuhi seluruh kebutuhan *Customer Service Officer*, *Teller* dan *Back Office* melalui program Bakti BCA yang telah menyelesaikan

tahap mahir, telah memiliki pengalaman dibidangnya lebih dari 2 tahun dan mempunyai *relationship* yang baik dengan nasabah serta memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BCA Syariah.

Untuk pemenuhan sumber daya manusia lainnya BCA Syariah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas dan instansi lainnya

Di tahun 2012, BCA Syariah telah merekrut SDM sebanyak 95 orang untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bisnis dan *supporting*, dan telah dilakukan pelatihan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelatihan dan Pengembangan

BCA Syariah secara konsisten mengembangkan program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terhadap berbagai aspek bidang kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta terus menanamkan tata nilai perusahaan yaitu *Teamwork*, *Responsibility*, *Integrity* dan *Professionalism*.

Dalam rangka mengembangkan kualitas karyawan, BCA Syariah memberikan program-program pelatihan yang komprehensif dengan memperhatikan arah dan strategi bisnis perusahaan serta program pengembangan karir karyawan.

Program-program pelatihan di BCA Syariah dirancang khusus untuk mendukung pencapaian target bisnis melalui kombinasi pelatihan baik inhouse maupun eksternal terkait dengan program pembiayaan, *risk awareness*, *leadership* dan *effective internal control*.

BCA Syariah memahami pentingnya pelaksanaan pelatihan yang efektif dan efisien dengan

meluncurkan program *e-learning* melalui *website* BCA Syariah dan pelaksanaan *on the job training* yang lebih terarah dan terpadu.

Sepanjang tahun 2012, kami telah melakukan total pelatihan internal 94 kelas dengan total jumlah peserta sebanyak 571 orang dengan total waktu pelatihan 260 hari. Selain itu kami juga telah mengikutsertakan 251 karyawan dan jajaran pengurus dalam 99 pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh 36 penyelenggara pelatihan. Dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia, pada tahun 2012 BCA Syariah telah mengikutsertakan karyawan dan pengurus untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level 1 sampai dengan level 4 sebanyak 51 orang.

Program Untuk Mempertahankan Karyawan (Retensi Karyawan)

BCA Syariah memahami pentingnya mempertahankan SDM yang berkualitas (retensi karyawan). Salah satu program retensi karyawan yang kami canangkan adalah program pengembangan karir dengan mengelola *talent pool* yang terdiri dari karyawan-karyawan berpotensi. Unit kerja HSD bekerjasama dengan unit kerja lainnya melakukan proses identifikasi dan analisa karyawan potensi yang dilakukan melalui sistem penilaian panel. Selanjutnya sebelum karyawan-karyawan berpotensi mengisi jabatan yang lebih tinggi, dilakukan program pembinaan melalui pelatihan, penambahan tugas dan tanggung jawab dan penugasan pada jabatan yang lebih tinggi.

Dalam rangka membangun *performance driven culture organization*, BCA Syariah secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap program kesejahteraan karyawan dalam bentuk kebijakan-kebijakan baru.

BCA Syariah berusaha membangun budaya kerja berdasarkan TRIP dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman melalui berbagai kegiatan dan program antara lain :

- *Funbike* seluruh karyawan dan manajemen
- Kompetisi Olahraga dan seni (BCA Syariah *Idol*)
- Ibadah bersama

Upaya-upaya di Masa Depan

Dalam upaya mengimbangi kebutuhan bisnis kedepan, BCA Syariah akan terus melakukan perekrutan dan pelatihan para *staff*. Pada tahun 2013 perekrutan akan difokuskan untuk : Kepala Cabang, Kepala ULS, Kepala KCP BUR, AO, *Analyst* Pembiayaan dan Auditor.

Pengembangan program-program pelatihan akan terus dilakukan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan karyawan, khususnya pada aspek materi, metoda dan media yang digunakan. Metoda *delivery* pelatihan akan terus dikembangkan melalui *e-learning* yang dapat diakses oleh seluruh karyawan, sehingga dapat mempercepat sosialisasi materi secara lebih efektif dan efisien.

Lingkungan kerja yang nyaman disertai dengan program pembinaan melalui *coaching* di setiap unit kerja akan digalakkan di tahun 2013 dan diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan.



Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Manajemen

Tingkat Manajemen	2012	2011
Staf	193	181
Manager	118	120
Pejabat Eksekutif	14	14
Pengurus (Dewan Komisaris, Direksi dan DPS)	8	8

Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Manajemen	2012	2011
SD, SMP dan SMU	60	61
Diploma dan Sarjana	255	252
Pasca Sarjana	10	2



TEKNOLOGI INFORMASI



Membangun Infrastruktur Teknologi Informasi yang Andal untuk Memberikan Kemudahan bagi Nasabah dalam Melakukan Berbagai Transaksi Perbankan Saat ini dan yang akan Datang

Sebagai bank syariah yang baru beroperasi selama 2 tahun, BCA Syariah fokus melakukan pengembangan teknologi secara berkesinambungan disisi aplikasi, infrastruktur, jaringan komunikasi dan sekuriti untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dalam mempersiapkan *core banking* yang sesuai dengan *standard international best practice*, maka prioritas utama BCA Syariah adalah melengkapi

ketersediaan infrastruktur *Data Center* dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten

Kehandalan dan ketersediaan jaringan komunikasi merupakan hal yang utama untuk kenyamanan nasabah bertransaksi, oleh karena itu BCA Syariah membangun *system monitoring multi channel* antara lain cabang, ATM dan Debit selama 24 jam yang saat ini melalui Jaringan Prima, H2H BCA.

Dalam rangka mendukung bisnis, maka IT menyediakan layanan *outsourcing* RTGS kepada nasabah-nasabah PT Bank BCA, Tbk melalui BCA Syariah, dengan membangun aplikasi *pass through* yang memungkinkan setiap transaksi dapat diteruskan secara otomatis ke Bank Indonesia

Pengembangan Produk dan Bisnis

Pada tahun 2012 BCA Syariah melakukan pengembangan aplikasi dan jaringan komunikasi cabang khusus UMKM yang dioperasikan di wilayah Bekasi, Bogor dan Tangerang. Untuk menunjang hal tersebut telah dikembangkan aplikasi CRS (*Customer Recognition System*) dan Aplikasi *Encrypt/Decrypt Document* untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi.

Teknologi informasi sebagai motor penggerak bisnis harus fleksibel dan andal agar dapat mengikuti dinamika perkembangan berbagai produk. Untuk itu di tahun 2012 BCA Syariah telah mengembangkan aplikasi *Mobile Banking* yang dapat digunakan diberagam perangkat *mobile*.

Pengembangan Aplikasi Karyawan

BCA Syariah menyadari pentingnya sistem aplikasi yang andal untuk mendukung unit kerja SDM dalam menangani berbagai kebutuhan kepegawaian dengan membangun aplikasi ESS (*Employee Self Service*) dan Pinjaman Karyawan melalui *online application system* agar lebih efisien dan tepat guna.

Rencana Kedepan

BCA Syariah menyadari bahwa *core banking* merupakan *platform* inti bank. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap *core banking* agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis dimasa yang akan datang.

BCA Syariah ditahun 2013 akan meluncurkan aplikasi *mobile banking* guna memudahkan nasabah bertransaksi dimanapun, kapanpun dengan berbagai perangkat *mobile*.

Untuk menambah keberagaman produk pembiayaan, pada tahun 2013 akan diluncurkan aplikasi Pembiayaan Murabahah Emas yang dapat dilakukan secara *online*. Dalam rangka mendukung pengelolaan portfolio konsumtif dan *channeling* maka dikembangkan aplikasi yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia, BCA Syariah siap menerapkan berbagai perubahan dari regulator seperti RTGS Generasi II, Laporan LBUS dengan format XBRL, *Interface* Aplikasi GRIPS, Penggantian Kartu *Chip* dan lain-lain.



- TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
- *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BCA SYARIAH

4

TINJAUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BCA Syariah memandang bahwa generasi muda merupakan aset bangsa yang sangat berharga, oleh karena itu BCA Syariah dalam rangka menjaga kesinambungan komitmen untuk menjalankan fungsi sosial dan kepeduliannya terhadap pendidikan bagi generasi muda, maka sepanjang tahun 2012 dilaksanakan beberapa kegiatan sosial sebagai berikut :

Pemberian Santunan Kepada Anak Yatim

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemberian santunan diantaranya dalam rangka Hari Ulang Tahun BCA Syariah yang II diserahkan santunan berupa uang tunai dan peralatan sekolah kepada Anak Yatim Piatu dari Yayasan An-Nurriyah yang beralamat di Otista, Kebon Nanas Selatan.



Selain itu untuk menyambut dan memeriahkan datangnya bulan Ramadhan 1433 H, BCA Syariah juga melaksanakan :

- Pemberian santunan kepada Anak Yatim dari Yayasan Assalafy yang beralamat di Otista, Kebon Nanas Utara.



Pemberian Komputer kepada Pondok Pesantren

Kepedulian BCA Syariah terhadap dunia pendidikan khususnya pendidikan bagi anak yatim piatu dan dhuafa diimplementasikan dalam bentuk pemberian komputer kepada :

- Pesantren Al-Hidayah, Jl. Kasuari Dalam, Jaka Sampurna – Bekasi Barat
- Madrasah Yayasan Manarul Islam, Jl. Enggang 2, Perumnas 1 Kayuringin, Bekasi Selatan



BCA Syariah juga sangat memperhatikan kesejahteraan lingkungan di sekitarnya. Hal ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan untuk berbagi dengan masyarakat yang berada dilingkungan sekitar BCA Syariah, kegiatan sosial tersebut diantaranya :

Penyerahan Hewan Kurban

Sebagai bentuk kepedulian BCA Syariah terhadap lingkungan dan kaum dhuafa dalam menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2012, dilakukan penyerahan 2 ekor sapi kurban kepada :

- Pengurus Kelurahan Bali Mester.
- Pengurus Mesjid Jami' Al Ihsaniyah (Jatinegara).



Pembagian Sembako di Lingkungan Sekitar

Pemberian sembako kepada dhuafa yang berasal dari RW 03 Kelurahan Bali Mester.



Partisipasi dalam Program Bakti Sosial Bank Indonesia

BCA Syariah ikut berpartisipasi di dalam salah satu program Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 2012, yakni khitanan massal.



GOOD CORPORATE GOVERNANCE BCA SYARIAH



I. GAMBARAN UMUM

Praktek tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme. Sejak beroperasinya BCA Syariah (BCA Syariah) pada tanggal 5 April 2010, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka BCA Syariah tetap konsisten dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran

yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh jenjang organisasi dengan tetap mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan terhadap benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCA SYARIAH

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2011 perihal Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG BCA Syariah untuk tahun 2012 sebagai berikut :

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	12,5%	0,25	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dekom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	17,5%	0,35	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10,0%	0,20	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	10,0%	0,10	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk Sharia Aspect.
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,0%	0,10	Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk Sharia Aspect.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10,0%	0,20	Benturan kepentingan dapat dihindari dengan baik, mengacu kepada kebijakan intern Bank.
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5,0%	0,10	Fungsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta di lengkapi dengan kebijakan intern.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5,0 %	0,10	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5,0 %	0,05	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5,0 %	0,05	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Lap Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	15,0%	0,30	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
Nilai Komposit			100%	1,80	BAIK

Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 < Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 < Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 < Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Dari hasil *Self Assessment* tersebut diatas, nilai komposit yang diperoleh oleh BCA Syariah adalah 1,80 dengan predikat komposit tergolong Baik.

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindaklanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan nasihat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah.

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di PT Bank BCA, Tbk.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCA Syariah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern.
- f. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- g. Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.

- h. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud.
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

1.2 Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BCA Syariah, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Kusumobagio	Komisaris Utama
2.	Surja Widjaja	Komisaris Independen
3.	Suhartono	Komisaris Independen

Dari komposisi anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 66,6%. Hal ini menunjukkan jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen telah sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Aspek Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Berkaitan dengan independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di PT Bank BCA, Tbk.
- b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Komisaris Utama.

- c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah, kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di PT Bank BCA, Tbk dan memperoleh gaji dari PT Bank BCA, Tbk.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
- g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1.4 Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2012, dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain :

- a. Agar dilakukan kaji ulang terhadap rencana kerja pembukaan cabang baru di Solo terkait lokasi dengan mempertimbangkan beberapa hal pendukung seperti potensi daerah dan lainnya.
- b. Penetapan KAP (Kantor Akuntan Publik) Abubakar Usman & Rekan selaku Auditor BCA Syariah untuk tahun buku 2012, sesuai rekomendasi dari Komite Audit,

- c. Terkait Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komisaris memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
 - Dalam strategi penyusunan rencana kerja Audit Internal tahun 2013 sebaiknya diselaraskan peran audit ke arah RBA (*Risk Base Audit*).
 - Perlu prioritas penyusunan rencana kerja yang segera dilakukan (*crash program*) terutama yang berkaitan dengan besarnya tingkat risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan, misalnya mengenai masalah *prosedur override* transaksi di cabang.
 - Agar SKAI melakukan pembinaan dan sosialisasi ke cabang-cabang atas temuan di lapangan.
 - Perlu koordinasi dan komunikasi dari Komite Audit terkait penentuan materi LHA (Laporan Hasil Audit) untuk dipresentasikan ke Dewan Komisaris.
 - Untuk peningkatan kualitas auditor terkait kemahiran profesi, perlu diperhatikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh setiap auditor.
- d. Terkait dengan Laporan Profil Risiko yang disampaikan, Komisaris memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :
 - Perlu dibuatkan simulasi dalam rangka mengukur kondisi risiko dan mitigasi risiko yang ada apabila terdapat informasi negatif terhadap obligasi/surat berharga yang dimiliki oleh BCA Syariah.
 - Agar dilakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan konsentrasi debitur inti sekaligus menetapkan strategi untuk menurunkan konsentrasi grup/debitur inti yang cenderung meningkat.
- e. Terkait berlakunya PBI No.13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, maka perlu dibuat rekam pekerjaan-pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan di BCA Syariah.

2. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi BCA Syariah bertanggung jawab atas pengelolaan Bank melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan *sharia aspect*. Direksi bertanggung jawab pula atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan praktik pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik.

Direksi berhak mewakili BCA Syariah di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA Syariah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA Syariah serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

Seluruh anggota Direksi BCA Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *Fit & Proper Test* serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan

berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
- h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

- k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
- l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi
- n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

2.2 Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Yana Rosiana	Direktur Utama
2.	John Kosasih	Direktur
3.	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

2.3 Aspek Independensi dan Transparansi Direksi

Jumlah anggota Direksi di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA Syariah. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi tahun 2012, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain:

- a. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus.
- b. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada Bank dan/atau Perusahaan lain.
- d. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BCA Syariah maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- e. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya.
- f. Tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah
- g. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2012, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan DPS
Komisaris:				
1. Iwan Kusumobagio	7x		5x	6x
2. Surja Widjaja	7x		5x	4x
3. Suhartono	7x		5x	5x
Direksi :				
1.Yana Rosiana		90x	5x	
2. John Kosasih		91x	2x	
3.Tantri Indrawati		91x	4x	

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta *check and balances*.

1. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- 1.1 Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- 1.2 Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

- 1.3 Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 1.4 Mengevaluasi Risiko Kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
- 1.5 Melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan Bank Indonesia berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 1.6 Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala
- 1.7 Mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk penerapan GCG.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- 2.1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi BCA Syariah
- 2.2 Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi
- 2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan
- 2.4 Memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA Syariah telah sesuai dengan :
 - a. Kondisi keuangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah

Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- 2.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- 2.2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah
- 2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite

3. Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- 3.1 Melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Perseroan
- 3.2 Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 3.3 Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKAI serta tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, SKAI, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern
- 3.4 Melakukan diskusi minimal 3 bulan sekali dengan Satuan Kerja Audit Intern atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- 3.5 Menghadiri *exit meeting audit internal minimal* 4 (empat) cabang/Unit Kerja.
- 3.6 Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris.
- 3.7 Melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3.8 Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Surja Widjaja	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Suhartono	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota (Komisaris Independen)	-
Iwan Kusumobagio	-	Anggota (Komisaris Utama)	-
Ridwan Masui	-	-	Anggota (Independen)
Sutedjo Prihartono	Anggota (Independen)	-	Anggota (Independen)
Rio S Wisaksono	Anggota (Independen)	-	-
Endang Ruslina	-	Anggota (Ka.SKHSMD)	-

5. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan di Kantor Pusat BCA Syariah sesuai kebutuhan Bank Frekuensi rapat Komite selama periode tahun 2012 sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	Rapat Komite Audit
Surja Widjaja	-	4x	5x
Suhartono	8x	4x	-
Iwan Kusumobagio	-	4x	-
Ridwan Masui	-	-	5x
Sutedjo Prihatono	8x	-	5x
Rio S Wisaksono	8x	-	-
Endang Ruslina	-	4x	-

Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)

6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit

Sejak BCA Syariah beroperasi tanggal 5 April 2011, aktivitas Komite berjalan dan memenuhi kriteria minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan. Beberapa aktivitas penting Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2012 adalah sebagai berikut :

6.1 Komite Pemantau Risiko

Tanggal	Aktivitas
15 Februari 2012	Melakukan evaluasi terhadap : a. Penggunaan grading Parameter dalam Laporan Profil Risiko BCA Syariah dari 3 parameter (<i>Low, Moderat, High</i>) menjadi 5 parameter (<i>Low, Low to Moderat, Moderat, Moderat to High, High</i>). b. Kecukupan agunan untuk nasabah non performing. Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Limit Wewenang memutus permohonan pembiayaan yang melibatkan Dewan Komisaris. b. Wewenang dalam pembelian obligasi/surat berharga (termasuk sukuk)
15 Mei 2012	Melakukan review terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk Triwulan I 2012. b. Coverage agunan dari masing-masing nasabah pembiayaan.
20 Juni 2012	Melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertemuan DPS, mengenai: a. Pembiayaan Perusahaan <i>Multifinance</i> . b. Pengajuan tambahan fasilitas IMBT ke-2 untuk nasabah perorangan. Melakukan <i>review</i> terhadap Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi April 2012.
29 Agustus 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk Triwulan II 2012. b. Laporan hasil pelaksanaan <i>Stress Testing</i> Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas.
26 September 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi Juli 2012 b. Laporan Portofolio BCA Syariah untuk posisi Juli 2012. c. Laporan hasil Implementasi <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA).
18 Oktober 2012	Melakukan pembahasan mengenai : a. Pelaksanaan penerapan APU & PPT BCA Syariah. b. Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011. c. Kepemilikan Saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012. Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi Oktober 2012. b. Hasil proyeksi Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk 2013.
28 Oktober 2012	Melakukan pembahasan mengenai : a. Ketentuan <i>Fit and Proper Test</i> sesuai dengan PBI No. 14/6/PBI/2012. b. Mekanisme penilaian melalui wawancara dan penelitian administratif sesuai PBI No. 11/31/PBI/2009 dan PBI No. 14/6/PBI/2012.

Tanggal	Aktivitas
17 Desember 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap Laporan Profil Risiko posisi November 2012 dengan fokus pembahasan mengenai : a. Risiko Kredit, mengenai : - Konsentrasi Grup/Debitur Inti. - Sub Sektor Ekonomi Terbesar. - Pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah b. Risiko Likuiditas <i>Maturity Mismatch</i> 1 bulan. - Konsentrasi depositan inti. - Rata-rata pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi

Tanggal	Aktivitas
16 Februari 2012	Pembahasan atas laporan realisasi program kerja Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia
21 Juni 2012	Pembahasan atas kebijakan dan prosedur Alih Daya (<i>outsourcing</i>)
26 September 2012	Pembahasan atas proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah
28 November 2012	Pembahasan atas laporan <i>progress</i> pelaksanaan PKB BCA Syariah sampai dengan pertengahan bulan November 2012

6.3 Komite Audit

Tanggal	Aktivitas
18 Januari 2012	Pembahasan atas Laporan Hasil Audit (LHA) yang sudah selesai dibuat oleh SKAI serta Rencana Kerja Audit tahun 2012.
25 April 2012	Pembahasan atas penyampaian jadwal rencana pemeriksaan SKAI tahun 2012.
20 Juni 2012	Pembahasan atas laporan realisasi kerja SKAI sampai dengan bulan Mei 2012.
19 Juli 2012	Pembahasan atas penggunaan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah tahun buku 2012.
28 Nopember 2012	Pembahasan atas realisasi kerja SKAI tahun 2012 dan rencana kerja SKAI tahun 2013.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sejak beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2011, BCA Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penetapannya berdasarkan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah, dengan susunan anggota sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2.	Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, MA	Anggota

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya, sedangkan Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya.

1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS

- 1.1 Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah

- 1.2 Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- 1.3 Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- 1.4 Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- 1.5 Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 1.6 Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 1.7 Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan KAP yang melaksanakan audit terhadap BCA Syariah mengenai ketaatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank diterbitkan.
- 1.8 Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas DPS

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2012 DPS telah melakukan rapat sebanyak 19 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Aktivitas
17 Januari 2012	a. Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk tabungan Tahapan Rencana iB. b. Mengeluarkan opini/pendapat yang berkaitan dengan produk, transaksi maupun operasional, baik dari sisi dana pihak ketiga seperti tabungan Tahapan Rencana iB maupun dari sisi penyaluran dana/pembiayaan berikut fitur yang melekat di produk.
20 Maret 2012	a. Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan beberapa <i>multifinance</i> . b. Melakukan <i>review</i> terhadap akad pembiayaan Koperasi dengan <i>end user</i> yang menggunakan pola bagi hasil.
16 April 2012	Pembahasan lanjutan mengenai rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan <i>multifinance</i> .
11 Juni 2012	Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal, seperti: a. Kerjasama dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan beberapa <i>multifinance</i> . b. Kerjasama dengan koperasi non syariah dengan merujuk kepada Ta'limat DSN MUI yang memberikan batas waktu sampai 1 Juni 2012 serta akad kepada <i>end user</i> nya memenuhi ketentuan/unsur syariah.
7 Agustus 2012	a. Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal, seperti kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan kepada BMT. b. Melakukan <i>review</i> terhadap akad pembiayaan untuk jenis fasilitas Murabahah dan Musyarakah termasuk yang terkait <i>line facilities</i> .
13 Agustus 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk <i>Gold</i> BCA Syariah iB.
25 September 2012	Melakukan kegiatan untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional Bank seperti memberikan pendapat syariah atas pengakuan pendapatan Bank dari hasil penjualan agunan nasabah yang telah dilakukan hapus buku karena adanya kebijakan konversi (masa transisi 1 tahun) oleh <i>regulator</i> .
2 Oktober 2012	Merevisi dan mengesahkan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS <i>Charter</i>).
16 Oktober 2012	a. Melakukan kegiatan untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional Bank seperti memberikan pendapat syariah tentang <i>take over</i> pembiayaan sesama Bank Syariah. b. Membahas Ta'limat DSN No. U-286/MUI/VII/2012 terkait adanya nasabah koperasi yang non syariah.
31 Oktober 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari pembiayaan UMKM.
13 Nopember 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk Murabahah KPR termasuk KPR karyawan dengan akad Murabahah.
18, 27 Nopember 2012 dan 18 Desember 2012	Melakukan uji petik transaksi yang mencakup : a. Dokumen akad dan ketentuan pembiayaan Musyarakah. b. Dokumen laporan hasil usaha nasabah dari fasilitas Musyarakah. c. Transaksi perpanjangan <i>line facilities</i> Musyarakah. d. Transaksi perhitungan biaya Ta'widh produk Tahapan Rencana. e. Dokumen transaksi fasilitas Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik (IMBT). f. Dokumen transaksi fasilitas Murabahah.

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BCA Syariah menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis BCA Syariah. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan secara terus menerus terhadap sistem pengendalian yang bersifat komprehensif.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan Bank seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank. Untuk memitigasi risiko tersebut maka Bank disamping melakukan upaya secara kuratif (*ex-post*) juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*).

Direktur Kepatuhan mempunyai peran penting dalam menumbuhkan budaya kepatuhan dilingkungan BCA Syariah. Aspek kepatuhan tidak hanya terbatas pada upaya mematuhi peraturan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tetapi juga merupakan sebuah proses yang berkesinambungan agar pengambilan keputusan bisnis dan operasional BCA Syariah mencerminkan prinsip kehati-hatian. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi BCA Syariah juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan efektif.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan antara lain :

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank

- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang di BCA Syariah yang juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2012 antara lain :

- 1.1 Memastikan bahwa dalam setiap kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- 1.2 Memberikan opini kepatuhan terhadap usulan pembiayaan baru, penambahan dan restrukturisasi dengan limit di atas Rp 1 milyar. Sementara untuk pembiayaan dengan limit Rp 1 milyar kebawah, memberikan *tools* kepada Cabang untuk melakukan *self assessment* atas pembiayaan tersebut.
- 1.3 Melakukan pengkajian kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan oleh Bank.
- 1.4 Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, budaya kepatuhan, PBI dan SE BI, Pedoman APU & PPT serta peraturan perundangan terkait lainnya.
- 1.5 Melakukan *review* terhadap pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) .

- 1.6 Memastikan pelaksanaan penerapan kebijakan APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain
- 1.7 Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- 1.8 Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap profil risiko kepatuhan dan *Risk Control System* secara periodik.

Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan secara semesteran kepada Bank Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik. Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan setiap semester kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

2. Fungsi Audit Intern

BCA Syariah menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan Bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999

BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) BCA Syariah

Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Menyusun panduan audit intern.
- b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- d. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

2.2 Efektivitas Dan Cakupan Audit Intern

BCA Syariah menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi Audit Intern Bank dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari PBI No. 1/6/PBI/1999, untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Kualitas kinerja
- Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan audit.
- Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan BCA Syariah setiap tahun di audit oleh KAP sebagai Auditor Eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk KAP yang terdaftar di Bank

Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah.

3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern

Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan KAP, Bank telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank dan Akuntan Publik.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh Bank telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
 - Nama KAP.
 - Kapasitas KAP yang ditunjuk.
 - Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*).
 - Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
 - Legalitas perjanjian kerja.
 - Ruang lingkup audit.
 - Jangka waktu penyelesaian audit.
 - Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
- Ruang lingkup audit telah mencakup :
 - Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
 - Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
 - Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
 - Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai

Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.

- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 - Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan KAP.
 - Keandalan sistem pelaporan kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Abu Bakar Usman & Rekan yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdaftar di buku Direktori 2012 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP-335/KM.1/2009
- Terdaftar di Bank Indonesia dengan lisensi No 067, melalui Surat Bank Indonesia No.11/727/

DPIP/DtB tanggal 21 Agustus 2009, perihal Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank.

- KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta baik dari Jasa *General Audit, Special Audit, Compilation, Review* maupun *Approve Procedure*.

E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

- BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
- BCA Syariah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dipantau (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
- BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.
- Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan Bank serta diversifikasi portofolio.
- Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk periode 5 April 2010 – 31 Maret 2013 merujuk pada keputusan dari Pemegang Saham Mayoritas yang telah diberikan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Remunerasi	3	1.039	3	4.840	2	423,5
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	62,4	3	290,9	-	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp 2 Milyar	-	-	-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	-	3	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	3	-	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	21,3 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,6 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,0 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,1 x

2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2012 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

3. Penyimpangan Internal

Selama 2012 di BCA Syariah tidak ditemukan adanya internal *fraud* yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

4. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2012 tidak terdapat gugatan baru di bidang perdata maupun pidana yang ditujukan kepada BCA Syariah, namun terdapat gugatan Perdata yang perkaranya telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- Gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.PWK dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atas obyek sengketa (bangunan) kios yang terletak di Mall Sadang Terminal Square Lantai Dasar Nomor 9 dan 10, dimana obyek sengketa tersebut disewakan oleh PT Sadang Terminal Square kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta.
- Gugatan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.Bks., dari Azhari Abadi, atas obyek sengketa (rumah tinggal) yang terletak di Villa Galaxi Blok D5 No. 8,

Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Saat ini Pihak Penggugat telah mengajukan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2012, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan.

6. Buy Back Shares

BCA Syariah masih belum *go public* dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi Bank sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Dana untuk kegiatan sosial berasal dari dana non halal dan sumber dana lainnya yang ditujukan untuk dana kebajikan. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial, berdasarkan Laporan Keuangan hasil audit (*audited*) tahun 2012 telah disalurkan dana sebesar Rp 79.629.976.

5

TINJAUAN KEUANGAN



TINJAUAN KEUANGAN

Pembahasan Hasil Kinerja Keuangan

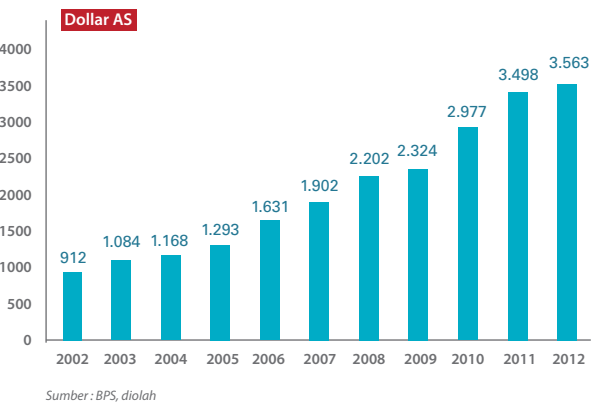
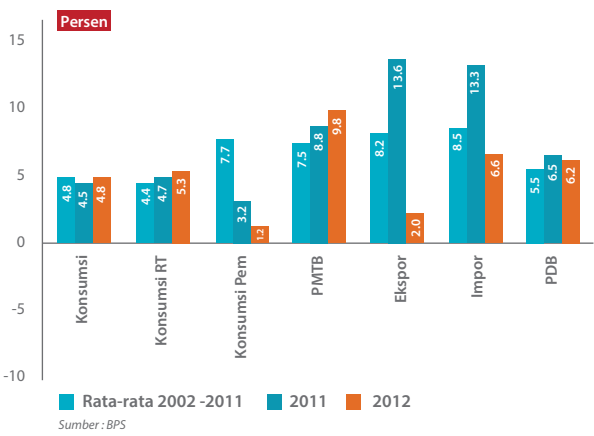
Tinjauan Ekonomi Makro Tahun 2012

Dampak krisis yang terjadi di negara-negara maju berakibat pada perekonomian secara global, termasuk perekonomian di negara-negara *emerging market*. Selama tahun 2012, ekonomi global tercatat tumbuh melambat menjadi 3,2%, lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 3,9%. Memburuknya pertumbuhan ekonomi di negara maju terutama disebabkan oleh kinerja ekonomi negara-negara di kawasan Eropa yang masih dihadapkan pada permasalahan utang, kontraksi fiskal, terbatasnya ruang kebijakan moneter, tingkat pengangguran yang meningkat tajam, rapuhnya sektor keuangan, serta merosotnya kepercayaan pasar. Seluruh problematika tersebut membentuk sebuah lingkaran permasalahan yang menyebabkan pemulihan krisis Eropa berjalan lambat. Lesunya perekonomian di negara maju mulai berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara *emerging market*. Pertumbuhan ekonomi China dan India sebagai motor penggerak perekonomian di negara *emerging market* mengalami perlambatan terutama di pertengahan tahun 2012.

Di tengah ekonomi dunia yang tumbuh melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,2%. Dalam delapan tahun terakhir,

perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup tinggi mencapai rata-rata di atas 6,0% per tahun dan merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sekaligus paling stabil di dunia. Terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh lingkungan ekonomi makro serta sistem keuangan yang kondusif dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditopang oleh kenaikan kontribusi permintaan domestik di tengah pelemahan kinerja ekspor yang terimbas oleh melemahnya permintaan eksternal. Sementara itu, kinerja impor, meskipun melambat masih tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Kuatnya permintaan domestik terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai pertumbuhan tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008/2009, didukung oleh terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen yang meningkat. Di sisi investasi, pertumbuhan yang cukup tinggi terutama didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Dari sisi Pemerintah, pertumbuhan belanja pemerintah secara riil tercatat mengalami penurunan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi domestik masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian dan sektor bangunan juga mengalami peningkatan sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik.

Asumsi Makro	2012		
	APBN	APBN-P	Realisasi*
Pertumbuhan ekonomi y.o.y (%)	6.7	6.5	6.3
Inflasi y.o.y (%)	5.3	6.8	4.3
Nilai tukar (Rp/USD)	8.800	9.000	9.384
Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan (%)	6.0	5.0	3.2
Harga minyak internasional (Dolas AS/barel)	90	105	112.7
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	950	930	861

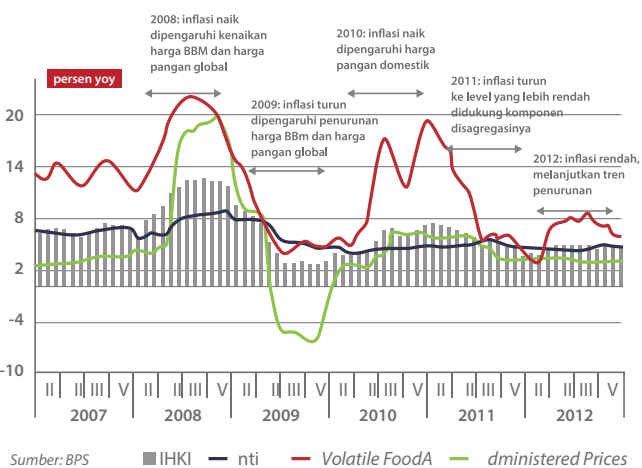
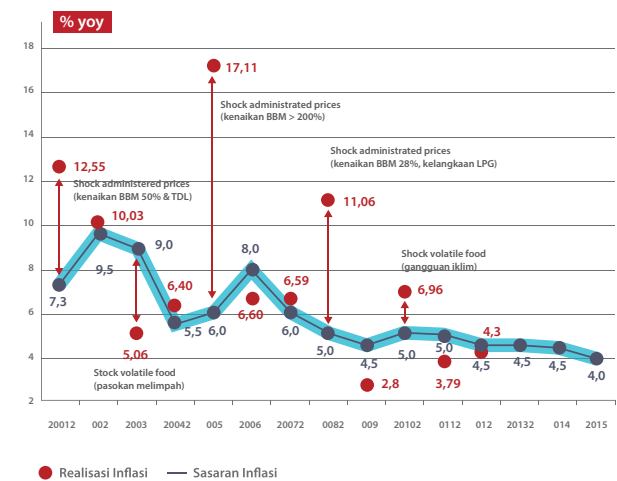


Namun, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan yang masih relatif rendah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012 masih mencatat surplus, meskipun mengalami tekanan defisit transaksi berjalan. Melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang dan merosotnya harga komoditas ekspor berdampak pada menurunnya kinerja ekspor. Di sisi lain, impor masih tumbuh cukup tinggi, terutama

dalam bentuk barang modal dan bahan baku, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Tingginya impor juga tercatat pada komoditas migas akibat melonjaknya konsumsi BBM, sehingga berdampak pada defisit neraca migas yang terus meningkat dan menambah tekanan pada defisit transaksi berjalan. Akibatnya, di sepanjang tahun 2012 transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 2,7% dari PDB. Sejalan dengan tekanan yang terjadi pada NPI, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan volatilitas yang dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Secara rata-rata, rupiah terdepresiasi sebesar 6,3% (yoy) ke level Rp 9.358 per dolar AS dari Rp 8.768 per dolar AS pada tahun sebelumnya. Tingkat volatilitas rupiah yang relatif rendah tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dalam melakukan stabilisasi nilai tukar. Tekanan depresiasi rupiah selama 2012 terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan melebarnya defisit transaksi berjalan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di pasar valuta asing dalam negeri. Namun, peningkatan arus modal asing yang cukup besar baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio dapat menahan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut.

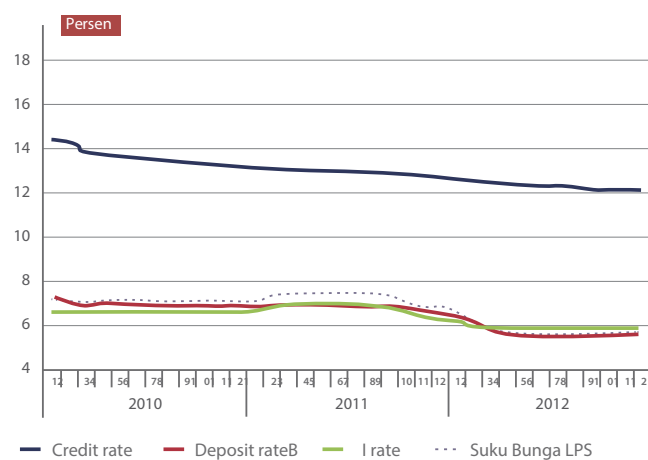
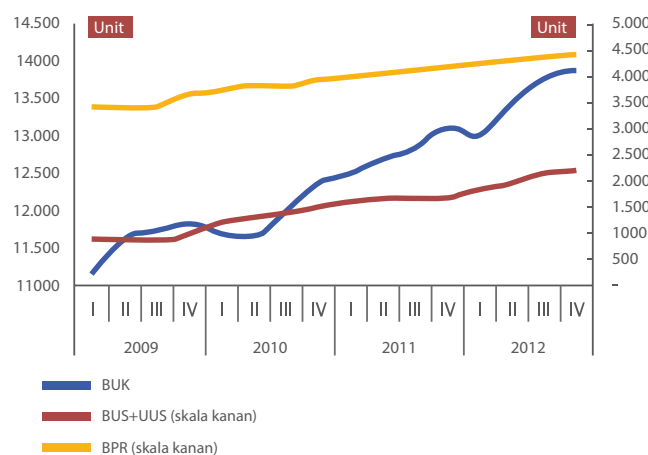
Inflasi sepanjang 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi sebesar 4,5%±1%. Inflasi pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,3% (yoy), terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi *volatile food* yang terkendali, dan inflasi *administered prices* yang rendah. Inflasi inti yang stabil didukung oleh penerapan strategi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan, harga komoditas impor, dan ekspektasi inflasi tetap terkendali. Inflasi inti tahun 2012 tercatat rendah sebesar 4,4% (yoy).



Perkembangan Perbankan Indonesia di Tahun 2012

Upaya perbankan untuk mempertahankan kinerja positif selama tahun 2012 menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gejala perekonomian global yang masih berlanjut serta upaya pemulihan yang berjalan lambat berdampak terhadap kinerja perekonomian domestik. Meskipun demikian, perbankan nasional masih mampu mempertahankan kinerja positif, yang antara lain dapat dilihat dari aspek kelembagaan, fungsi intermediasi, profitabilitas, struktur permodalaan, dan pendanaan. Dari sisi kelembagaan, jumlah bank umum relatif tidak berubah dibandingkan dengan periode 2011, yaitu sebanyak 120 bank, yang terdiri

dari 109 bank konvensional (termasuk 24 unit usaha syariah - UUS) dan 11 bank syariah. Jika dilihat dari jumlah kantor, terdapat 16.625 kantor bank yang terdiri dari 14.343 kantor bank umum konvensional (BUK) dan 2.262 kantor bank umum syariah (BUS). Sementara itu, jumlah BPR mencapai 1.653 bank dengan jumlah kantor mencapai 4.425 kantor. Jika dilihat berdasarkan pola penyebarannya, sebagian besar lokasi kantor, baik bank umum maupun BPR, masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sebanyak 74,0% kantor bank umum berada di wilayah Jawa dan Sumatera dan 26,0% kantor bank umum berada di luar Jawa dan Sumatera. Mayoritas BPR, dengan jumlah kantor yang mencapai 3.821 unit, tersebar di wilayah Jawa dan Bali.



Dari sisi permodalan perbankan domestik, rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) tercatat jauh di atas batas minimum 8% yaitu sebesar 17,4% per Desember 2012. Dengan struktur modal yang didominasi oleh modal inti, diharapkan ketahanan perbankan dapat menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha atau perubahan lingkungan bisnis bank. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) *gross* juga masih cukup baik sebesar 1,9% per Desember 2012 atau merupakan rasio NPL terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit industri perbankan juga masih cukup baik pada 2012. Per Desember 2012, DPK mengalami pertumbuhan sebesar 15,8% (YoY) menjadi IDR 3.225 triliun. Walaupun demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada akhir tahun 2011 sebesar 19,1% (YoY). Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian juga terus meningkat, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,1% (YoY) per Desember 2012 dengan pertumbuhan kredit investasi sebesar 27,4% (YoY) dan kredit modal kerja sebesar 23,2% (YoY) serta kredit konsumsi sebesar 19,9% (YoY).

Perkembangan Perbankan Syariah di Tahun 2012

Perbankan Syariah selama tahun 2012 mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya walaupun secara prosentase

tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Aset perbankan syariah di tahun 2012 tumbuh Rp 49,6 triliun atau tumbuh 34,1% (yoy) dari Rp 145,5 triliun di tahun 2011 ke Rp 195,0 triliun di tahun 2012. Dengan pertumbuhan aset tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat dari 4,0% di tahun 2011 ke 4,6% di tahun 2012. DPK perbankan syariah tahun 2012 naik sebesar Rp 32,1 triliun atau 27,8% (yoy), dari Rp 115,4 triliun di tahun 2011 ke Rp 147,5 triliun di tahun 2012. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,8% (yoy). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap perbankan umum di tahun 2012 adalah 4,6%, naik 0,4% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di tahun 2012 tumbuh 43,7% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pembiayaan di tahun 2011 pada periode yang sama yaitu 50,6% (yoy). Perkembangan pembiayaan perbankan syariah di tahun 2012 naik sebesar Rp 44,9 triliun, dari Rp 102,7 triliun di tahun 2011 ke Rp 147,5 triliun di tahun 2012 sehingga membuat rasio FDR Syariah di tahun 2012 menjadi 100,0%. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan umum di tahun 2012 adalah 5,4%, naik 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,7%. Sementara itu rasio *Non Performing Financing* (NPF) membaik dari 2,5% di tahun 2011 menjadi 2,3% di tahun 2012.

Pertumbuhan Aktiva, Dana dan Pembiayaan (Triliun Rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012	Pertumbuhan 2012 (%)
Total Aktiva	97,5	145,5	195,0	34,1 %
Dana Pihak Ketiga	76,0	115,4	147,5	27,8 %
Pembiayaan	68,2	102,7	147,5	43,7 %

Untuk pertumbuhan jumlah jaringan kantor syariah, sampai dengan tahun 2012 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah. Sejalan dengan hal tersebut,

jaringan kantor BUS telah mencapai 1.734 kantor, meningkat 24,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara itu untuk jaringan kantor UUS meningkat 58,0% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Jumlah Jaringan Kantor Syariah

Keterangan	2010	2011	2012	Pertumbuhan 2012 (%)
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	0,0 %
Unit Usaha Syariah (UUS)	23	23	24	4,4 %
Kantor BUS	1.215	1.390	1.734	24,8 %
Kantor UUS	262	312	493	58,0 %

Kinerja Keuangan BCA Syariah di Tahun 2012

Seiring dengan kondusifnya kondisi perbankan Indonesia di tahun 2012, pada tahun 2012 BCA Syariah mencatat pertumbuhan yang cukup kuat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan. Selama tahun 2012 aset BCA Syariah tumbuh sebesar 31,6% dari Rp 1,2 triliun ke Rp 1,6 triliun, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 46,0% dari Rp 864,1 miliar ke Rp 1,3 triliun dan pembiayaan tumbuh sebesar 48,0% dari Rp 680,9 miliar ke Rp 1,0 triliun. Prosentase pertumbuhan BCA Syariah baik dana pihak ketiga maupun pembiayaan masih berada di atas pertumbuhan industri perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan juga diiringi dengan terus membaiknya kualitas pembiayaan yang ada, terlihat dengan terus membaiknya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari 0,2% di tahun 2011 menjadi 0,1% di tahun 2012.

LABA/ RUGI

Pendapatan Bagi Hasil Bersih

Pertumbuhan dari sisi pembiayaan memberikan dampak kenaikan pendapatan bagi hasil untuk Bank, dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan bagi hasil naik 14,9% dari Rp 58,0 miliar menjadi Rp 66,6 miliar. Total pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan naik sebesar 39,9% dari Rp 62,7 miliar menjadi Rp 87,7 miliar. Berdasarkan kelompok produk, pendapatan margin murabahah naik 41,1% dari Rp 29,6 miliar menjadi Rp 41,8 miliar, pendapatan bagi hasil mudharabah naik 136,1% dari Rp 3,8 miliar menjadi Rp 9,0 miliar, pendapatan bagi hasil musyarakah naik 139,3% dari Rp 9,5 miliar menjadi Rp 22,7 miliar, dan sementara itu pendapatan ijarah turun 28,1% dari Rp 19,8 miliar menjadi Rp 14,2 miliar seiring dengan terus menurunnya *outstanding* pembiayaan tersebut. Seiring dengan meningkatnya *outstanding* dana pihak ketiga selama tahun 2012, beban bagi hasil kepada pihak ketiga naik sebesar 37,5% dari Rp 36,6 miliar menjadi Rp 50,4 miliar.

Pendapatan Operasional Lainnya

Total pendapatan operasional lainnya di tahun 2012, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik sebesar 82,7% dari Rp 4,1 miliar menjadi Rp 7,5 miliar.

Keterangan (dalam jutaan rupiah)	2012 (Rp)	2011 (Rp)
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan Komisi Selain dari Pemberian Kredit/Pembiayaan	4.349	1.805
Pendapatan Operasional Lainnya	3.134	2.291
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	7.483	4.096

Beban Operasional

Beban Operasional tercatat sebesar Rp 59,6 miliar atau naik 22,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban operasional selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja hal ini juga disebabkan meningkatnya biaya IT & Komunikasi seiring dengan bertambahnya cabang.

Keterangan (dalam jutaan rupiah)	2012 (Rp)	2011 (Rp)
BEBAN OPERASIONAL		
Tenaga Kerja	39.039	32.755
Umum dan administrasi	18.142	14.175
Beban Usaha Lain	2.428	1.909
Jumlah Beban Operasional	59.609	48.839

Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Selama tahun 2012 penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dibentuk sebesar Rp 1,5 miliar, turun sebesar Rp 1,8 miliar dibandingkan tahun 2011 yang dibentuk sebesar Rp 3,3 miliar.

Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih

Pada tahun 2012 BCA Syariah membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 11,0 miliar, meningkat 22,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu laba bersih setelah pajak sebesar Rp 8,4 miliar, meningkat 23,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan laba pada tahun 2012 banyak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas penyaluran pembiayaan.

NERACA

Aktiva

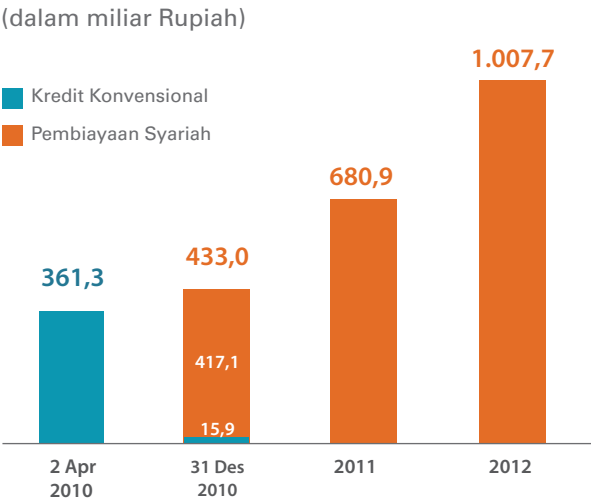
Total aktiva BCA Syariah tumbuh 31,6% dibandingkan tahun sebelumnya atau naik dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun di akhir tahun 2012. Peningkatan nilai aktiva didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang kemudian ditempatkan dalam bentuk aktiva produktif berupa pembiayaan.

Keterangan (dalam jutaan rupiah)	2012 (Rp)	2011 (Rp)
TOTAL AKTIVA PRODUKTIF	1.523,6	1.151,2
Giro Pada Bank Lain	51,0	4,9
Penempatan Pada Bank Indonesia	258,0	237,8
Surat-surat Berharga	206,9	227,6
Pembiayaan	1.007,7	680,9
Kredit	-	-
TOTAL AKTIVA PRODUKTIF	78,6	65,9
Kas	5,9	9,6
Giro Pada Bank Indonesia	58,8	39,9
Aset Tetap	6,8	8,4
Aset Lain	7,1	8,1
TOTAL AKTIVA	1.602,2	1.217,1

Penyaluran Pembiayaan

Pada akhir tahun 2012 BCA Syariah telah membukukan pembiayaan sebesar Rp 1.007,7 miliar, tumbuh 48,0% atau sebesar Rp 326,9 miliar dari akhir tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembiayaan



Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Keterangan	Des 2011 (dalam miliar)	Des 2012 (dalam miliar)
Pertanian dan Perkebunan	52,7	102,5
Pertambangan	1,1	0,3
Industri	132,6	173,1
Konstruksi	11,4	21,4
Perdagangan, Hotel dan Restoran	124,4	109,9
Pengangkutan, Pergudangan dan Transportasi	88,5	94,5
Jasa-jasa Dunia Usaha	102,1	426,0
Lain-lain	167,8	80,1
TOTAL	680,9	1.007,7

Komposisi pembiayaan BCA Syariah berdasarkan sektor ekonomi yang terbesar adalah pada sektor Jasa-jasa Dunia Usaha, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp 426,0 miliar dan kedua terbesar adalah pada sektor industri dengan nilai *outstanding* sebesar Rp 173,1 miliar, sedangkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan posisi akhir Desember 2011 adalah pada sektor Jasa-jasa Dunia Usaha dengan pertumbuhan sebesar 317,1% dan pertumbuhan kedua tertinggi adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan dengan pertumbuhan sebesar 94,4%.

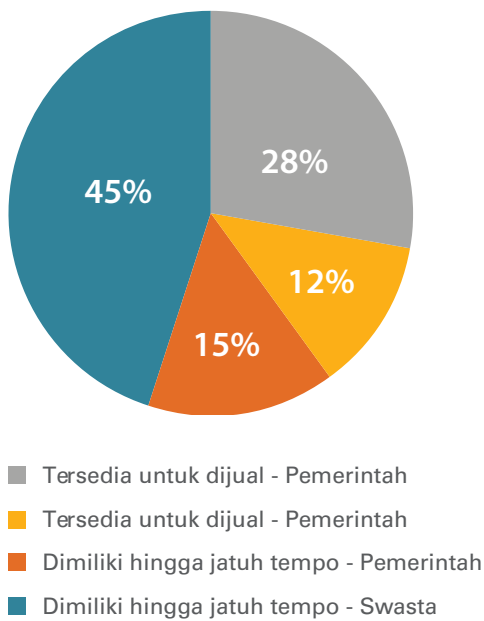
Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas

Keterangan	31 Desember 2011 % terhadap		31 Desember 2012 % terhadap	
	Nominal (miliar Rp)	Total Pembiayaan	Nominal (miliar Rp)	Total Pembiayaan
Lancar	669,6	98,3%	998,9	99,1%
Dibawah Perhatian Khusus	10,3	1,5%	8,5	0,8%
Performing Loan/Financing	679,8	99,8%	1.007,4	100,0%
Kurang Lancar	-	0,0%	0,1	0,0%
Diragukan	-	0,0%	-	0,0%
Macet	1,0	0,2%	0,2	0,0%
NPF/NPL	1,0	0,2%	0,3	0,0%
Total Kredit (Pembiayaan)	680,9	100,0%	1.007,7	100,0%
Rasio NPL/NPF <i>Gross</i> *)	0,2%		0,1%	
Rasio NPL/NPF <i>Nett</i>	0,0%		0,0%	

Pada akhir tahun 2012 rasio NPF pembiayaan sebesar 0,1%, membaik atau turun sekitar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari nasabahnya, BCA Syariah senantiasa menerapkan kebijakan untuk melakukan pembentukan cadangan secara penuh kepada nasabah pembiayaan yang bermasalah. Pada posisi akhir bulan Desember 2012 total cadangan pembiayaan bermasalah yang dibentuk sebesar Rp 0,3 miliar. Adapun rasio cadangan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada posisi akhir bulan Desember 2012 adalah sebesar 100,0%.

Sementara itu dalam skala perbankan syariah nasional nominal pembiayaan bermasalah mengalami sedikit peningkatan dari Rp 2,6 Triliun pada akhir tahun 2011 menjadi Rp 3,3 Triliun pada akhir tahun 2012. Namun demikian, dengan akselerasi yang pesat pada pembiayaan secara

keseluruhan maka rasio NPF *Gross* perbankan syariah pada tahun 2012 masih tergolong cukup baik yakni sebesar 2,2% atau membaik dibandingkan tahun 2011 yakni sebesar 2,5%.



Surat-surat Berharga Berdasarkan Jatuh Tempo

Keterangan (dalam miliar rupiah)	Total	2012	2013	2014	2015
Tersedia untuk dijual - Pemerintah	58,1	0,0	6,2	0,0	51,9
Tersedia untuk dijual - Pemerintah	24,8	0,8	13,2	10,9	0,0
Dimiliki hingga jatuh tempo - Pemerintah	31,9	0,0	24,0	0,0	7,9
Dimiliki hingga jatuh tempo - Swasta	92,1	0,0	52,1	40,0	0,0
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	206,9	0,8	95,4	50,9	59,9

Surat-Surat Berharga

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh BCA Syariah pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp 206,9 miliar, turun sebesar Rp 20,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan jenis surat berharga, jenis dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) Swasta tercatat sebesar Rp 92,1 miliar,

tersedia untuk dijual (AFS) Pemerintah sebesar Rp 58,1 miliar, HTM Pemerintah sebesar Rp 31,9 miliar dan AFS Swasta sebesar Rp 24,8 miliar.

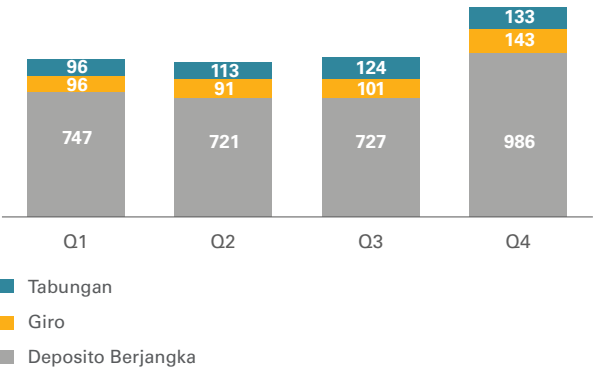
PASIVA

Dana Pihak Ketiga

Total dana pihak ketiga pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp 1,3 triliun terdiri dari produk tabungan sebesar Rp 133,0 miliar, produk giro sebesar Rp 143,2 miliar dan produk deposito sebesar Rp 985,5 miliar. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada akhir tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu naik sebesar 46,0% atau Rp 397,7 miliar. Produk giro naik sebesar 35,0%, produk tabungan naik 65,7% dan produk deposito naik sebesar 45,4%. Keberhasilan BCA Syariah dalam menaikan dana murah giro dan tabungan banyak didukung oleh pendirian Unit Layanan Syariah di cabang-cabang BCA yang memiliki potensi tinggi atas produk dan layanan syariah.

Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2012

(dalam miliar rupiah)



Pertumbuhan dana pihak ketiga yang sedikit dibawah pertumbuhan pembiayaan menyebabkan naiknya

rasio pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga (FDR) sebesar 1,1% menjadi 79,9% pada akhir tahun 2012.

Ekuitas

Total ekuitas meningkat sebesar 0,04% atau Rp 0,13 miliar dari Rp 308,5 miliar menjadi Rp 308,6 miliar pada akhir tahun 2012, sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2012. Hampir seluruh permodalan Bank adalah terdiri dari modal inti (96,9%). Permodalan bank berada pada level yang sangat sehat dengan rasio kecukupan modal (CAR), dengan memperhitungkan risiko kredit, tercatat sebesar 31,5%, jauh melampaui persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8,0%.

Likuiditas

Posisi likuiditas BCA Syariah pada akhir tahun 2012 cukup memadai dengan *secondary reserved* sebesar Rp 340,9 miliar, terdiri dari Fasbis sebesar Rp 258,0 miliar, surat berharga tersedia untuk dijual (AFS) Pemerintah sebesar Rp 58,1 miliar dan surat berharga tersedia untuk dijual (AFS) Swasta sebesar Rp 24,8 miliar. Sumber utama likuiditas BCA Syariah berupa dana pihak ketiga yang berasal dari giro, tabungan dan deposito yang berjangka waktu pendek dan secara historikal memiliki pengendapan yang cukup stabil.

Ekuitas (dalam miliar rupiah)	2012	2011
Modal Inti	302,6	299,1
Modal Pelengkap	5,8	9,4
Jumlah Modal Inti dan Pelengkap	308,5	308,6
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	671,4	980,6
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	45,9%	31,5%

TANGGUNG JAWAB ATAS PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan ini serta laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen BCA Syariah dan telah disetujui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

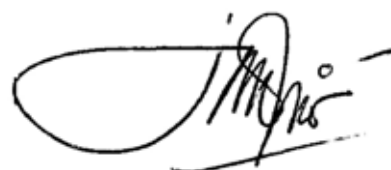
DEWAN KOMISARIS



Iwan Kusumobagio
Komisaris Utama

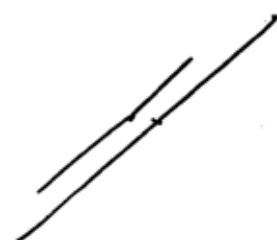


Surja Widjaja
Komisaris Independen



H. Suhartono
Komisaris Independen

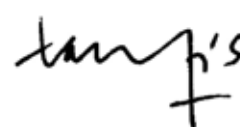
DIREKSI



Yana Rosiana
Direktur Utama



John Kosasih
Direktur



Tantri Indrawati
Direktur Kepatuhan

Laporan Keuangan PT BANK BCA SYARIAH

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
Beserta Laporan Auditor Independen

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK BCA SYARIAH
31 DESEMBER 2012 dan 2011**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yana Rosiana
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310
Jabatan : Direktur Utama

Nama : John Kosasih
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah ;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2013
PT. Bank BCA Syariah


Yana Rosiana
Direktur Utama


John Kosasih
Direktur



No. CUR - 017

Laporan Auditor Independen

Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham
PT Bank BCA Syariah

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Bank BCA Syariah pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor lain yang laporannya bertanggal 10 Februari 2012 menyatakan wajar.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Intiland Tower Annexe 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 32
Jakarta 10220
INDONESIA

Tel : (021) 3156385, 5708084
Fax : (021) 3156384, 5708085
E-mail : auditi_au@cbn.net.id
chrisutomo@cbn.net.id

Jl. Abdurahman Saleh No. 40, 2nd Floor
Bandung 40174
Tel / Fax : (022) 6004663

Seperti diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan, berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No.001/MO/DPS/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dan No.002/DPS/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, DPS menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Abubakar Usman & Rekan



Chris Utomo, CPA
AP. 0530

Jakarta, 29 Januari 2013

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
KAS	4	5.895.781.300	9.553.236.000
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2e, 5	316.780.352.755	277.650.210.697
PENEMPATAN PADA BANK LAIN <i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 514.825.934 dan Rp 49.825.914 pada 31 Desember 2012 dan 2011)</i>	2b, 2f, 6	50.967.767.480	4.932.765.510
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA Penyisihan Kerugian	2c, 2d, 2g, 7	206.886.469.358 (2.159.110.897)	227.600.921.246 (2.176.594.984)
Bersih		204.727.358.461	225.424.326.262
PIUTANG Murabahah <i>(setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan sebesar Rp 93.827.560.784 dan Rp 78.055.712.439 pada 31 Desember 2012 dan 2011)</i>	2b, 2c, 2h, 8, 33	439.943.114.621 (4.889.395.229)	340.604.941.037 (3.877.783.831)
Jumlah Piutang Murabahah		435.053.719.392	336.727.157.206
PEMBIAYAAN Mudharabah Penyisihan Kerugian	2b, 2c, 2i, 9, 33	126.023.572.198 (1.260.235.722)	13.040.583.579 (130.405.836)
Jumlah Pembiayaan Mudharabah Bersih		124.763.336.476	12.910.177.743
Musyarakah Penyisihan Kerugian	2b, 2c, 2i, 10, 33	341.829.115.238 (2.211.741.152)	194.757.727.463 (981.527.275)
Jumlah Pembiayaan Musyarakah Bersih		339.617.374.086	193.776.200.188
Qardh Penyisihan Kerugian		45.691.662 (456.917)	26.566.666 (265.667)
Jumlah Pembiayaan Qardh Bersih		45.234.745	26.300.999
Jumlah Pembiayaan		467.898.379.098	207.824.877.708
Jumlah Penyisihan Kerugian		(3.472.433.791)	(1.112.198.778)
Jumlah Pembiayaan Bersih		464.425.945.307	206.712.678.930
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2b, 2j, 11, 33		
Nilai Perolehan		162.149.634.961	182.944.820.849
Akumulasi Penyusutan		(62.254.060.654)	(50.510.091.244)
Nilai Aset Ijarah Bersih		99.895.574.307	132.434.729.605

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
ASET TETAP	2k, 12		
Nilai Perolehan		20.893.828.286	21.373.195.067
Akumulasi Penyusutan		(14.127.451.200)	(12.934.443.309)
Nilai Buku		6.766.377.086	8.438.751.758
ASET LAIN			
Aset Pajak Tangguhan	2t, 16d	6.551.711.281	1.211.087.599
Aset Lain-lain	2l, 2t, 13	11.116.402.336	14.012.193.894
JUMLAH ASET		<u>1.602.180.989.705</u>	<u>1.217.097.137.461</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN SEGERA	14	1.161.069.647	4.200.130.300
SIMPANAN	2b, 2m, 15, 33		
Giro Wadiah		145.372.224.544	106.876.672.803
Tabungan Wadiah		89.585.487.657	42.515.546.022
Jumlah Simpanan		234.957.712.201	149.392.218.825
PEMBIAYAAN DITERIMA		104.103.750	520.518.750
HUTANG PAJAK	2t, 16a	2.587.189.906	1.923.851.100
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2c, 17	-	692.496
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	2u, 18	17.983.801.887	14.178.169.351
JUMLAH KEWAJIBAN		256.793.877.391	170.215.580.822
DANA SYIRKAH TEMPORER	2b, 2n, 19, 33		
Investasi Tidak Terikat			
Dari Bukan Bank			
Tabungan Mudharabah		43.464.280.823	37.770.939.534
Deposito Mudharabah		985.546.973.893	675.498.129.033
Dari Bank			
Deposito Mudharabah		12.000.000.000	20.000.000.000
Investasi Terikat			
Dari Bukan Bank			
Deposito Mudharabah		-	2.238.000.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		1.041.011.254.716	735.507.068.567
Ekuitas			
Modal Saham - nilai nominal			
Rp 1.000.000 per saham	20		
Modal Dasar - 950.000 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
296.300 saham pada 31 Desember 2012 dan 2011		296.300.000.000	296.300.000.000
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga tersedia untuk dijual		(10.882.399.684)	4.476.156.319
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	21	450.000.000	250.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya		18.508.257.282	10.348.331.753
Jumlah Ekuitas		304.375.857.598	311.374.488.072
JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>1.602.180.989.705</u>	<u>1.217.097.137.461</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA			
OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli:			
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	2o, 22	41.809.282.107	29.635.326.761
Pendapatan dari sewa:			
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>		14.204.578.437	19.767.076.226
Pendapatan dari bagi hasil:			
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		8.970.110.038	3.798.491.011
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		22.734.805.867	9.499.506.842
Jumlah Pendapatan		87.718.776.449	62.700.400.840
Pendapatan usaha utama lainnya	2p, 22	29.267.193.649	31.939.151.639
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>		116.985.970.098	94.639.552.479
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA <i>SYIRKAH</i> TEMPORER	2q, 23	(50.363.263.100)	(36.636.081.302)
		66.622.706.998	58.003.471.177
HAK BAGI HASIL MILIK BANK			
KEGIATAN KONVENSIONAL			
Pendapatan Bunga	2r	-	251.590.040
Pendapatan Provisi dan Komisi		-	36.751.935
		-	288.341.975
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
Pendapatan imbalan jasa perbankan	2s, 24	14.463.656.383	5.151.731.674
Pendapatan imbalan investasi terikat		-	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		14.463.656.383	5.151.731.674

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
BEBAN USAHA			
Beban Tenaga Kerja	25	39.038.795.029	32.754.944.488
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	26	8.498.273.512	4.334.163.775
Beban Umum dan Administrasi	27	18.141.535.336	14.174.712.368
Beban Usaha Lain:			
Beban Bonus Simpanan Wadiah		2.428.453.528	1.909.043.552
Premi Penjaminan Pemerintah	32	1.935.039.975	1.306.155.667
Jumlah Beban Usaha		70.042.097.380	54.479.019.850
LABA USAHA		11.044.266.001	8.964.524.976
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			
Pendapatan non usaha	28	39.119.587	79.842.123
Beban non usaha		(122.607.573)	(93.888.089)
Jumlah pendapatan dan (beban) non usaha		(83.487.986)	(14.045.966)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		10.960.778.015	8.950.479.010
ZAKAT			
		-	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		10.960.778.015	8.950.479.010
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	2s, 16b	(2.821.957.500)	(2.305.269.750)
Tangguhan		221.105.014	127.561.332
LABA BERSIH		8.359.925.529	6.772.770.592

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

	Modal Saham	Keuntungan Bersih	Saldo laba dari	Saldo laba dari		Jumlah Ekuitas
	Ditempatkan dan	yang Belum Direalisasi	Kegiatan	Kegiatan Syariah		
	Disetor Penuh	atas Surat-surat	Konvensional	Belum Ditentukan	Sudah Ditentukan	
	Rp	Rp	Rp	Penggunaannya	Penggunaannya	Rp
SALDO PER 31 DESEMBER 2010	<u>296.300.000.000</u>	<u>2.800.233.294</u>	<u>-</u>	<u>3.687.770.351</u>	<u>137.790.810</u>	<u>302.925.794.455</u>
Penambahan Modal Disetor	-	-	-	(112.209.190)	112.209.190	-
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	-	-	-	6.772.770.592	-	6.772.770.592
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	-	1.675.923.025	-	-	-	1.675.923.025
SALDO PER 31 DESEMBER 2011	<u>296.300.000.000</u>	<u>4.476.156.319</u>	<u>-</u>	<u>10.348.331.753</u>	<u>250.000.000</u>	<u>311.374.488.072</u>
Penambahan Modal Disetor	-	-	-	(200.000.000)	200.000.000	-
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	-	-	-	8.359.925.529	-	8.359.925.529
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	-	(15.358.556.003)	-	-	-	(15.358.556.003)
SALDO PER 31 DESEMBER 2012	<u>296.300.000.000</u>	<u>(10.882.399.684)</u>	<u>-</u>	<u>18.508.257.282</u>	<u>450.000.000</u>	<u>304.375.857.598</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya	87.718.776.446	62.700.400.840
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(52.298.303.074)	(36.636.081.302)
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	-	288.341.975
Pembayaran bunga	-	(1.306.155.667)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	36.750.690.713	36.034.931.364
Pembayaran beban karyawan	(39.038.795.029)	(32.754.944.488)
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan	(37.390.374.709)	(17.629.760.373)
Pembayaran pajak	(2.821.957.500)	(2.305.269.750)
Pembayaran zakat	-	(2.031.589)
Penyaluran dana kebajikan	(1.133.780)	(10.103.000)
Penerimaan pendapatan non-usaha	(83.487.984)	(14.045.966)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia	(20.200.000.000)	(86.200.000.000)
Surat berharga	20.696.967.801	14.398.726.599
Piutang	(98.326.562.187)	(230.261.598.881)
Pembiayaan mudharabah	(111.853.158.733)	78.564.822.257
Pembiayaan musyarakah	(145.841.173.898)	(146.454.200.188)
Aset yang diperoleh untuk ijarah	32.539.155.298	37.844.383.126
Kredit yang diberikan	-	11.916.388.825
Pinjaman qardh	(18.933.746)	(26.300.999)
Aset lain-lain	4.624.160.515	(3.049.077.802)
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:		
Kewajiban segera	(3.039.060.655)	3.629.526.061
Simpanan	85.565.493.376	72.194.617.788
Kewajiban kepada pihak lain	(416.415.000)	(416.415.000)
Hutang pajak	(4.456.179.861)	1.170.312.943
Estimasi kerugian	(692.496)	(39.451.375)
Kewajiban lain-lain	3.805.632.536	2.695.113.255
Kenaikan (Penurunan) dana syirkah temporer		
Investasi terikat	(10.238.000.000)	259.846.414.223
Investasi tidak terikat	315.742.186.148	(4.503.900.836)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	61.418.834.181	19.674.642.040

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI

Pembelian efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
Investasi pada Bank Indonesia	-	-
Penambahan/reklasifikasi aset tetap	(2.442.312.741)	(188.696.744)
Hasil penjualan aset tetap	2.796.167.908	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	353.855.167	(188.696.744)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
ARUS KAS DIPEROLEH DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Setoran saham	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan	-	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	61.772.689.348	19.485.945.296
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	54.386.038.121	34.900.092.825
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	116.158.727.469	54.386.038.121
Kas dan Setara Kas Terdiri dari:		
Kas	5.895.781.300	9.553.236.000
Giro pada Bank Indonesia	58.780.352.755	39.850.210.697
Penempatan Pada Bank Lain	51.482.593.414	4.982.591.424
Jumlah	116.158.727.469	54.386.038.121
Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas		
Cadangan Umum	200.000.000	112.209.190

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
PENDAPATAN USAHA	22	116.985.970.098	94.639.552.479
PENGURANG :			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		(557.890.271)	(1.768.048.018)
Pendapatan Sewa		7.491.693	(619.765.740)
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS		(3.834.740.681)	(418.694.444)
Jumlah Pengurang		(4.385.139.259)	(2.806.508.202)
Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil		112.600.830.839	91.833.044.277
Bagi hasil yang Menjadi Hak Bank		62.237.567.739	55.196.962.975
Bagi hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana		50.363.263.100	36.636.081.302
Dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah di disitribusikan		48.578.729.998	35.057.091.330
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum di disitribusikan		1.784.533.102	1.578.989.972

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah)

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Bank Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	26.470.596	9.428.748
Jumlah sumber dana zakat	26.470.596	9.428.748
Penggunaan dana zakat		
Fakir	9.433.286	2.031.598
Miskin	-	-
Amil	-	-
Muallaf	-	-
Orang yang terlilit hutang (gharim)	-	-
Riqab	-	-
Fisabilillah	-	-
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	-	-
Jumlah Penggunaan Dana	9.433.286	2.031.598
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	17.037.310	7.397.150
Saldo Awal Dana Zakat	9.433.287	2.036.137
Saldo Akhir Dana Zakat	26.470.597	9.433.287

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah)

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari dalam bank syariah	819.946	1.953.726
Sedekah	-	-
Hasil pengelolaan wakaf	-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
Denda	478.694.077	310.674.994
Pendapatan non-halal	1.423.884	-
Lainnya	-	691.058
	480.937.907	313.319.778
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana kebajikan produktif	-	-
Sumbangan	-	(6.130.000)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(79.629.976)	(3.973.000)
	(79.629.976)	(10.103.000)
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	401.307.931	303.216.778
Saldo Awal Dana Kebajikan	335.477.512	32.260.734
Saldo Akhir Dana Kebajikan	736.785.443	335.477.512

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

1. Umum

1.a. Pendirian Bank

PT Bank BCA Syariah ("Bank") didirikan dengan nama PT Utama International Bank berdasarkan Akta No. 91 tanggal 21 Mei 1991 dari Notaris Buniarti Tjandra, SH. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 tanggal 31 Juli 1991. Melalui akta perubahan No. 96 tanggal 22 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH, telah dilakukan perubahan nama PT Utama International Bank menjadi PT Bank UIB. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1497.HT.01.04.97 juncto Berita Negara No. 61 tanggal 1 Agustus 1997.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Buena Brahmana, SH, MKn., No. 122 tanggal 27 April 2012 mengenai Pernyataan Rapat Di Luar Rapat Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Komposisi kepemilikan Bank setelah akuisisi telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH.,M.Si., Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 16 Desember 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan terakhir komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No.223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Bank UIB, sesuai dengan Akta Notaris Pudji Redjeki Irawati, SH No. 49 tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP/GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Raya Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur. Pada tahun 2012, Bank beroperasi melalui 6 Kantor Cabang Utama (KCU), 6 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 18 Unit Layanan Syariah (ULS).

1. Umum - lanjutan

1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Iwan Kusumobagio
Komisaris : Surja Widjaja
Komisaris : Drs. H. Suhartono, MM

Direksi
Direktur Utama : Hj. Yana Rosiana
Direktur : John Kosasih
Direktur Kepatuhan : Tantri Indrawati

Dewan Pengawas Syariah
Ketua DPS : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil
Anggota DPS : Dr. H. Muhammad Masyhuri Naim

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Komite Audit
Ketua : Surja Widjaja
Anggota : Ridwan Masui
Anggota : Sutedjo Prihatono

Komite Pemantau Risiko
Ketua : H. Suhartono
Anggota : Rio Sigid Wisaksono
Anggota : Sutedjo Prihatono

Komite Remunerasi
Ketua : Surja Widjaja
Anggota : Iwan Kusumobagio
Anggota : Drs. H. Suhartono, MM
Anggota : Endang Ruslina

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Direksi	5.646.011.476	5.196.011.476
Dewan Komisaris	1.238.844.000	1.223.844.000
Dewan Pengawas Syariah	431.492.000	426.492.000
	7.316.347.476	6.846.347.476

1. Umum - lanjutan

1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Bank mempunyai 393 dan 326 karyawan tetap dan kontrak pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali tagihan imbal hasil atas aset produktif yang digolongkan sebagai non-performing dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, serta konsep biaya historis, kecuali efek-efek tertentu disajikan sebesar nilai wajar (2.f), agunan yang diambil alih yang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106, "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107, "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah", dan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diterbitkan atas kerjasama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Bank Indonesia. Berdasarkan PSAK No. 101 (revisi 2011), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- (i). Laporan Posisi Keuangan;
- (ii). Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- (iii). Laporan Perubahan Ekuitas;
- (iv). Laporan Arus Kas;
- (v). Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- (vi). Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- (vii). Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- (viii) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2.a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Mulai tahun 2012, Bank tidak memiliki pengelolaan investasi terikat. Pada tahun 2011, Bank memulai aktivitas fungsi penyaluran dana zakat, serta dana kebajikan. Oleh karenanya, Bank membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Bank telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi untuk memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi :

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan

2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi - lanjutan

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) .
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sukuk, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), surat berharga, piutang dan pembiayaan yang diberikan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.

Penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah".

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan

2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah minimum penyisihan kerugian aset produktif, aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dihitung dengan memperhatikan PBI tersebut tersebut di atas.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi disajikan dalam bagian Kewajiban di laporan posisi keuangan.

Pembentukan penyisihan minimum sesuai dengan PBI tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk aset produktif, penyisihan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, kecuali untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito berjangka, tabungan, setoran jaminan, emas. Penyisihan umum untuk aset produktif syariah sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
2. Penyisihan khusus, sekurang - kurangnya sebesar :

Klasifikasi	Persentase Minimum Penyisihan Kerugian
Dalam Perhatian Khusus	5%
Kurang Lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase penyisihan penghapusan aset produktif di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar, yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan

2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi - lanjutan

Untuk aset produktif syariah, nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi terdiri atas giro dan/atau tabungan *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan dan/atau deposito *mudharabah*, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah paling tinggi sebesar 100%, surat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 50%, persentase tertentu dari tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, dan persediaan yang tidak melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dan penilaian untuk plafond pembiayaan di atas Rp 5 miliar dilakukan oleh penilaian independen.

2.d. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 55 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

2.e. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

2.f. Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai kewajiban Bank (titipan dana non halal).

2.g. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2.g. Investasi pada Surat Berharga - lanjutan

Investasi pada surat berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" sebagai berikut:

1. Dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak tangguhan, diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada saat realisasi pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan;
3. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan. Atas penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, perbedaan antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian

Nilai wajar investasi ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga.

2.h. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna* dan/atau akad *ijarah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditangguhkan" yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad ijarah dengan perjanjian adanya pemindahan kepemilikan aset yang di-*ijarah*-kan pada saat tertentu.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.h. Piutang - lanjutan

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (i). hibah;
- (ii). penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii). penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv). penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni sebesar saldo piutang.

2.i. Pembiayaan

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Jika pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat rusak, hilang atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank dengan membentuk penyisihan kerugian. Jika pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.j. Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah*

Aset yang Diperoleh Untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2.k. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Pada tahun 2008, sesuai dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2009) mengenai Aset Tetap, Bank memilih model biaya perolehan untuk pengukuran aset tetapnya.

Kecuali tanah, semua aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut:

Jenis	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	20
Inventaris Kantor I	4
Inventaris Kantor II	4
Kendaraan Bermotor	4

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-review, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Sesuai PSAK No. 48 tentang "Akuntansi Penurunan Nilai Aktiva", Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban periode berjalan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun aset lain-lain, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

2.m. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban pada nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan dana yang dipercayakan nasabah kepada bank, dan tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk apa pun.

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan Bank. Simpanan dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar kewajiban Bank.

2.n. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Hubungan antara Bank dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*, dan akun lain yang sejenis.

- (i). *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya.
- (ii). *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- (iii). *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.o. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual beli transaksi *murabahah*, pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musytarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tengguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan Bank adalah sebagai berikut:

- 1. Metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad:
 - a) Untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh satu tahun.
 - b) Untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan/atau beban pengelolaan piutang tersebut relatif kecil.
- 2. Metode proporsional sesuai jangka waktu akad untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan/atau beban pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif kecil.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *Non Performing*.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musytarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

2.p. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.q. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dihitung dari pendapatan bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *Mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

2.r. Pendapatan Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai "*non performing*" yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima secara tunai. Pendapatan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok diakui sebagai pendapatan bunga.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok tagihan dalam perjanjian kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan nilai bunga yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru pada saat pembayaran kredit diterima.

2.s. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau tidak untuk suatu jangka waktu tertentu, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

2.t. Taksiran Pajak Penghasilan

Bank menghitung pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu tarif pajak yang telah berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

2.u. Imbalan Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mewajibkan Bank untuk membayar imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, bilamana ketentuan dalam undang-undang terpenuhi.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja karyawan.

Penerapan awal PSAK No. 24 Revisi dilakukan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah penyesuaian yang terjadi yang terkait dengan periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba dari periode komparatif terawal yang disajikan.

2.v. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, kewajiban, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. Kebijakan Konversi Produk Bank Konvensional

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Bank memulai kegiatan usaha secara syariah pada tanggal 5 April 2010 dan Bank wajib menyelesaikan seluruh kegiatan seluruh hak dan kewajiban nasabah dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, disebutkan bahwa bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai bank syariah.

Kebijakan konversi produk pembiayaan bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Masa konversi produk pembiayaan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal efektif Bank mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menjadi bank syariah.
2. Memberitahukan rencana konversi secara tertulis kepada seluruh debitur.
3. Kredit yang telah ada dikonversi menjadi pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil *mudharabah/ musyarakah/ murabahah/ ijarah* tergantung kesesuaian produknya.
4. Pinjaman rekening koran yang tidak dikonversi harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Selama belum dikonversi, kredit yang telah ada akan tetap sebagai kredit konvensional sampai batas waktu transisi maksimum 1 (satu) tahun hari sejak tanggal Bank mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menjadi bank syariah.

Sedangkan kebijakan konversi dana pihak ketiga dari produk bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan rencana konversi dan tahapan-tahapan konversi secara tertulis kepada seluruh nasabah.
2. Giro dikelola berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* .
3. Tabungan dan deposito berjangka dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* .
4. Memberikan nisbah/bagi hasil pada masa-masa awal setelah konversi kepada seluruh nasabah.

Konversi mulai dilaksanakan pada tanggal 3 April 2010. Bagi nasabah dan debitur yang tidak setuju dikonversi akan dilakukan penyelesaian seketika atau secara bertahap.

Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah Bank, terhadap aset dan portofolio yang masih menggunakan perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah dan belum dapat dikonversikan karena adanya hal-hal yang tidak dapat dihindari, maka kondisi tersebut dianggap darurat.

Sampai dengan 31 Desember 2011, bank telah berhasil mengkonversi seluruh produk konvensional ke dalam produk bank syariah.

4. Kas

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Kas	5.895.781.300	9.553.236.000
Jumlah	5.895.781.300	9.553.236.000

5. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Giro		
Giro <i>Wadiah</i>	58.780.352.755	39.850.210.697
Jumlah	58.780.352.755	39.850.210.697
Penempatan pada Bank Indonesia		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	258.000.000.000	237.800.000.000
Jumlah	258.000.000.000	237.800.000.000
Jumlah Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	316.780.352.755	277.650.210.697

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia berupa GWM Utama dalam Rupiah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/25PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) Utama dalam Rupiah sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah. Sementara menurut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing bahwa GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
31 Desember 2012 dan 2011
(dalam Rupiah)

5. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia - lanjutan

Persentase GWM pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah :

	31 Desember 2012 (%)	31 Desember 2011 (%)
Rupiah		
Primer	5,00%	5,00%
Sekunder	2,50%	2,50%

Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia Syariah (FASBIS) per 31 Desember 2012 memperoleh bonus per tahun berkisar antara 3,75% sampai dengan 4,5%, yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo.

Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia Syariah (FASBIS) per 31 Desember 2011 memperoleh bonus per tahun berkisar antara 4,5% sampai dengan 5,75%, yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo.

6. Penempatan pada Bank Lain

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Giro		
Pihak Berelasi (Catatan 39)		
<u>Bank Non Syariah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	1.482.593.414	4.982.591.424
Penyisihan Kerugian	(14.825.934)	(49.825.914)
	<u>1.467.767.480</u>	<u>4.932.765.510</u>
Deposito		
Pihak Ketiga		
<u>Bank Umum Syariah</u>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50.000.000.000	-
Penyisihan Kerugian	(500.000.000)	-
	<u>49.500.000.000</u>	<u>-</u>
	<u>50.967.767.480</u>	<u>4.932.765.510</u>

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	49.825.914	5.676.155
(Pemulihan)/ Pembentukan Penyisihan		
Kerugian Selama Satu Tahun	465.000.020	44.149.759
Jumlah	<u>514.825.934</u>	<u>49.825.914</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
31 Desember 2012 dan 2011
(dalam Rupiah)

7. Investasi Pada Surat Berharga

a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Rupiah		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
<u>Lancar</u>		
Sukuk Korporasi	92.000.000.000	110.000.000.000
Surat Berharga Syariah Negara	32.000.000.000	32.000.000.000
Selisih nilai perolehan dan nominal yang belum diamortisasi	(62.261.030)	174.116.187
	<u>123.937.738.970</u>	<u>142.174.116.187</u>
Penyisihan Kerugian	(920.642.857)	(2.176.594.984)
Jumlah Surat Berharga yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	<u>123.017.096.113</u>	<u>139.997.521.203</u>
Tersedia Untuk Dijual		
<u>Lancar</u>		
Sukuk Korporasi	23.255.000.000	25.255.000.000
Surat Berharga Syariah Negara	54.203.596.632	54.203.596.632
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	4.490.133.756	5.968.208.427
	<u>81.948.730.388</u>	<u>85.426.805.059</u>
Penyisihan Kerugian	(238.468.040)	-
	<u>81.710.262.348</u>	<u>85.426.805.059</u>
<u>Macet</u>		
Sukuk Korporasi	20.000.000.000	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	(19.000.000.000)	-
	<u>1.000.000.000</u>	<u>-</u>
Penyisihan Kerugian	(1.000.000.000)	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Surat Berharga yang Tersedia Untuk Dijual	<u>81.710.262.348</u>	<u>85.426.805.059</u>
Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih	<u>204.727.358.461</u>	<u>225.424.326.262</u>

7. Investasi Pada Surat Berharga

b. Berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Rupiah		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Kurang dari 1 Bulan	-	-
Kurang dari 1 Tahun	76.014.927.374	142.174.116.187
Lebih dari 1 Tahun	47.922.811.596	-
Tersedia Untuk Dijual		
Kurang dari 1 Bulan	-	-
Kurang dari 1 Tahun	19.369.414.854	1.043.500.000
Lebih dari 1 Tahun	62.829.315.534	84.383.305.059
Proses Restrukturisasi	750.000.000	-
	206.886.469.358	227.600.921.246
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(2.159.110.897)	(2.176.594.984)
Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih	204.727.358.461	225.424.326.262

c. Berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	Peringkat Rating		Jumlah	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2011
			Rp	Rp
Rupiah				
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
SBSN IFR 0003	-	-	7.922.811.596	7.894.743.092
SBSN IFR 0004	-	-	23.950.641.654	23.891.411.658
Sukuk Ijarah Indosat III	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	40.009.999.974	40.049.999.982
Sukuk BLTA Seri A	-	idA-(Sy)	-	9.074.851.858
Sukuk BLTA Seri B	-	idA-(Sy)	-	4.137.254.897
Sukuk BLTA Seri Th 2007	-	idA-(Sy)	-	4.941.283.250
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung	idA+(Sy)	idA(Sy)	12.054.285.746	12.184.571.450
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim	idAA(Sy)	idAA(Sy)	16.000.000.000	16.000.000.000
Sukuk Salim Ivomas Pratama	idAA(Sy)	idAA-(Sy)	24.000.000.000	24.000.000.000
Jumlah Hingga Jatuh Tempo			123.937.738.970	142.174.116.187

7. Investasi Pada Surat Berharga - lanjutan

	Peringkat Rating		Jumlah	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2011
			Rp	Rp
Rupiah				
Tersedia Untuk Dijual				
SBSN IFR 0003	-	-	51.932.771.534	52.728.134.059
SBSN IFR 0004	-	-	6.169.154.854	6.329.154.000
Sukuk Ijarah Indosat III	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	10.085.000.000	10.281.810.000
Sukuk BLTA Seri A	idD(Sy)	idA-(Sy)	500.000.000	1.009.466.000
Sukuk BLTA Seri B	idD(Sy)	idA-(Sy)	250.000.000	1.062.649.000
Sukuk BLTA Seri Th 2007	idD(Sy)	idA-(Sy)	250.000.000	-
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung	idA+(Sy)	idA(Sy)	3.115.260.000	3.278.016.000
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim	idAA(Sy)	idAA(Sy)	4.229.544.000	4.170.204.000
Sukuk Salim Ivomas Pratama	idAA(Sy)	idAA-(Sy)	6.417.000.000	6.567.372.000
Jumlah Tersedia Untuk Dijual			82.948.730.388	85.426.805.059
Jumlah			206.886.469.358	227.600.921.246
Dikurangi: Penyisihan Kerugian			(2.159.110.897)	(2.176.594.984)
Jumlah Investasi Pada Surat Berharga			204.727.358.461	225.424.326.262

Pada akhir Januari 2012, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mendapatkan gugatan pailit melalui Pengadilan Tinggi Niaga oleh para supplier dan pemegang surat berharganya. Dalam rencana/proposal damai yang diajukan oleh BLTA, memberikan opsi restrukturisasi pembayaran kupon obligasi/sukuk dan surat utang lainnya. Bank memiliki surat berharga syariah berjenis sukuk ijarah BLTA dengan total nilai obligasi sebesar Rp 20 Milyar pada akhir tahun 2011. Pada bulan Juni 2012 Bank mereklasifikasi seluruh surat berharga BLTA jenis dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Pada saat yang bersamaan Bank melakukan penilaian ulang atas seluruh portfolio surat berharga BLTA menjadi sebesar Rp 1 Milyar.

Informasi peringkat diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.

d. Perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	2.176.594.984	1.346.201.572
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	2.508.978.456	845.866.446
Pemulihan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	(2.526.462.543)	(15.473.034)
Jumlah	2.159.110.897	2.176.594.984

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

8. Piutang

a. Berdasarkan Jenis

	31 Desember 2012					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pihak Berelasi						
Murabahah	28.580.900					28.580.900
Sub Jumlah	28.580.900	-	-	-	-	28.580.900
Pihak Ketiga						-
Murabahah	430.819.506.628	8.515.933.525			579.093.567	439.914.533.720
Sub Jumlah	430.819.506.628	8.515.933.525	-	-	579.093.567	439.914.533.720
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(4.300.507.594)	(9.794.067)	-	-	(579.093.567)	(4.889.395.228)
Jumlah	426.547.579.934	8.506.139.458	-	-	-	435.053.719.392
	31 Desember 2011					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pihak Berelasi						
Murabahah	129.126.018	-	-	-	-	129.126.018
Sub Jumlah	129.126.018	-	-	-	-	129.126.018
Pihak Ketiga						-
Murabahah	329.981.023.740	9.915.697.712	-	-	579.093.567	340.475.815.019
Sub Jumlah	329.981.023.740	9.915.697.712	-	-	579.093.567	340.475.815.019
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(3.295.101.498)	(3.588.766)	-	-	(579.093.567)	(3.877.783.831)
Jumlah	326.815.048.260	9.912.108.946	-	-	-	336.727.157.206

8. Piutang - lanjutan

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2012					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdagangan, Restoran dan Hotel	211.172.371.852	-	-	-	-	211.172.371.852
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	69.497.755.010	7.758.313.989	-	-	-	77.256.068.999
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	53.967.832.261	-	-	-	-	53.967.832.261
Industri Pengolahan	24.556.051.841	-	-	-	-	24.556.051.841
Jasa-jasa Dunia Usaha	2.840.000.394	-	-	-	-	2.840.000.394
Konstruksi dan Real Estate	1.733.274.728	-	-	-	579.093.567	2.312.368.295
Lain-lain	67.080.801.442	757.619.536	-	-	-	67.838.420.978
Jumlah	430.848.087.528	8.515.933.525	-	-	579.093.567	439.943.114.620
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(4.300.507.594)	(9.794.067)	-	-	(579.093.567)	(4.889.395.228)
Jumlah	426.547.579.934	8.506.139.458	-	-	-	435.053.719.392
	31 Desember 2011					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	160.737.316.454	8.937.286.581	-	-	-	169.674.603.035
Jasa-jasa Dunia Usaha	89.965.382.346	-	-	-	-	89.965.382.346
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	21.062.317.479	-	-	-	-	21.062.317.479
Industri Pengolahan	20.242.746.603	-	-	-	-	20.242.746.603
Konstruksi dan Real Estate	18.800.668.258	-	-	-	579.093.567	19.379.761.825
Perdagangan, Restoran dan Hotel	4.314.220.544	-	-	-	-	4.314.220.544
Lain-lain	14.987.498.074	978.411.131	-	-	-	15.965.909.205
Jumlah	330.110.149.758	9.915.697.712	-	-	579.093.567	340.604.941.037
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(3.295.101.498)	(3.588.766)	-	-	(579.093.567)	(3.877.783.831)
Jumlah	326.815.048.260	9.912.108.946	-	-	-	336.727.157.206

8. Piutang - lanjutan

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit:		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	711.334.683	24.063.202.974
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	40.199.558.862	34.086.950.066
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	363.903.104.655	258.801.036.433
Lebih dari 5 Tahun	35.129.116.420	23.653.751.564
Jumlah	439.943.114.620	340.604.941.037
Penyisihan Kerugian	(4.889.395.228)	(3.877.783.831)
Jumlah	435.053.719.392	336.727.157.206

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	15.972.818.320	29.671.401.255
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	88.197.098.341	48.790.692.017
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	313.802.965.624	238.489.096.201
Lebih dari 5 Tahun	21.970.232.335	23.653.751.564
Jumlah	439.943.114.620	340.604.941.037
Penyisihan Kerugian	(4.889.395.228)	(3.877.783.831)
Jumlah	435.053.719.392	336.727.157.206

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Murabahah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	3.877.783.831	1.067.835.040
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.923.483.032	2.809.948.791
Pemulihan Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(911.871.635)	
Jumlah	4.889.395.228	3.877.783.831

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang *murabahah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

f. Informasi Penting Lainnya:

- Piutang *murabahah* kepada pihak berelasi yaitu karyawan kunci Bank masing-masing sebesar Rp 28.580.899 dan Rp 129.126.018 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Piutang ini dipergunakan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atas surat kuasa memasang hak tanggungan atas surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan pembiayaan disajikan pada catatan 19 b.

8. Piutang - lanjutan

f. Informasi Penting Lainnya - lanjutan:

- Tingkat marjin keuntungan piutang untuk murabahah berkisar antara sebesar 10,5% - 16% dan 11,88% - 13,40% per tahun pada tahun 2012 dan 2011.
- Tidak ada piutang yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
- Rasio piutang *non performing - gross* dan net pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 0,10% dan 0,05% dan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 0,17% dan 0,00%.

9. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2012					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan, Restoran dan Hotel	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	126.023.572.198	-	-	-	-	126.023.572.198
Jasa-jasa Sosial / Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	126.023.572.198	-	-	-	-	126.023.572.198
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(1.260.235.722)	-	-	-	-	(1.260.235.722)
Jumlah	124.763.336.476	-	-	-	-	124.763.336.476

	31 Desember 2011					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-
Konstruksi dan Real Estate	-	-	-	-	-	-
Perdagangan, Restoran dan Hotel	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
Jasa-jasa Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	13.040.583.579	-	-	-	-	13.040.583.579
Jumlah	13.040.583.579	-	-	-	-	13.040.583.579
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(130.405.836)	-	-	-	-	(130.405.836)
Jumlah	12.910.177.743	-	-	-	-	12.910.177.743

9. Pembiayaan *Mudharabah* - lanjutan

b. Berdasarkan Jenis

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pihak Berelasi	3.781.149.064	-
Pihak Ketiga	122.242.423.134	13.040.583.579
Jumlah	126.023.572.198	13.040.583.579
Penyisihan Kerugian	(1.260.235.722)	(130.405.836)
	124.763.336.476	12.910.177.743

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	-	13.040.583.579
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	-	-
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	126.023.572.198	-
Jumlah	126.023.572.198	13.040.583.579
Penyisihan Kerugian	(1.260.235.722)	(130.405.836)
	124.763.336.476	12.910.177.743

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	-	13.040.583.579
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	-	-
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	126.023.572.198	-
Jumlah	126.023.572.198	13.040.583.579
Penyisihan Kerugian	(1.260.235.722)	(130.405.836)
Jumlah	124.763.336.476	12.910.177.743

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Mudharabah*

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	130.405.836	-
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.320.774.614	130.405.836
Reklasifikasi Kredit	(190.944.728)	-
Jumlah	1.260.235.722	130.405.836

9. Pembiayaan *Mudharabah* - lanjutan

f. Informasi Penting Lainnya

- (i) Persentase imbal hasil pembiayaan *mudharabah* per tahun berkisar antara 10,50% sampai dengan 12,00% untuk tahun 2012 dan 9,00% sampai dengan 11,50% untuk tahun 2011.
- (ii) Rasio non performing - gross dan net pembiayaan *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 0,00% dan per tanggal 31 Desember 2011 masing-masing sebesar 0,00%.

10. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2012					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	36.250.000.000	-	-	-	-	36.250.000.000
Industri Pengolahan	132.600.000.000	-	-	-	-	132.600.000.000
Konstruksi	19.437.002.800	-	-	-	-	19.437.002.800
Perdagangan, Restoran dan Hotel	10.096.666.670	-	-	-	-	10.096.666.670
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8.459.967.688	-	-	-	-	8.459.967.688
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	134.985.478.080	-	-	-	-	134.985.478.080
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	341.829.115.238	-	-	-	-	341.829.115.238
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(2.211.741.152)	-	-	-	-	(2.211.741.152)
Jumlah	339.617.374.086	-	-	-	-	339.617.374.086

	31 Desember 2011					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	37.500.000.000	-	-	-	-	37.500.000.000
Industri Pengolahan	86.450.000.000	-	-	-	-	86.450.000.000
Konstruksi	15.600.000.000	-	-	-	-	15.600.000.000
Perdagangan, Restoran dan Hotel	3.205.000.000	-	-	-	-	3.205.000.000
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
Jasa-Jasa Dunia Usaha	9.136.810.293	-	-	-	-	9.136.810.293
Lain-lain	40.865.917.170	-	-	-	-	40.865.917.170
Jumlah	194.757.727.463	-	-	-	-	194.757.727.463
Dikurangi:						-
Penyisihan Kerugian	(981.527.275)	-	-	-	-	(981.527.275)
Jumlah	193.776.200.188	-	-	-	-	193.776.200.188

10. Pembiayaan *Musyarakah* - lanjutan

b. Berdasarkan Jenis

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pihak Berelasi	1.085.471.900	-
Pihak Ketiga	340.743.643.338	194.757.727.463
Jumlah	341.829.115.238	194.757.727.463
Penyisihan Kerugian	(2.211.741.152)	(981.527.275)
Jumlah	339.617.374.086	193.776.200.188

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	184.379.060.782	125.837.388.527
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	32.739.322.677	40.500.000.000
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	124.710.731.779	28.420.338.936
Lebih dari 5 Tahun	-	-
Jumlah	341.829.115.238	194.757.727.463
Penyisihan Kerugian	(2.211.741.152)	(981.527.275)
Jumlah	339.617.374.086	193.776.200.188

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo:		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	214.879.060.782	125.837.388.527
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	12.306.762.974	40.500.000.000
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	114.643.291.482	28.420.338.936
Jumlah	341.829.115.238	194.757.727.463
Penyisihan Kerugian	(2.211.741.152)	(981.527.275)
Jumlah	339.617.374.086	193.776.200.188

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	981.527.275	478.000.000
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.940.170.663	503.527.275
Reklasifikasi dari Kredit	(709.956.787)	-
Jumlah	2.211.741.152	981.527.275

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

10. Pembiayaan *Musyarakah* - lanjutan

e. Informasi Penting Lainnya:

- (i). Persentase bagi hasil pembiayaan *musyarakah* Rupiah berkisar antara 10,50% hingga 12,00% untuk tahun 2012 dan untuk tahun 2011 adalah sebesar 10,25% hingga 12,00% per tahun.
- (ii). Rasio *non performing - gross* dan pembiayaan-*nett musyarakah* pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 0,00% dan 0,00% dan untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 0,00% dan 0,00%.

11. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Tanah dan Bangunan	89.940.417.391	103.347.866.799
Kendaraan Bermotor	62.370.419.677	67.727.124.182
Mesin	9.838.797.893	11.869.829.868
Jumlah	162.149.634.961	182.944.820.849
Akumulasi Penyusutan	(62.254.060.654)	(50.510.091.244)
Nilai Bersih	99.895.574.307	132.434.729.605

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/9/PBI/2007 pasal 39 ayat 3 dan 4, pembentukan penyisihan kerugian aset tidak berlaku untuk aset produktif dengan transaksi sewa berupa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

12. Aset Tetap

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp 1.369.757.866 dan Rp 1.306.164.793 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011.

Aset tetap kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, pesawat udara, dan huru hara serta bencana alam pada PT Asuransi Central Asia dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 18.356.000.000 dan Rp 18.552.000.000, Manajemen berpendapat bahwa jumlah tanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

12. Aset Tetap

	31 Desember 2012			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Pemilikan Langsung				
Tanah	4.807.625.000	779.218.164	2.193.000.000	3.393.843.164
Bangunan	4.841.347.563	315.692.203	414.500.000	4.742.539.766
Inventaris I	1.944.660.413	984.329.606	287.065.848	2.641.924.171
Inventaris II	8.223.398.455	363.072.730	-	8.586.471.185
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	27.113.636	59.350.000
	19.903.495.067	2.442.312.703	2.921.679.484	19.424.128.286
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	1.469.700.000	-	-	1.469.700.000
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	4.039.087.011	119.133.785	101.897.976	4.056.322.820
Inventaris I	1.712.626.232	834.209.118	47.738.400	2.499.096.950
Inventaris II	6.367.540.180	-	-	6.367.540.180
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	27.113.636	59.350.000
	12.205.717.059	953.342.903	176.750.012	12.982.309.950
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	728.726.250	416.415.000	-	1.145.141.250
Nilai Buku	<u>8.438.751.758</u>			<u>6.766.377.086</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah)

12. Aset Tetap - lanjutan

	31 Desember 2011			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Pemilikan Langsung				
Tanah	4.807.625.000	-	-	4.807.625.000
Bangunan	4.841.347.563	-	-	4.841.347.563
Inventaris I	1.780.583.224	265.187.456	101.110.267	1.944.660.413
Inventaris II	7.406.084.521	1.237.867.816	420.553.882	8.223.398.455
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	-	86.463.636
	18.922.103.944	1.503.055.272	521.664.149	19.903.495.067
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	1.469.700.000	-	-	1.469.700.000
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	3.797.019.735	242.067.276	-	4.039.087.011
Inventaris I	1.684.179.396	137.279.112	108.832.276	1.712.626.232
Inventaris II	6.261.774.913	510.403.405	404.638.138	6.367.540.180
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	-	86.463.636
	11.829.437.680	889.749.793	513.470.414	12.205.717.059
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	312.311.250	416.415.000	-	728.726.250
Nilai Buku	<u>8.250.055.014</u>			<u>8.438.751.758</u>

13. Aset Lain-lain

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	6.928.233.017	6.818.335.549
Biaya Dibayar Dimuka	2.915.159.729	4.977.630.909
Persediaan Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor	796.888.745	813.249.803
Lain-lain	476.120.846	1.402.977.633
Jumlah	11.116.402.336	14.012.193.894

14. Kewajiban Segera

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Uang Muka Atas Penjualan Aset Tetap	4.723.570	2.708.751.370
Kliring Retail	414.095.817	765.394.000
Titipan Setoran	602.580.164	540.637.284
Kewajiban Bagi hasil Deposito Berjangka	16.429.341	42.246.077
Lain-lain	123.240.755	143.101.569
Jumlah	1.161.069.647	4.200.130.300

15. Simpanan Nasabah

a. Berdasarkan jenis dan simpanan nasabah terdiri dari :

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Giro Wadiah		
Dari Bukan bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	143.226.994.287	106.111.794.600
Dari Bank		
Pihak Berelasi		
PT Bank Central Asia Tbk	2.074.924.456	-
Pihak Ketiga	70.305.801	764.878.203
Sub Jumlah Giro Wadiah	145.372.224.544	106.876.672.803
Tabungan Wadiah		
Dari bukan bank		
Pihak Berelasi	164.497.382	-
Pihak Ketiga	89.420.990.275	42.515.546.022
Sub Jumlah Tabungan Wadiah	89.585.487.657	42.515.546.022
Jumlah	234.957.712.201	149.392.218.825

15. Simpanan Nasabah - lanjutan

b. Tingkat bonus simpanan wadiah dan nisbah rata-rata per tahun:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	(%)	(%)
Giro Wadiah	0,67	1,50
Tabungan Wadiah	1,63	2,62

c. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 diubah menjadi maksimum Rp 2.000.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

16. Perpajakan

a. Hutang Pajak

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
PPh Pasal 29	1.192.894.500	713.145.750
PPh Pasal 25	187.086.000	-
PPh Pasal 21	225.096.288	557.262.344
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	956.604.924	609.345.087
PPh Lainnya	6.500.595	9.703.653
Pajak Pertambahan Nilai	19.007.599	34.394.266
Jumlah	2.587.189.906	1.923.851.100

16. Perpajakan - lanjutan

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Kini	(2.821.957.500)	(2.305.269.750)
Tangguhan	221.105.014	127.561.332
Jumlah	(2.600.852.486)	(2.177.708.418)

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran laba fiskal Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan sesuai dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif	10.960.778.016	8.950.479.010
Beda waktu :		
Cadangan Pesangon/Realisasi Pembayaran		
Imbalan Pasca Kerja	141.439.176	(334.651.758)
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan Tahun 2010	(142.476.408)	(119.847.545)
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	(8.850.000)	(16.516.900)
Cadangan Biaya Pembelian Souvenir	-	(23.240.000)
Cadangan Notaris Pengikatan/legal konversi	826.630	(32.400.000)
Cadangan Jasa Profesional	(44.195.796)	-
Cadangan Biaya Bonus	1.050.015.915	688.484.082
Pengembalian Pembayaran Pesangon Selama Tahun Berjalan	-	-
Beban (Pemulihan) Penyisihan Penghapusan Aset	(1.853.732.221)	(578.032.808)
Penyusutan Aset Tetap	(52.447.355)	(83.545.159)
Jumlah Beda Temporer	(909.420.059)	(499.750.088)

16. Perpajakan - lanjutan

c. Pajak Penghasilan Badan - lanjutan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Beda Tetap :		
Rugi Penghapusan Aset Tetap	(293.604.167)	(1.392.929)
Laba Surat Berharga	370.470.328	321.546.938
Biaya Kendaraan	-	252.923.044
Promosi	563.543.558	52.492.000
Makan Minum	83.154.718	-
Pajak Lainnya	169.733.863	(48.827.885)
<i>Entertainment</i>	79.214.290	49.856.955
Penyusutan Sewa Guna Usaha	-	208.207.500
Lainnya	263.960.125	(64.455.509)
Jumlah Beda Tetap	1.236.472.715	770.350.114
Laba Kena Pajak	11.287.830.000	9.221.079.036

Taksiran Pajak Penghasilan badan:

Tarif pajak 25% X Laba Kena Pajak	2.821.957.500	2.305.269.759
Jumlah	2.821.957.500	2.305.269.759

Pajak Penghasilan yang Dibayar Dimuka

Pajak Penghasilan Pasal 25	1.629.063.000	1.592.124.000
Pajak Penghasilan Kurang / (Lebih) Bayar	1.192.894.500	713.145.759

16. Perpajakan - lanjutan

d. Aset Pajak Tangguhan

	31 Desember 2010 Rp	Dibebankan Ke Laba Rugi Rp	31 Desember 2011 Rp	Dibebankan Ke Laba Rugi Rp	31 Desember 2012 Rp
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan					
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	580.519.789	6.717.628	587.237.417	463.433.055	1.050.670.472
Cadangan Pesangon	1.462.619.937	(83.662.940)	1.378.956.997	(35.359.794)	1.343.597.203
Penyusutan Aset Tetap	7.780.547	-	7.780.547	13.111.839	20.892.386
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	142.957.015	(29.961.886)	112.995.129	35.619.102	148.614.231
Cadangan Biaya Legal Action	56.312.500	(4.129.225)	52.183.275	2.212.500	54.395.775
Cadangan Premium Surat Berharga	-	80.386.735	80.386.735		80.386.735
Cadangan Biaya Bonus	465.375.000	172.121.021	637.496.021	(262.503.979)	374.992.042
Cadangan Biaya Pembelian Souvenir	5.810.000	(5.810.000)	-	-	-
Cadangan Notaris Pengikatan					
Legal Konversi	8.100.000	(8.100.000)	-	(206.658)	(206.658)
Cadangan Jasa Profesional	6.250.000	-	6.250.000	4.798.949	11.048.949
Efek Perubahan Tarif:			-		-
Cadangan Pesangon	(119.382.316)	-	(119.382.316)	-	(119.382.316)
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	(40.764.099)	-	(40.764.099)	-	(40.764.099)
	2.575.578.373	127.561.333	2.703.139.706	221.105.014	2.924.244.720
Laba Belum Direalisasi dari	(933.411.098)	(558.641.009)	(1.492.052.107)	5.119.518.668	3.627.466.561
Pemilikan Surat Berharga					
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	1.642.167.275	(431.079.676)	1.211.087.599	5.340.623.682	6.551.711.281

17. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha Bank, dibentuk sebagai berikut:

	31 Desember 2012		
	Kolektibilitas	Saldo	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Digunakan Kafalah	- -	- -	- -
			-
	31 Desember 2011		
	Kolektibilitas	Saldo	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Digunakan Kafalah	- Lancar	- 1.259.940.320	- 692.496
			692.496

Perubahan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	692.496	40.143.871
(Pemulihan) Penyisihan Selama Tahun Berjalan	(692.496)	(39.451.375)
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	-	-
Jumlah	-	692.496

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya transaksi komitmen dan kontinjensi serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

18. Kewajiban Lain-lain

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	5.657.267.165	5.515.827.989
Biaya yang Masih Harus Dibayar	6.368.254.849	4.324.150.701
Pendapatan Diterima Dimuka	2.451.401.666	1.993.562.353
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	1.784.533.102	1.578.989.972
Titipan Dana Sosial - Dana Kebajikan	736.785.444	335.477.512
Setoran Jaminan <i>Safe Deposit Box</i>	273.194.400	296.419.400
Titipan Dana Sosial - Zakat	26.470.596	9.433.286
Lainnya	685.894.665	124.308.138
Jumlah	17.983.801.887	14.178.169.351

19. Dana *Syirkah* Temporer

a. Berdasarkan jenisnya

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
<u>Investasi Tidak Terikat</u>		
Dari bukan bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak Berelasi	1.882.487.790	3.010.518.977
Pihak Ketiga	41.581.793.033	34.760.420.557
Sub Jumlah	43.464.280.823	37.770.939.534
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	7.222.328.080	11.503.101.746
Pihak Ketiga	978.324.645.813	663.995.027.287
Sub Jumlah	985.546.973.893	675.498.129.033
Dari bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	12.000.000.000	20.000.000.000
Sub Jumlah	12.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah Investasi Tidak Terikat	1.041.011.254.716	733.269.068.567
<u>Investasi Terikat</u>		
Dari bukan bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	-	2.238.000.000
Jumlah Investasi Terikat	-	2.238.000.000
	1.041.011.254.716	735.507.068.567

19. Dana *Syirkah* Temporer

a. Berdasarkan jenisnya, Dana *Syirkah* Temporer - lanjutan

Tabungan investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

b. Dana *Syirkah* Temporer yang diblokir dan/atau dijadikan jaminan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Investasi Tidak Terikat - Deposito Mudharabah	139.274.129.822	108.520.472.066
Investasi Terikat - Deposito Mudharabah	-	2.238.000.000
Jumlah	139.274.129.822	110.758.472.066

c. Investasi Tidak Terikat - Deposito *Mudharabah* Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Jangka Waktu</i>		
Sampai dengan 1 Bulan	815.861.745.102	608.635.109.506
Jangka Waktu 3 Bulan	161.641.688.718	81.915.294.392
Jangka Waktu 6 Bulan	14.478.540.072	4.947.725.135
Jangka Waktu 12 Bulan	5.565.000.000	-
Jumlah	997.546.973.892	695.498.129.033
	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo</i>		
Kurang dari atau Sama Dengan 1 Bulan	806.516.183.189	621.045.095.121
Lebih dari 1 Sampai Dengan 3 Bulan	166.920.262.714	69.809.313.113
Lebih dari 3 Sampai Dengan 6 Bulan	8.290.527.989	4.643.720.799
Lebih dari 6 Sampai Dengan 12 Bulan	15.820.000.000	-
Jumlah	997.546.973.892	695.498.129.033

d. Investasi Terikat - Deposito *Mudharabah* Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Jangka Waktu</i>		
Sampai dengan 1 Bulan	-	-
Jangka Waktu 3 Bulan	-	-
Jangka Waktu 6 Bulan	-	-
Jangka Waktu 12 Bulan	-	2.238.000.000
Jumlah	-	2.238.000.000

19. Dana *Syirkah* Temporer

d. Investasi Terikat - Deposito *Mudharabah* Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo</i>		
Kurang dari atau Sama Dengan 1 Bulan	-	-
Lebih dari 1 Sampai Dengan 3 Bulan	-	-
Lebih dari 3 Sampai Dengan 6 Bulan	-	310.000.000
Lebih dari 6 Sampai Dengan 12 Bulan	-	1.928.000.000
Jumlah	-	2.238.000.000

e. Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun :

	31 Desember 2012	
	Nasabah	Bank
	(%)	(%)
Tabungan Mudharabah	18	82
Deposito Mudharabah	38	62
	31 Desember 2011	
	Nasabah	Bank
	(%)	(%)
Tabungan Mudharabah	20	80
Deposito Mudharabah	40	60

20. Modal Saham

	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	296.299	99,9997%	296.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0003%	1.000.000
Jumlah	296.300	100,00%	296.300.000.000

Berdasarkan akta pendirian Bank No. 91 tanggal 21 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., telah ditetapkan modal dasar Bank sebesar Rp 30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000 saham.

Melalui akta perubahan No. 2 tanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., telah dilakukan perubahan modal dasar Bank menjadi Rp 150.000.000.000 yang terbagi atas 150.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. 02-8.694.HT.01.04.TH.97 tanggal 28 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%/ Selanjutnya melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., menyetujui penjualan satu saham kepada Tuan Franki Tjahyadikarta. Selemba saham tersebut kemudian dijual kembali kepada PT BCA Finance yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 16 Desember 2009. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada BI melalui surat No. 223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, berdasarkan surat no. 12/22/DPB3/TPB-3-6/RAHASIA, tanggal 11 Maret 2010.

Melalui Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank UIB No. 21 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 10 Agustus 2009 telah dilakukan perubahan modal dasar Bank menjadi Rp 950.000.000.000 yang terbagi atas 950.000 saham. Sehubungan dengan perubahan modal dasar tersebut PT Bank BCA Tbk telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 200.000.000.000 atau setara dengan 200.000 saham pada tanggal 11 Agustus 2009.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat No. 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yang mewajibkan Bank menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp 0 (nol rupiah). Mempertimbangkan hal ini, pemegang saham perseroan memutuskan untuk menyetujui penggunaan seluruh laba ditahan Bank tanggal 2 April 2010 sebesar Rp 53.837.790.810 dialokasikan ke cadangan umum sebesar Rp 37.790.810 dan dialokasikan ke penempatan saham baru sebanyak 53.800 saham dengan jumlah sebesar Rp 53.800.000.000 oleh PT Bank Central Asia, Tbk. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01.10-30741 tanggal 1 Desember 2010. Akta tersebut juga sudah dilaporkan kepada Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No.294/DIR/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan surat No. 105/SKHS/2010 tanggal 9 Desember 2010, surat ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat no. 12/2564/DPBs tanggal 17 Desember 2010.

21. Cadangan Umum

Melalui Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Bank UIB No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, SH., tanggal 20 April 2009, telah diputuskan untuk membentuk penyisihan cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan Perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat No. 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, SH., Cadangan Umum yang dibentuk sebesar Rp 137.790.810. Berdasarkan memo intern No. 045/MO/KEU/11 tanggal 31 Mei 2011, Bank telah menetapkan bahwa cadangan yang dibentuk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 bertambah sebesar Rp 112.290.190, sehingga seluruhnya berjumlah Rp

Pada tahun 2012, sesuai Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 122 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn., tanggal 27 April 2012, , Cadangan Umum yang dibentuk sebesar Rp 200.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 250.000.000 menjadi berjumlah Rp 450.000.000.

22. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pendapatan dari Jual Beli :		
Pendapatan dari Marjin <i>Murabahah</i>	41.809.282.107	29.635.326.761
Jumlah	41.809.282.107	29.635.326.761
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan <i>Ijarah</i>	54.135.740.995	63.161.913.389
Beban Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>	(39.931.162.558)	(43.394.837.163)
Jumlah	14.204.578.437	19.767.076.226
Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	8.970.110.038	3.798.491.011
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	22.734.805.867	9.499.506.842
Jumlah	31.704.915.905	13.297.997.853
Pendapatan Usaha Utama Lainnya		
Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	20.221.577.505	23.883.462.818
Pendapatan Bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syaria	7.976.104.861	7.827.588.889
Pendapatan Bagi Hasil dari Penempatan di Bank lain	1.069.511.283	228.099.932
Jumlah	29.267.193.649	31.939.151.639
Jumlah	116.985.970.098	94.639.552.479

Jumlah pendapatan yang diperoleh dari pihak berelasi pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 67.178.324 dan nihil.

23. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
<u>Dari Investasi Tidak Terikat</u>		
Bukan bank		
Pihak Berelasi	35.574.373	-
Pihak Ketiga	951.136.463	1.269.604.860
Sub Jumlah	986.710.836	1.269.604.860
Bank		
Pihak Berelasi	75.879.421	-
Pihak Ketiga	48.867.134.179	31.604.121.564
Sub Jumlah	48.943.013.600	31.604.121.564
Bukan bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	433.538.664	591.535.919
Sub Jumlah	433.538.664	591.535.919
	50.363.263.100	33.465.262.343
<u>Dari Investasi Terikat</u>		
Bukan bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	-	3.170.818.959
	-	3.170.818.959
Jumlah	50.363.263.100	36.636.081.302

24. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Pendapatan Komisi		
Pendapatan Komisi <i>Real Time Gross Settlement</i>	3.804.320.454	1.269.409.091
Pendapatan Komisi Safe Deposit Box	181.250.000	173.050.000
Pendapatan Komisi Asuransi	151.560.956	119.269.165
Pendapatan Komisi Pengiriman Uang	107.076.500	93.122.105
Pendapatan Komisi Bank Garansi	10.288.966	72.795.375
Pendapatan Komisi Kliring	18.224.525	23.376.000
Pendapatan Komisi Lainnya	76.609.684	53.502.991
Jumlah	4.349.331.085	1.804.524.727
Pemulihan Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non Produktif		
Kredit yang Diberikan	2.430.757.980	809.094.962
Piutang dan Pembiayaan	1.925.605.600	191.932.578
Penempatan pada Bank Lain	96.640.702	-
Rekening Administratif	692.496	39.451.375
Surat Berharga	2.526.462.543	15.473.033
Jumlah	6.980.159.321	1.055.951.948
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Administrasi Bank	2.918.305.976	1.951.820.424
Laba Penjualan Surat-Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	-	126.500.000
Laba Penjualan Cek	33.980.025	35.034.500
Pendapatan <i>Ta'widh</i>	1.994.012	10.384.382
Lain-lain	179.885.965	167.515.693
Jumlah	3.134.165.977	2.291.254.999
	14.463.656.383	5.151.731.674

Pendapatan dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 3.804.320.454 dan Rp 1.269.409.091 atas pendapatan *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

25. Beban Tenaga Kerja

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Gaji dan Uang Lembur	26.665.972.638	22.312.519.961
Tunjangan Karyawan	9.210.516.830	6.859.402.024
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	1.250.947.263	1.994.284.164
Pendidikan Karyawan	1.046.841.376	1.170.040.000
Premi Program Dana Pesangon	600.000.000	-
Uang Makan dan Transport	87.110.500	81.993.500
Perjalanan Dinas	-	10.705.000
Lain-lain	177.406.422	325.999.839
Jumlah	39.038.795.029	32.754.944.488

26. Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Murabahah	1.923.483.032	2.809.948.791
Ijarah	242.763.189	-
Musarakah	1.940.170.666	503.527.275
Mudharabah	1.320.774.614	130.405.836
Surat Berharga	2.508.978.456	845.866.446
Giro pada Bank Lain	561.640.722	44.149.760
Qardh	462.833	265.667
Jumlah	8.498.273.512	4.334.163.775

27. Beban Umum dan Administrasi

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Barang dan Jasa	11.311.961.326	9.239.543.379
Biaya Sewa Gedung dan Kendaraan	1.910.406.218	1.604.226.743
Penyusutan	1.369.787.903	1.306.164.794
Pemeliharaan dan Perbaikan	1.634.514.110	1.084.495.679
Promosi	1.203.261.557	805.817.495
Pajak Bumi dan Bangunan dan Lain-lain	663.620.387	92.436.476
Biaya Premi Asuransi	47.983.835	42.027.802
Jumlah	18.141.535.336	14.174.712.368

28. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Pendapatan Non Usaha		
Laba Penjualan Aset	24.843.081	33.847.649
Lain-lain	14.276.506	45.994.474
	39.119.587	79.842.123
Beban Non Usaha		
Kerugian Penjualan Aset	45.602.023	7.966.958
Kerugian Penjualan Surat Berharga	-	46.750.000
Lain-lain	77.005.550	39.171.131
	122.607.573	93.888.089
Jumlah	(83.487.986)	(14.045.966)

29. Komitmen dan Kontijensi

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Digunakan	-	-
Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
a. Pembiayaan Mudharabah	8.576.421.827	36.840.500.000
b. Pembiayaan Musyarakah	107.071.852.140	38.198.383.967
Jumlah Komitmen	115.648.273.967	75.038.883.967
Kontijensi		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan yang akan diterima dari		
Pembiayaan (Non Lancar)	3.581.207.972	263.881.582
Lainnya	708.430.458	3.139.184.474
Kewajiban Kontinjensi		
Bank Garansi yang Diberikan kepada Nasabah	81.355.560	1.259.940.320
Jumlah Kontijensi	4.208.282.870	2.143.125.736
Jumlah Komitmen dan Kontijensi	111.439.991.097	72.895.758.231

30. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja

Bank telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Perubahan penyisihan imbalan kerja yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Saldo Awal	5.515.827.989	5.850.479.747
Penyisihan Pesangon Selama Tahun Berjalan	1.850.947.263	1.994.284.164
Pengembalian Pembayaran Pesangon Selama Tahun Berjalan	-	-
Iuran yang dibayarkan ke Aset Program	(600.000.000)	-
Pembayaran Selama Tahun Berjalan	(1.109.508.087)	(2.328.935.922)
Saldo Akhir	5.657.267.165	5.515.827.989

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dihitung oleh Aktuaris Independen PT Sakura Aktualita Indonesia berdasarkan laporan No.3203/SAI/DS/XI/12 dan No.1939/SAI/DS/I/12. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Tingkat Diskonto	8,00%	9,30%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	5,00%	6,50%
Tingkat Mortalita	100,00%	100,00%
	dari tabel CSO 80	dari tabel CSO 80
Tingkat Cacat	9% dari tingkat	8% dari tingkat
	asumsi mortalita	asumsi mortalita
Usia Pensiun	55 tahun	55 tahun

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Beban Jasa Kini	1.190.744.342	1.077.564.371
Beban Bunga	595.282.951	765.866.558
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	32.964.262	53.084.260
Biaya Jasa Lalu	31.955.708	31.955.708
Tambahan Beban atas Kekurangan Kewajiban Awal	-	65.813.267
Jumlah Beban Imbalan Kerja	1.850.947.263	1.994.284.164

30. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja - lanjutan

Perubahan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	5.515.827.989	5.850.479.747
Koreksi Saldo Awal	-	-
Pembayaran Pesangon dan Penghargaan Tahun Berjalan	(1.109.508.087)	(2.328.935.922)
Pengembalian Pembayaran Pesangon Selama Tahun Berjalan	-	-
Penambahan Tahun Berjalan	1.250.947.263	1.994.284.164
Saldo Akhir	5.657.267.165	5.515.827.989

31. Manajemen Risiko

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 serta PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun pedoman yang telah dituangkan ke dalam suatu Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) BCA Syariah pada saat akan beroperasinya di bulan April 2009 dengan tujuan :

- a. Menyamakan persepsi dalam memandang resiko, sehingga resiko yang dihadapi Bank BCA Syariah bisa diidentifikasi, diukur, diperbandingkan dan dikelola secara benar.
- b. Menekankan kewajiban pengelolaan risiko oleh setiap unit kerja.
- c. Meyakinkan bahwa semua risiko yang signifikan dapat dikendalikan dengan baik.

Penerapan manajemen risiko BCA Syariah secara terpadu dengan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan stakeholder value sesuai dengan risk appetite dan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Gagi Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia.

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko tersebut berupa:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- d. pengendalian internal.

Bank BCA Syariah melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko kepatuhan. Hal tersebut lebih karena BCA Syariah sebagai anak perusahaan dari PT Bank BCA Tbk, juga mempunyai kewajiban untuk mengirimkan data kepada induk perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaannya.

Struktur organisasi Bank BCA Syariah telah mencerminkan pengelolaan manajemen risiko yang terpusat dan independen, yaitu dengan dibentuknya Komite Manajemen Risiko (KMR) yang bertanggung jawab kepada Direksi dan Departemen Manajemen Risiko (MRK) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

31. Manajemen Risiko - lanjutan

Wewenang dari Komite Manajemen Risiko adalah mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi dan misi dari Komite Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.

Adapun fungsi dari Komite Manajemen Risiko ini adalah:

- a. Menyusun kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Bank juga telah memiliki serangkaian prosedur dan metodologi untuk melakukan identifikasi dan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank, namun dengan berjalannya waktu Bank perlu melakukan penyempurnaan atau review terhadap prosedur dan metodologi yang telah disusun, agar prosedur dan metodologi tersebut dapat mencerminkan kondisi pengelolaan resiko Bank yang sebenarnya.

Risiko Kredit

Terkait dengan pengelolaan risiko kredit, bank telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai pembiayaan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB)
- b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
- c. Manual Pembiayaan Konsumtif
- d. Manual Pembiayaan Produktif
- e. Kebijakan Penilaian Kualitas Penyisihan Penghapusan Aktiva
- f. Kebijakan Penyelamatan dan Penghapusan Pembiayaan
- g. Wewenang Memutus Pembiayaan

Dengan telah dimilikinya kebijakan Bank tersebut diatas, maka diharapkan Bank dapat mengoptimalkan kualitas pengelolaan resiko kredit melalui proses yang memadai, kecukupan agunan yang telah ditetapkan dan penetapan risk appetite Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

Risiko Pasar

BCA Syariah saat ini belum menjadi Bank Devisa, sehingga Bank belum secara langsung terkena dampak risiko pasar, namun Bank tidak terlepas dari risiko suku bunga walaupun dalam prakteknya BCA Syariah baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran pembiayaan tidak menggunakan suku bunga tapi nasabah yang dijangkau BCA Syariah bukan hanya nasabah yang loyalis kepada Bank Syariah melainkan nasabah yang berorientasi kepada suku bunga, sehingga apabila BCA Syariah dalam pemberian tingkat pembagian imbal hasilnya tidak kompetitif dengan rata-rata suku bunga yang berlaku dipasar, maka kemungkinannya nasabah-nasabah tersbut akan keluar dari BCA Syariah.

31. Manajemen Risiko - lanjutan

Risiko Likuiditas

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko likuiditas, yaitu:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- b. Metodologi Dalam Manajemen Risiko Likuiditas
- c. Kebijakan Tresuri

Tujuan dari manajemen likuiditas adalah memelihara posisi aset likuid secara optimal dan Bank dapat memenuhi seluruh kewajiban kontraktual dan ketentuan kewajiban keuangan, termasuk saat kondisi Bank sedang kritis. Untuk memenuhi kewajiban Bank kepada para nasabah dan *counterparties* seerta menyediakan kebutuhan likuiditas untuk transaksi operasionalnya, maka Bank saat ini sedang melakukan pemeliharaan dalam posisi *secondary reserves* pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah.

Risiko Operasional

Untuk pengelolaan risiko operasionalnya Bank telah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- b. Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Sentra Operasi
- c. Ketentuan Limit Fiat Bayar, *Override* dan Otorisasi Transaksi di Aplikasi Pembiayaan.
- d. Manual Produk Dana
- e. Manual Kerja CSO
- f. Manual Kerja Teller
- g. Dan manual kerja lainnya

Mekanisme kontrol dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi yang semuanya tercantum dalam manual kerja Bank. Bank juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) untuk melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kepatuhan karyawannya atas prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Pembatasan akses sistem juga telah diterapkan secara berjenjang melalui mekanisme pembatasan limit dengan menggunakan *user id* dan *password* serta penerapan *restricted area* pada ruang pemrosesan data transaksi baik dikantor cabang maupun pusat.

Dalam rangka untuk meningkatkan *Risk Awareness* ke seluruh jenjang organisasi Bank khususnya untuk risiko operasional, maka telah dilakukan training internal mengenai pengenalan risiko operasional dan diharapkan setelah mengikuti training tersebut pemahaman akan risiko operasional akan lebih meningkat lagi.

Risiko Kepatuhan

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan, yaitu:

- a. Kebijakan Kepatuhan
- b. Pedoman Penerapan Program APU dan PPT
- c. Manual *Good Corporate Governance*

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, maka Bank telah melakukan beberapa sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai:

- a. Penerapan Program APU dan PPT
- b. Pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)
- c. Pengkinian data nasabah
- d. Kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal
- e. Database teroris yang diterima dari PBB setiap 6 (enam) bulan sekali

31. Manajemen Risiko - lanjutan

Risiko Lainnya

Risiko lainnya yang dimaksud disini adalah risiko strategik, risiko hukum dan risiko reputasi yang harus dikelola oleh Bank dan untuk saat ini ketiga risiko tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Bank, namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketiga risiko tersebut, Bank telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko strategik, risiko hukum dan risiko reputasi.

32. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 7% pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Beban premi penjaminan Pemerintah selama tahun 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 1.935.039.975 dan Rp 1.306.155.667.

33. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Menurut manajemen, transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada pengurus Bank sebagai suatu fasilitas jabatan.

Sehubungan dengan akuisisi pada tanggal 12 Juni 2009, transaksi antara Bank dengan PT Bank BCA Tbk dan anak perusahaannya diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Aset		
Giro pada Bank Lain		
Pemegang Saham Bank	1.482.593.414	4.932.765.510
Murabahah		
Pejabat Eksekutif	28.580.900	129.126.018
Mudharabah		
Pejabat Eksekutif	3.781.149.064	-
Musyarakah		
Pejabat Eksekutif	1.085.471.900	-
Jumlah Piutang / Pembiayaan yang Diberikan	4.895.201.864	129.126.018

33. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Kewajiban		
Simpanan		
Giro Wadiah		
Pemegang Saham Bank	2.074.924.456	-
Jumlah Giro Wadiah	2.074.924.456	-
Tabungan Wadiah		
Pejabat Eksekutif	164.497.382	-
Jumlah Tabungan Wadiah	164.497.382	-
Jumlah Simpanan	2.239.421.838	-
Dana Syirkah Temporer		
Deposito Mudharabah		
Pemegang Saham Bank	-	-
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	7.222.328.080	11.503.101.746
Tabungan Mudharabah		
Pemegang Saham Bank	-	-
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	1.882.487.790	3.010.518.977
Jumlah Dana Syirkah Temporer	9.104.815.870	14.513.620.723
 Persentase Terhadap Jumlah Aset		
Piutang / Pembiayaan yang diberikan	0,31%	0,01%
 Persentase Terhadap Jumlah Kewajiban		
Giro Wadiah	0,8080%	0,0000%
Tabungan Wadiah	0,0641%	0,0000%
 Persentase Terhadap Jumlah Dana Syirkah Temporer		
Deposito Mudharabah	0,69%	1,61%
Tabungan Mudharabah	0,18%	0,41%

34. Rasio Likuiditas

	2012 (Dalam Jutaan Rupiah)						
	Nilai Tercatat	Tidak Memiliki Kontrak Jatuh Tempo	Sampai dengan 1 Bulan	1 Sampai dengan 3 Bulan	3 Sampai dengan 6 Bulan	6 Bulan dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	5.896	-	5.896	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	58.780	-	58.780	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	258.000	-	258.000	-	-	-	-
Giro pada Bank Lain	1.483	-	1.483	-	-	-	-
Deposito Pada Bank Lain	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Efek-efek	206.886	750	-	-	53.210	42.174	110.752
Piutang Murabahah	439.943	-	116	320	1.477	14.060	423.970
Piutang Qardh	46	-	-	2	8	18	18
Pembiayaan Mudharabah	126.024	-	-	-	-	-	126.024
Pembiayaan Musyarakah	341.829	-	5.000	40.695	81.847	87.337	126.950
Ijarah	99.896	-	-	-	4.776	4.344	90.776
Aktiva Lain-lain	24.435	15.519	6.928	-	-	-	1.988
Sub Jumlah	1.613.217	16.269	386.203	41.017	141.318	147.933	880.478
Pendapatan Ditangguhkan	-						
Penyisihan Penghapusan	(11.036)						
Jumlah	1.602.181						
 Kewajiban							
Kewajiban Segera	1.161	1.161	-	-	-	-	-
Simpanan dari Nasabah							
Giro	145.372	-	145.372	-	-	-	-
Tabungan	89.585	-	89.585	-	-	-	-
Simpanan dari Bank Lain	-						
Pinjaman Diterima	104	-	-	-	104	-	-
Kewajiban Lain-lain	17.984	-	17.984	-	-	-	-
Dana Syirkah Temporer	-						
Tabungan Mudharabah	43.464	-	43.464	-	-	-	-
Deposito Mudharabah	997.548	-	849.066	132.988	9.929	5.565	-
Sub Jumlah	1.295.218	1.161	1.145.471	132.988	10.033	5.565	-
Perbedaan Jatuh Tempo	317.999		(759.268)	(91.971)	131.284	142.368	880.478
Posisi Selisih	306.963						
	1.602.181						

34. Rasio Likuiditas - lanjutan

	2011 (Dalam Jutaan Rupiah)						
	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	Sampai dengan 1 Bulan	1 Sampai dengan 3 Bulan	3 Sampai dengan 6 Bulan	6 Bulan dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	9.553	-	9.553	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	39.850	-	39.850	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	237.800	-	237.800	-	-	-	-
Giro pada Bank Lain	4.983	-	4.983	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-					
Investasi pada Surat Berharga	227.601	-	-	-	10.084	-	217.517
Piutang Murabahah	340.605	-	370	146	2.971	25.175	311.943
Piutang Qardh	26	-	-	1	2	15	8
Pembiayaan Mudharabah	13.041	-	-	-	-	-	13.041
Pembiayaan Musyarakah	194.758	-	4.000	27.583	83.255	11.000	68.920
Ijarah	132.435	-	35	-	-	2.330	130.070
Aset Lain-lain	23.662	-	16.457	4.066	5	-	3.134
Sub Jumlah	1.224.314	-	313.048	31.796	96.317	38.520	744.633
Pendapatan Ditangguhkan	-						
Penyisihan Penghapusan	(7.216)						
Jumlah	1.217.098						
Kewajiban							
Kewajiban Segera							
Simpanan dari Nasabah	106.112	-	106.112	-	-	-	-
	42.515	-	42.515	-	-	-	-
Simpanan dari Bank Lain	20.765	-	20.765	-	-	-	-
Pinjaman Diterima	521	-	-	-	-	-	521
Kewajiban Lain-lain	17.984	-	17.984	-	-	-	-
Dana Syirkah Temporer		-					
	37.771	-	37.771	-	-	-	-
	677.736	-	621.792	50.882	3.134	1.928	-
Sub Jumlah	903.404	-	846.939	50.882	3.134	1.928	521
Perbedaan Jatuh Tempo	320.910	-	(533.891)	(19.086)	93.183	36.592	744.112
Posisi Selisih	313.694						
	1.217.098						

35. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang KPMM bank umum yang menjalankan prinsip syariah. Pada tanggal 27 Pebruari 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.8/7/PBI/2006 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005.

	31 Desember 2012 (Dalam Jutaan) Rp	31 Desember 2011 (Dalam Jutaan) Rp
Modal Inti	299.142	302.633
Modal Pelengkap	9.447	5.825
Jumlah Modal Inti dan Pelengkap	308.589	308.458
Penyertaan	-	-
Jumlah Modal	308.589	308.458
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	980.624	671.428
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	31,47%	45,94%

36. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No. 001/DPS/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dan No. 001/DPS/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No. 002/MO/DPS/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

37. Kondisi Ekonomi

Kegiatan usaha Bank mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimasa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, tindakan yang berada di luar kendali Bank.

38. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2013.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally blank

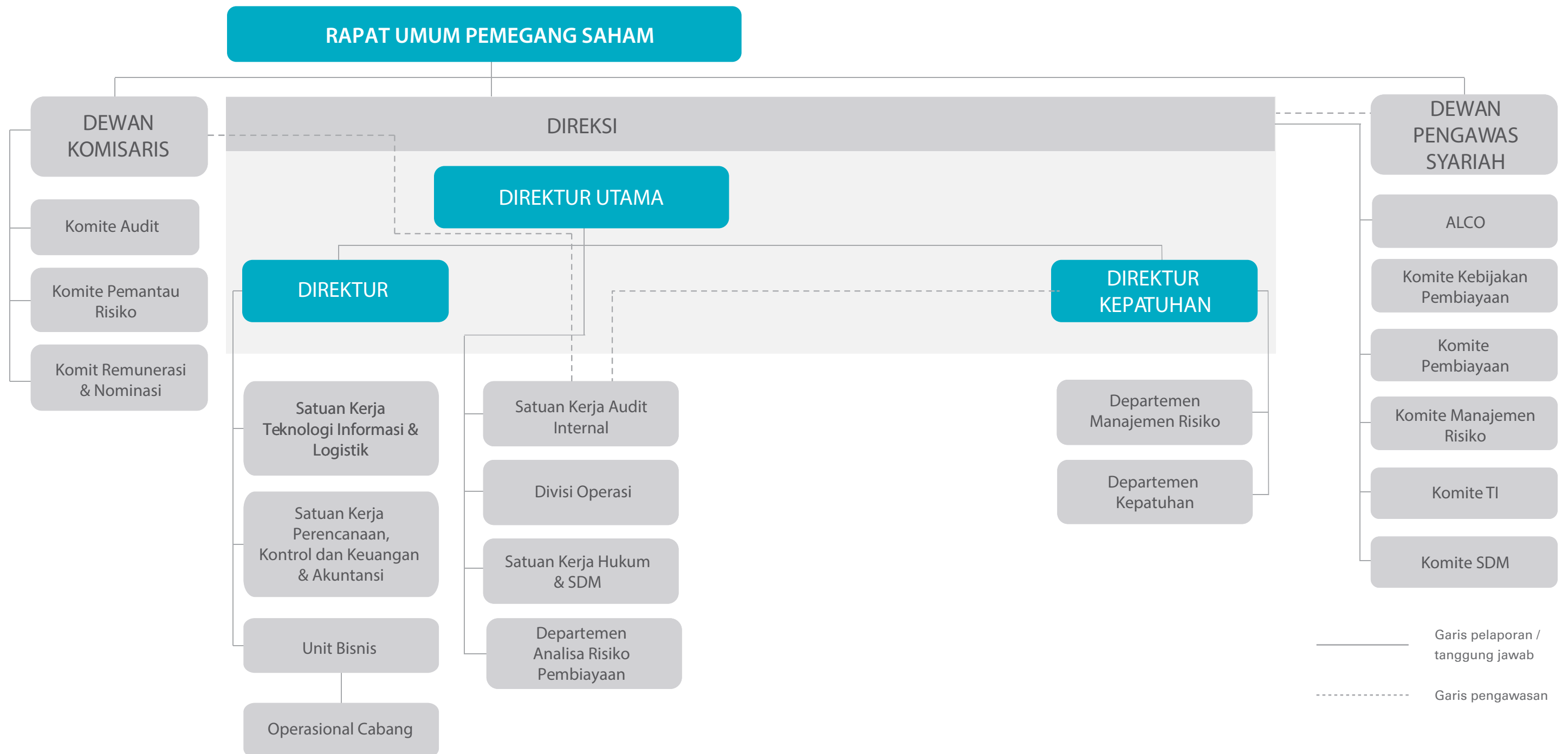
6

- STRUKTUR ORGANISASI
- PROFIL DEWAN KOMISARIS
- PROFIL DEWAN DIREKSI
- PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
- PROFIL KOMITE AUDIT
- PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO
- PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
- KOMISARIS, DIREKSI DAN PEJABAT BCA SYARIAH
- INFORMASI PEMEGANG SAHAM
- INFORMASI KELOMPOK USAHA
- PRODUK DAN LAYANAN
- JARINGAN KANTOR

DATA PERUSAHAAN



STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL DEWAN KOMISARIS



Iwan Kusumobagio

Iwan Kusumobagio menjabat sebagai Komisaris Utama BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk mulai sebagai Pimpinan Kantor Cabang, Kepala Kantor Wilayah XIII, VIII dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik Kantor Pusat. Beliau adalah lulusan Sarjana Akuntansi *University Of San Francisco* (1980-1984) dan gelar S2 di *Golden Gate University*



Surja Widjaja

Surja Widjaja menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah II (2001-2005). Beliau adalah lulusan Universitas Gajayana Malang fakultas Ekonomi Manajemen.



H. Suhartono

H Suhartono menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Cabang Utama DI Yogyakarta (2003-2008). Beliau memperoleh gelar MM dari Universitas Muhammadiyah bidang Ekonomi / Manajemen

PROFIL DIREKSI



Yana Rosiana

Yana Rosiana menjabat sebagai Direktur Utama BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Beliau bertanggung jawab atas Audit, Operasional, Sumber Daya Manusia dan Hukum serta Analisa Risiko Pembiayaan. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah, beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah IX (2000-2008). Beliau adalah lulusan STIE Perbanas Surabaya.



John Kosasih

John Kosasih menjabat sebagai Direktur BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan cabang dan bisnis, perencanaan keuangan dan akuntansi serta pengembangan teknologi informasi dan logistik. Sebelum bergabung di BCA Syariah beliau memegang berbagai jabatan manajerial di PT Bank BCA, Tbk (2005-2008) sebagai *Senior Advisor*, Ketua Tim *Personal Banking* dan sebelumnya sebagai Konsultan Strategi Pemasaran. Sebelum bergabung dengan PT Bank BCA, Tbk, beliau pernah bekerja di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2000-2005) memegang beberapa jabatan manajerial puncak dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Consumer Mass Market* (DSP). Beliau pernah bekerja di PT Bank Risjad Salim International sebagai ketua Koordinator Pusat dan anggota tim Pengelola (2000) pada saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN dan pada tahun yang sama menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad *Finance*. Memulai karier di perbankan, menangani keuangan dan administrasi kredit di PT Bank Risjad Salim International (1997-1999). Beliau memperoleh gelar *bachelor* di *Murdoch University*, Perth West Australia dan MBA di *Newport University*, LA USA



Tantri Indrawati

Tantri Indrawati menjabat sebagai Direktur Kepatuhan BCA Syariah sejak tanggal 25 Maret 2010 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas BCA Syariah nomor 60 dan 61 tertanggal 30 Maret 2010. Beliau bertanggung jawab atas Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di Bank Bukopin dan jabatan terakhir sebagai *Head Group Liabilities Commercial* (2004-2008), kemudian beliau memegang jabatan sebagai Direktur Kepatuhan di Bukopin Syariah (2008-2009) dan sebagai Direktur Pelayanan dan Pendanaan pada bank yang sama (2009-2010). Beliau memperoleh gelar Msi dalam bidang FISIP/PSDM di Universitas Indonesia.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Fathurrahman Djamil menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP. GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) periode 2010 - 2015, dosen di beberapa universitas negeri dan swasta serta menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga/institusi, yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah di CIMB Niaga, anggota Dewan Pengawas Syariah di AIA *Financial* dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Maskapai Reasuransi Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang ilmu Syariah dan mendapat gelar Profesor di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.



Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, M.A.

Muhammad Masyhuri Na'im menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCA Syariah sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 12/13/KEP. GBI/2010, tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat periode 2010 – 2015, dosen di beberapa universitas negeri dan swasta serta sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Syariah Harta Insan Karimah. Beliau memperoleh gelar MA dan Doktor dari Universitas Umm Al-Quro Makkah, Saudi Arabia.

PROFIL KOMITE AUDIT



Ridwan Masui
Anggota

Surja Widjaja
Ketua

Sutedjo Prihatono
Anggota

Surja Widjaja

(lihat profil Dewan Komisaris)

Ridwan Masui

Ridwan Masui menjabat sebagai anggota Komite Audit BCA Syariah sejak beroperasinya BCA Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di Bank Indonesia dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Staf ahli Deputi Gubernur Bidang Perbankan BI, sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan. Beliau memperoleh gelar S1 dari STIE Swadaya Jakarta.

Sutedjo Prihatono

Sutedjo Prihatono menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite pemantau Risiko BCA Syariah sejak awal bulan Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di Bank Muamalat Indonesia dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai *Senior Corporate AO* (2001-2004). Beliau memperoleh gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO



Sutedjo Prihatono
Anggota

H. Suhartono
Ketua

Rio Sigid Wisaksono
Anggota

H. Suhartono

(lihat profil Dewan Komisaris)

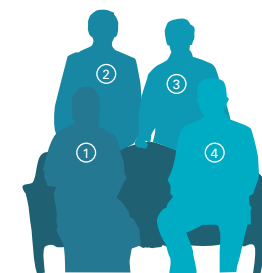
Rio Sigid Wisaksono

Rio Sigid Wisaksono menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah sejak beroperasinya BCA Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di beberapa Bank Swasta dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai *Senior Konsultan* di Cadipa Konsultan Jakarta. Beliau memperoleh gelar *doctorandus ekonomi (drs.)* dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada Fakultas Ekonomi Perusahaan.

Sutedjo Prihatono

(lihat profil Komite Audit).

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI



1. Endang Ruslina

2. H. Suhartono

3. Surja Widjaja

4. Iwan Kusumobagio

Iwan Kusumobagio

(lihat profil Dewan Komisaris)

H. Suhartono

(lihat profil Dewan Komisaris)

Surja Widjaja

(lihat profil Dewan Komisaris)

Endang Ruslina

Endang Ruslina menjabat sebagai anggota komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah sejak beroperasinya BCA Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarir di PT. Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhir beliau adalah *Senior Officer* di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM di BCA Syariah. Beliau memperoleh gelar *Insinyur* di Institut Pertanian Bogor pada Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian program studi Agri Bisnis.

KOMISARIS, DIREKSI DAN PEJABAT BCA SYARIAH



Pejabat Eksekutif
Per 31 Desember 2012

No	Nama	Cabang	Jabatan
1	YANTO TANAYA	KANTOR PUSAT	KEPALA UNIT BISNIS
2	PRANATA NAZAMUDDIN	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA PERENCANAAN, KONTROL DAN KEUANGAN & AKUNTANSI
3	VIRA EMILIA CHANDRA	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA TI & LOGISTIK
4	ABANG JUFERDI	KANTOR PUSAT	KEPALA DIVISI OPERASI
5	AMMY H. SUSANTO	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL
6	ENDANG RUSLINA	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA HUKUM & SDM
7	ADETYAS WENDIANA	KANTOR PUSAT	KEPALA DEPARTEMEN ANALISA RISIKO PEMBIAYAAN
8	SETYO BUDI RAHARDJO	KANTOR PUSAT	KEPALA DEPARTEMEN KEPATUHAN
9	SRI RAHAYU	JATINEGARA	KEPALA KANTOR CABANG JATINEGARA
10	FERIANTO	SUNTER	KEPALA KANTOR CABANG SUNTER
11	THE ADRIAN PRABOWO	SAMANHUDI	KEPALA KANTOR CABANG SAMANHUDI
12	MERLING THIOSANTO	MANGGA DUA	KEPALA KANTOR CABANG MANGGA DUA
13	ROESMAWATI	SURABAYA	KEPALA KANTOR CABANG SURABAYA
14	SAGIMAN	SEMARANG	KEPALA KANTOR CABANG SEMARANG

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPENGURUSAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BCA Syariah tanggal 25 Maret 2010, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas BCA Syariah nomor 60 dan nomor 61 tertanggal 30 Maret 2010, dibuat dihadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati SH, Susunan Pengurus BCA Syariah adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan Iwan Kusumobagio.
- Komisaris Independen : Tuan Surja Widjaja.
- Komisaris Independen : Tuan Haji Drs Suhartono, *Magister of Management*.

DIREKSI

- Direktur Utama : Nyonya Hajjah Yana Rosiana.
- Direktur : Tuan John Kosasih.
- Direktur Kepatuhan : Nyonya Tantri Indrawati.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- Ketua DPS : Tuan Prof. DR. Fathurrahman Djamil, *Master of Arts*.
- Anggota DPS : Tuan DR. Haji Muhammad Masyuri Naim, *Master of Arts*.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan akta Nomor 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati SH dan telah dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-30741, tertanggal 01 Desember 2010, komposisi Kepemilikan Saham BCA Syariah adalah sebagai berikut:

Nilai investasi	Lembar Saham	%	Nominal Rp
PT.BCA,Tbk	296.299	99,9997	296.299.000.000
PT.BCA Finance	1	0,0003	1.000.000
Jumlah	296.300	100	296.300.000.000

INFORMASI KELOMPOK USAHA

No	Keterangan	Rasio
1	PT Bank BCA Syariah	
	Pemegang Saham :	
	1. PT Bank BCA ,Tbk	99,9997 %
	2. PT BCA Finance	0,0003 %
2	PT Bank BCA, Tbk	
	Pemegang Saham :	
	1. Farlindo Investment (Mauritius) Ltd qq sdr Bambang Hartono dan Sdr Robert Budi Hartono	47,15 %
	2. Masyarakat	49,91 %
	3. Anthony Salim	1,76 %
	4. Treasury Stock	1,18 %
	Perusahaan Pengendali PT Bank BCA, Tbk	
1	Farlindo Investment (Mauritius) Limited	
	Pemegang Saham	
	Treasury Stock	7,82 %
	Alaerka Investment Limited	92,18 %
2	Alaerka Investment Limited	
	Pemegang Saham	
	Brolona Investment Limited	100 %
3	Brolona Investment Limited	

PRODUK DAN LAYANAN

Produk	Keterangan
Produk Simpanan	Tahapan iB
	Giro iB
	Deposito iB
	Tahapan Rencana iB
Produk Pembiayaan	Pembiayaan Modal Kerja iB
	Pembiayaan Investasi iB
	KPR iB
	KKB iB
Perbankan Elektronik	ATM BCA
	Debit BCA
	Jaringan ATM Prima
Jasa	Bank Garansi
	Kiriman Uang (<i>Retail</i> dan <i>RTGS</i>)
	Kliring (Lokal dan <i>Intercity Clearing</i>)
	Inkaso
	<i>Safe Deposit Box</i> (SDB)
	Pembayaran Gaji (<i>payroll</i>)
	Referensi Bank

JARINGAN KANTOR

Lokasi Kantor Wilayah Jakarta

No	Kantor	Alamat	Telepon
1	KC Jatinegara	Jl. Jatinegara Timur No. 72 - Jakarta Timur 13310	(021) 850 5030, 850 5035, 819 0072, Fax. (021) 859 01568
2	KC Mangga Dua	Ruko Agung Sedayu (Harco Mg. Dua) Blok E No. 26, Jl. Mangga Dua Raya – Jakarta 10730	(021) 612 3758-9, 612 3761-2, Fax. (021) 612 3763
3	KC Samanhudi	Komp. Perkantoran Mitra Krekot, Jl. KH Samanhudi No. 21 - Jakarta 10710	(021) 386 6457-9, 380 7770-1, Fax. (021) 384 5802
4	KC Sunter	Komp. Ruko Jl. Mitra Sunter Boulevard, Blok A Kav.10 Sunter - Jakarta 14350	(021) 658 37724, 658 37725, 658 37726, Fax. (021) 658 37727
5	KCP Kenari	Komp. Pasar Kenari Baru Ex. Pegadaian Kios A 18-19, Jl. Salemba Raya No. 02 - Jakarta 10430	(021) 391 4404-5, Fax. (021) 391 4475
6	KCP Kelapa Gading	Jl. Boulevard Raya Blok WD 2/3, Kelapa Gading Jakarta 14240	(021) 4587 9429, 4587 9430, Fax. (021) 4587 9433
7	ULS Pasar Tanah Abang - BCA KCP Pasar Tanah Abang	Pasar Tanah Abang Blok A, Lt. Basement I Los F No. 81-83 - Jakarta 10250	(021) 2357 1292
8	ULS Metro Pondok Indah - BCA KCP Metro Pondok Indah	Jl. Metro Pondok Indah UA No. 60-61 - Jakarta 12310	(021) 769 3823
9	ULS Pasar Minggu – BCA KCP Pasar Minggu	Jl. Raya Pasar Minggu No.6 Jakarta Selatan 12740	(021) 791 8 8703
10	ULSTanjung Priok – BCA KCU Tanjung Priok	Jl. Enggano 22-23, Jakarta Utara 14310	(021) 4393 7937
11	ULS Gudang Peluru –BCA KCP Gudang Peluru	Komp. Gudang Peluru Blok A No. 23, Jl. Kampung Melayu Besar – Jakarta 12830	(021)-8591 4289
12	ULS Melawai – BCA KCP Melawai	Jl. Melawai Raya 165 Blok C1-3- Jakarta 12160	(021)7278 0409
13	ULS Kemang Mansion- BCA KCP Kemang Mansion	Shopping ArcadeThe Mansion At Kemang, Jl. Kemang Raya No.3-5 – Jakarta Selatan	(021) 290 55560

Lokasi Kantor Wilayah Bekasi

No	Kantor	Alamat	Telepon
14	KCP Bekasi	Komp. Pertokoan Pratama Plaza, Blok A 4/12, Jl. Ir. H. Juanda No. 151 Bekasi - Jawa Barat 17111	(021) 880 3011-2, 881 1973, Fax. (021) 881 1972
15	KCP BUR Kranji - Bekasi	JL. Raya Pemuda Rt 005/Rw 004, Kecamatan Bekasi Barat 17135	(021) 8866932, 88952463, 88953003, Fax. (021)-8866932

Lokasi Kantor Wilayah Bogor

No	Kantor	Alamat	Telepon
16	ULS Bogor - BCA KCU Bogor	Jl. Ir H. Juanda No. 28 Bogor - Jawa Barat 16122	(0251) 832 7255
17	KCP BUR Pasar Anyar - Bogor	Ruko Taman Topi Square Jl.Kapten Muslimat RT 03/Rw 01 Kelurahan Paledang , Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122	(0251) 8392942, 8338377, Fax. (0251) 0251-8338377

Lokasi Kantor Wilayah Depok

No	Kantor	Alamat	Telepon
18	ULS Depok - BCA KCU Margonda	Jl. Margonda Raya No. 182 Depok - Jawa Barat 16423	(021) 7721 8192
19	ULS Tangerang - BCA KCU Tangerang	Jl. Kisamaun No. 57Tangerang - Banten 15118	(021) 5577 0024
20	KCP BUR Cileduk - Tangerang	Ruko Dian Plaza Jl. Raden Patah No. 8A Ruko No. 12A, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang 15151	(021) 73451916, 73451976, Fax. (021) 73451976

Lokasi Kantor Wilayah Cimanggis

No	Kantor	Alamat	Telepon
21	ULS Cimanggis –BCA KCP Cimanggis	Jl. Raya Bogor Km.29, Cimanggis – Cibinong 16951	(021) 877 14758

Lokasi Kantor Wilayah Surabaya

No	Kantor	Alamat	Telepon
22	KC Surabaya	Jl. Mayjen Sungkono Komplek Pertokoan Darmo Park No. 3-4 Blok III/B1, Surabaya Barat	(031) 568 0373, 568 0374, Fax. (031) 568 0358
23	ULS Darmo - BCA KCU Darmo	Jl. Raya Darmo 5, Surabaya - Jawa Timur 60265	(031) 567 8137
24	ULS Veteran - BCA KCU Veteran	Jl. Veteran No. 18-24, Surabaya - Jawa Timur 60175	(031) 357 2956
25	ULS Sidoarjo-BCA KCU Sidoarjo	Jl. Ahmad Yani 39 A, Sidoarjo 61212	(031) 896 8805
26	ULS Kapas Krampung - BCA KCP Kapas Krampong	Jl. Kapas Krampung 126,126 A-B	(031) 504 7946
27	ULS PondokTjandra – BCA KCP Pondok Chandra	Komp. Pertokoan Pondok Chandra, Jl. Palem TC-9, Surabaya	(031) 867 5613
28	ULS Sepanjang – BCA KCP Sepanjang	Taman Sepanjang, Jl. Raya Wonocolo No.46 A, Sidoarjo	(031) 788 7183
29	ULS Perak Barat	Jl Perak Barat 267	(031) 32823333

Lokasi Kantor Wilayah Semarang

No	Kantor	Alamat	Telepon
30	KC Semarang - BCA KCU Pemuda	Jl Pemuda 90 - 92 Semarang	(024) 70852985, 70852941, 3580530, 3557444, 3557234, 3557918, 3559779, Fax. (024) 3580391